



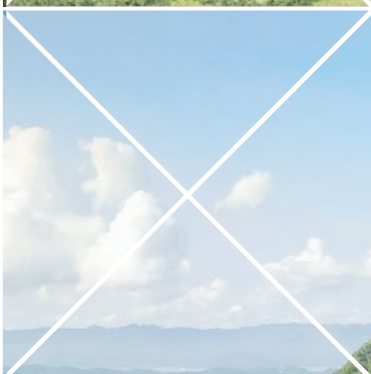
PEMERINTAH
PROVINSI
PAPUA



Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMD

PROVINSI PAPUA (2019-2023)



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas Berkat dan Rahmat-Nya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun 2019-2023 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan. Penyusunan RPJMD ini adalah kewajiban konstitusional Saya dan Saudara Klemen Tinal sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023, yang merupakan penjabaran Visi dan Misi kami dengan tetap memperhatikan RPJM Nasional, kelanjutan pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya serta aspirasi yang merupakan Harapan Seluruh Rakyat (HASRAT) Papua yang berada di rawa-rawa, di daerah perbatasan, di lembah dan di gunung-gunung, di pesisir pantai dan pulau-pulau terpencil. HASRAT Papua terdiri dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti Pendidikan yang mudah dan berkualitas, pelayanan Kesehatan yang mudah dan murah, peningkatan perekonomian masyarakat secara mandiri, pelayanan Sosial yang berkualitas, peningkatan pelayanan Keagamaan, pemenuhan Infrastruktur Dasar; kebebasan seperti bebas dari rasa takut, bebas berpendapat, bebas beraktivitas sesuai talenta yang Tuhan berikan, namun kebebasan ini juga diseimbangkan dan menghormati dengan hak-hak orang lain; menumbuhkan kepercayaan diri yaitu meningkatkan harkat dan martabat serta percaya diri seluruh orang Papua.

Harapan saya, dokumen RPJMD ini menjadi rujukan dan pegangan utama bagi seluruh stakeholders di Provinsi Papua, untuk bersama-sama mewujudkan visi KITA bersama yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan. Visi kita ini, hanya mungkin terwujud jika Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan dukungan luas dari seluruh pelaku pembangunan, Pemerintah, Agama, Adat, MRP, DPRP, TNI, POLRI, Mitra Kerja pembangunan daerah, sektor swasta, BUMN, Instansi Vertikal dan seluruh masyarakat Papua.

Dan saya selaku Gubernur mengajak kepada semua aparatur daerah untuk bekerja menjalankan RPJMD Provinsi Papua secara sungguh-sungguh dengan penuh kesungguhan hati. Sebaik apapun dokumen RPJMD ini kita susun, akan berarti apabila dapat diwujudkan untuk Kebangkitan, Kemandirian, Kesejahteraan dan Keadilan bagi seluruh masyarakat khususnya Orang Asli Papua. Tantangan Papua kedepan begitu besar, kita memerlukan terobosan, kreatifitas dan inovatif dalam melakukan akselerasi pembangunan. Semoga RPJMD ini menjadi rujukan kita untuk bekerja dan berkarya demi terpenuhinya harapan seluruh rakyat Papua.

Sekian dan terima kasih.

Gubernur Papua,

Lukas Enembe, SIP, MH

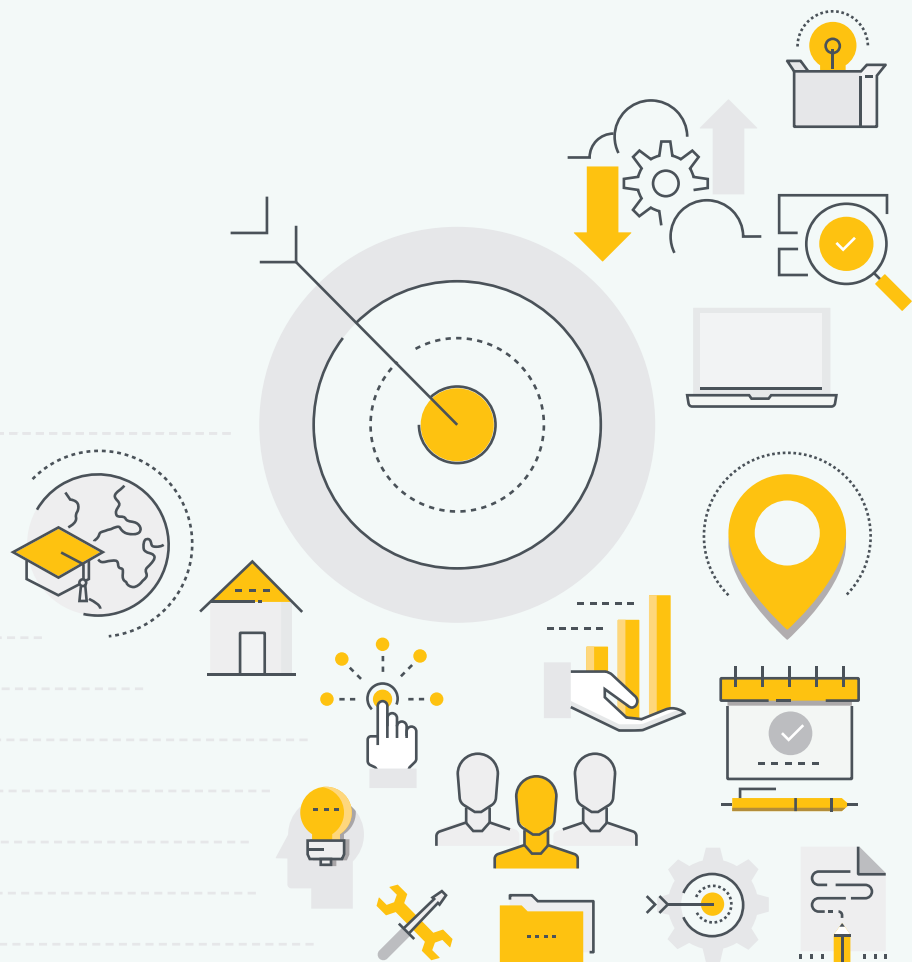
DAFTAR ISI

Bab 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	1
1.1 Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua Tahun 2019-2023.....	2
1.2 Misi Pembangunan Daerah Tahun 2019-2023	5
1.3 Tujuan dan Sasaran	10
Bab 2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah	23
2.1 Strategi Pembangunan Daerah	24
2.1.1 Prinsip dan Nilai Dasar Pembangunan	25
2.1.2 Orientasi Pembangunan.....	26
2.1.3 Pendekatan Pembangunan.....	27
2.1.4 Strategi Pencapaian Sasaran.....	28
2.2 Arah Kebijakan	28
2.2.1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan.....	28
2.2.2 Arah Pembangunan Kewilayahan	42
2.3. Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas.....	60
Bab 3. Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah	87
3.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah	88
3.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan	90
Bab 4. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	189
Bab 5. Penutup.....	229
5.1. Kaidah Implementasi	230
5.2. Pedoman Transisi	231

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada periode tahun 2019-2023 yang didasarkan pada konsolidasi visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan berbagai isu strategis yang mengemuka di Papua, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk masa 5 (lima) tahun mendatang



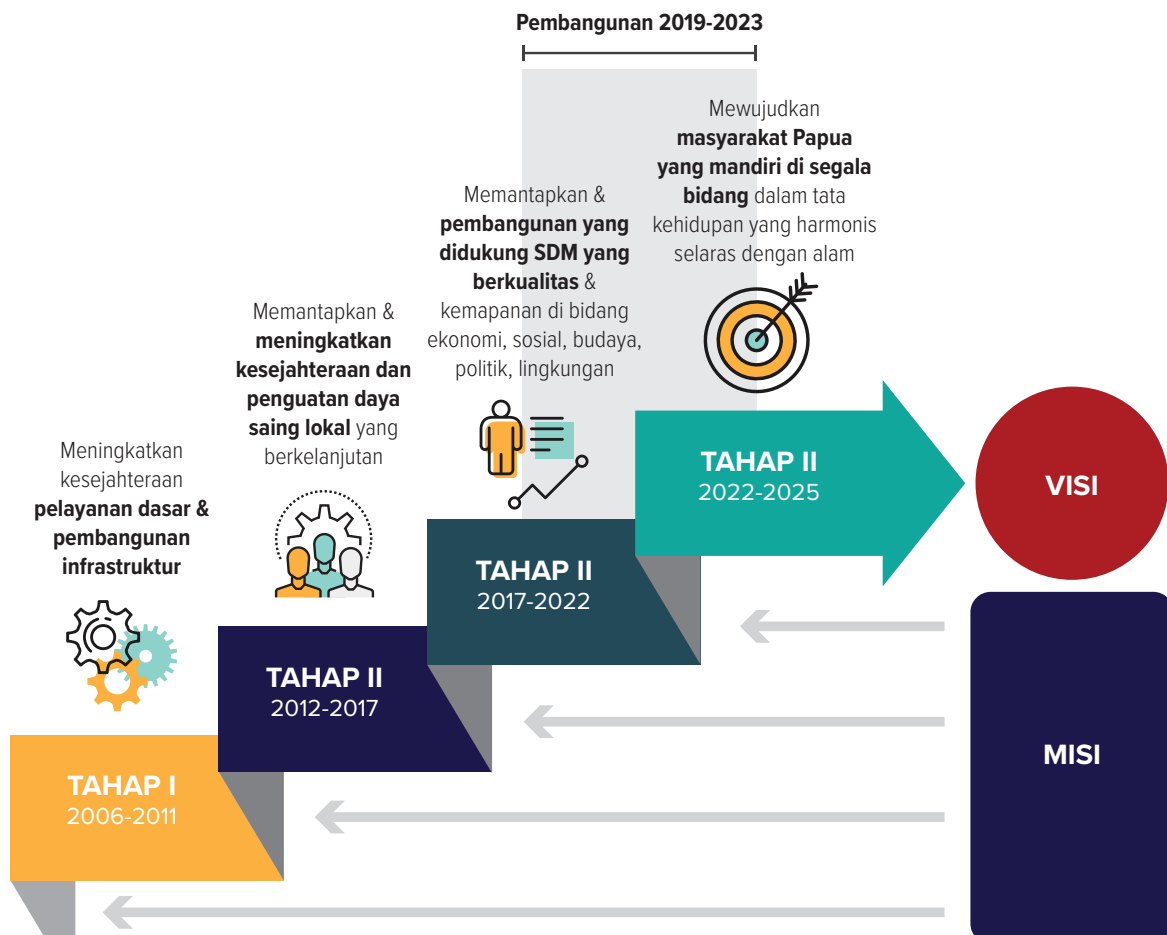
1.1 VISI PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023

Provinsi Papua memiliki modal dan aset yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografis penduduk, serta sumber daya kultural yang beragam dan kuat. Kita mampu bangkit dan mandiri mengubah tantangan pembangunan menjadi peluang dan kesempatan. Kita juga mempunyai lahan yang luas dan subur yang bisa ditanami oleh berbagai komoditi pangan dan pertanian. Masyarakat Papua memiliki potensi tinggi di berbagai bidang, kesenian dan budaya, dan olah raga serta kreativitas.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan yang telah menuai beragam hasil pada periode 2013-2018, harus terus dipertahankan dan dikembangkan. Capaian dan prestasi pembangunan di tahun 2013-2018, pada hakekatnya adalah salah satu modal dasar –*main capital*– yang harus dilanjutkan untuk meraih capaian dan prestasi pembangunan yang lebih baik lagi, di lima tahun yang akan datang. Pada periode 2019-2023 akan terus dan konsisten berfokus pada meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua, membangun keadilan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, menjaga kesatuan Negara Republik Indonesia.

Periode 2019-2023 merupakan tahap ke tiga dalam proses pencapaian Visi jangka panjang Provinsi Papua. Visi Pembangunan Daerah Jangka Panjang seperti yang telah dituangkan dalam dokumen Rancangan RPJPD Provinsi Papua tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya Papua yang Mandiri secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik. Dalam hal ini, agenda atau tema tahap ke tiga pembangunan jangka panjang Provinsi Papua yang sesuai dengan periode RPJMD Provinsi Papua 2019- 2023, ditujukan untuk Memantapkan Pembangunan yang didukung SDM Berkualitas dan Kemapanan di Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Politik, dan Lingkungan.

GAMBAR 1.1. AGENDA/TEMA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI PAPUA



Pelaksanaan pembangunan pada tahap ini dilakukan dengan meningkatkan kemandirian, kemitraan, dan keterlibatan Orang Asli Papua dalam segala bidang pembangunan yang berorientasi pada kemandirian dan keamanan lokal berbasis keberlanjutan, ketahanan pangan, kemampuan daya saing, yang didukung perlindungan perempuan dan anak, serta menekankan pada kesetaraan gender dan terwujudnya lembaga jaminan sosial. Keamanan ini juga ditunjukkan dengan pelembagaan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal yang didukung oleh kepatuhan dan penegakan hukum, ketentraman dan ketertiban serta budaya kerja yang profesional.

Selanjutnya budaya demokrasi dan saling menghormati perbedaan dan pendapat dengan menitikberatkan kesatuan bangsa dalam koridor NKRI tetap sehat dan berkembang secara dinamis, namun tetap berbasis pada kearifan lokal, khususnya dalam pelaksanaan otonomi khusus yang memasuki tahun ke-20. Pelaksanaan otonomi khusus tetap berprinsip pada peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua yang dilandasi prinsip pembangunan berkelanjutan dengan memberikan manfaat sosial setinggi-tingginya; penguatan kelembagaan pengelola SDA dan lingkungan; peningkatan kemampuan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana alam; serta menghindari pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali.

Sarana dan prasarana dasar dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya sehingga keamanan bidang infrastruktur dapat menjamin keberlanjutan kemandirian lokal, yang dituangkan dalam program berkesinambungan, melalui pendampingan dan penguatan kelembagaan sosial; keamanan di bidang kebutuhan dasar sandang, pangan, papan, fasilitas pendidikan dan kesehatan. Program tersebut didukung akses pada sumber daya berbasis budaya lokal yang mampu mempertahankan kemandirian masyarakat Papua berdasarkan perkembangan IPTEK yang mampu dipahami dan dikuasai untuk diterapkan.

Berdasarkan uraian di atas dan mencermati tantangan pembangunan masa depan, maka visi Provinsi Papua tahun 2019-2023, adalah:

PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA YANG BERKEADILAN

Kebangkitan, Kemandirian dan Kesejahteraan masyarakat Papua sebagai cita-cita bersama akan terwujud secara hakiki jika dalam pelaksanaan pembangunan menjawab rasa Keadilan bagi seluruh masyarakat di Provinsi Papua. Korelasi antara Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan sebagai visi pembangunan dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Papua yang BERKEADILAN menjadi fokus utama bagi perwujudan PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA, yang diselimuti dengan prinsip Kasih Menembus Perbedaan, karena dengan kasih yang akan menembus segala sekat-sekat perbedaan yang ada, inilah yang disebut Papua yang Baru dalam Bingkai Peradaban Baru Papua. Pelaksanaan pembangunan harus dengan pendekatan KASIH, menjadikan pembangunan yang dilaksanakan dapat menghilangkan perasaan masyarakat Papua terhadap bentuk ketidakadilan, marginalisasi, ketimpangan dan diskriminasi.

GAMBAR 1.2. VISI PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023



Pendekatan Kasih ini diharapkan dapat menghilangkan konflik dalam masyarakat dan pembangunan dapat terus terjaga dan terpelihara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Adapun penjelasan setiap elemen visi di atas adalah sebagai berikut:

PAPUA BANGKIT

Papua Bangkit berarti terwujudnya masyarakat Papua yang berkemauan dan bertekad tinggi sebagai kesadaran kontemplatif kolektif untuk melepaskan diri dari label ketertinggalan dan kemiskinan untuk mencapai derajat kualitas hidup yang setinggi-tingginya, sehingga mampu berdiri tegak dengan harkat dan martabat dalam bingkai NKRI tanpa menghilangkan identitas diri dan kekhususan ke-Papua-an. Kebangkitan ini terjadi di level individu, keluarga, komunitas, maupun regional. Identitas diri orang Papua diakui dan dihormati dalam berbagai level dan bidang pembangunan. Dalam hal ini, orang Papua mampu mengaktualisasikan diri dan mengambil peran di berbagai bidang pembangunan. Papua Bangkit dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin baik.

PAPUA MANDIRI

Papua mandiri berarti terwujudnya masyarakat Papua yang mampu mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan kemajuan ekonomi, dengan didukung generasi baru Papua yang memiliki jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*) serta ekonomi kampung tumbuh dan berkembang. Perwujudan Papua Mandiri dilakukan dengan mendorong tumbuhnya sektor unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pariwisata. Tumbuhnya sektor unggulan ini dapat memberi nilai tambah dalam pembangunan dan memastikan tersedianya lapangan kerja, yang didukung pengembangan industri pengolahan yang berbasis keunggulan potensi daerah dan industri ramah lingkungan. Papua Mandiri dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Papua pada sektor dan subsektor unggulan yang semakin baik.

PAPUA SEJAHTERA

Secara sederhana, sejahtera dipahami sebagai tidak kekurangan sesuatu apapun, perasaan aman sentosa, makmur dan selamat atau terlepas dari segala macam gangguan. Dengan pendekatan yang lain, sejahtera dapat dikaitkan dengan meningkatnya kualitas hidup yang setinggi-tingginya yang tercermindari kenyamanan masyarakat Papua dalam menjalani kehidupan dan menikmati hasil pembangunan. Dalam hal ini, kesejahteraan tidak hanya merupakan konsep lahiriah, tapi juga menjangkau segi batiniah. Kesejahteraan juga bermakna kemampuan sumber daya alam Papua yang kaya dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks makro, pembangunan daerah juga dimaknai sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Papua untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

PAPUA BERKEADILAN

Papua Berkeadilan berarti masyarakat Papua tanpa terkecuali dapat memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, sandang dan papan secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada Pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. Sikap mental dan perilaku adil, menjunjung tinggi kesetaraan dan kebersamaan, didukung moral dan budaya gotong royong, saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai luhur kemanusiaan, mempertahankan eksistensi dan jati diri orang asli Papua sebagai kebanggaan sudah terbentuk dan tertanam di dalam setiap individu orang asli Papua. Pembangunan yang adil dan merata merupakan partisipasi aktif adat dan agama serta seluruh komponen masyarakat, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat khususnya Orang Asli Papua.

1.2 MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019-2023

Misi pembangunan 2019-2023 merupakan rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi, namun tidak terlepas dari kondisi dan tantangan lingkungan global dan domestik pada kurun waktu 2019-2023 yang mempengaruhinya. Misi pembangunan juga diarahkan untuk mewujudkan visi jangka panjang daerah yakni *Papua Mandiri Secara Sosial, Budaya, Ekonomi dan Politik*. Usaha-usaha Perwujudan visi akan dijabarkan dalam misi, sebagai berikut:

GAMBAR 1.3. MISI PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023



Penjelasan masing-masing misi:

Misi Pertama: Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM

Memantapkan kualitas dan daya saing SDM Papua dilakukan untuk mendukung dan mewujudkan kebangkitan dan kemandirian. Orang Papua yang mandiri memiliki kemauan, kreatif dan inovatif sebagai pelaku pembangunan bagi kemajuan daerah untuk mencapai kualitas hidup manusia serta memungkinkan setiap orang dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kualitas manusia yang bermutu tinggi ditandai dengan meningkatnya IPM yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi lokal Papua dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Program pembangunan dalam peningkatan kualitas dan daya saing SDM tahun 2013-2018 telah meletakkan pondasi dalam memantapkan kualitas dan daya Saing SDM. Hal ini diketahui berdasarkan hasil yang telah dicapai seperti peningkatan angka partisipasi pendidikan, peningkatan angka melek huruf, penurunan angka kematian ibu, pengiriman siswa-siswa berprestasi Asli Papua melanjutkan sekolah di dalam dan luar negeri serta tercapainya target peningkatan IPM tahun 2018. Pondasi peningkatan kualitas dan daya saing SDM juga dapat dilihat dari kebijakan dan program-program yang sudah berjalan dengan baik.

Pelaksanaan pembangunan tahun 2019-2023 mendatang tetap konsisten melanjutkan berbagai program peningkatan kualitas dan daya saing SDM Papua yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan lebih lanjut dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dan terarah dalam bentuk pengarusutamaan anggaran, kebijakan serta pengawasan dan pengendalian program terutama pada program beasiswa di dalam dan luar negeri untuk anak Asli Papua. Misi memantapkan kualitas dan daya saing SDM Papua akan menjadi

prioritas utama dalam pembangunan periode 2019- 2023, yang berfokus pada bidang pendidikan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengembangan IPTEK. SDM yang berdaya saing juga akan tercapai jika SDM Papua terjamin dalam pasokan pangannya dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dalam hal ini, kemandirian pangan dan gizi merupakan prioritas dalam pembangunan Papua.

Misi Kedua: Memantapkan Rasa Aman, Tenram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI

Terjaminnya ketentraman dan ketertiban yang menciptakan rasa aman bagi masyarakat, merupakan jaminan bagi terlaksananya pembangunan. Pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya telah dapat dirasakan rasa aman, tenram dan damai, walaupun masih ada peristiwa-peristiwa yang mengganggu rasa aman dan tenram masyarakat. Oleh karena itu pembangunan akan diarahkan untuk memperkuat kerukunan hidup umat beragama. Sejauh ini telah terdapat peningkatan rasa saling menghargai, rasa percaya dan harmonisasi antar kelompok sehingga tercipta kehidupan toleransi dan tenggang rasa di masyarakat. Di samping itu, dengan keberagaman etnik yang ada di masyarakat, pembangunan budaya diarahkan untuk menghargai nilai budaya masing-masing etnik sebagai suatu nilai keunggulan Provinsi Papua dengan menanamkan prinsip kasih menembus perbedaan. Pemantapan sistem kerukunan hidup juga harus disertai dengan penerapan dan penegakan hukum dan HAM yang dilaksanakan secara tegas dan profesional.

Masyarakat yang demokratis merupakan landasan penting untuk tercapainya masyarakat yang mandiri. Upaya mewujudkan masyarakat yang demokratis dilakukan dengan menguatkan kelembagaan sosial dan politik; memperkuat peran masyarakat; melaksanakan tata pemerintahan yang terdesentralisasi pada tingkat distrik dan kampung; meningkatkan partisipasi dan transparansi; serta mendorong peningkatan peran media massa dan pers dalam pembangunan.

Misi Ketiga: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan tata kelola pemerintahan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatnya daya saing suatu daerah. Wujud dari penguatan tata kelola adalah meningkatnya transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas serta meningkatnya pelayanan kepada publik. Sejauh ini, disiplin ASN telah meningkat secara signifikan dan Pemerintah Provinsi Papua telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK atas Laporan Keuangan Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya keras dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan tahun 2013-2018 telah berada dalam arah yang benar. Meskipun demikian, capaian selama periode sebelumnya masih perlu ditingkatkan dan dimantapkan. Harus ada upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tatakelola pemerintahan ini.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting untuk menjaga kelangsungan pembangunan berkelanjutan. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi pada periode 2013-2018 dilakukan melalui peningkatan disiplin ASN; pengelolaan keuangan daerah; penerapan e-Government Provinsi Papua dalam perencanaan, penganggaran, pendapatan, dan investasi daerah; serta penerapan sistem tunjangan kinerja daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, upaya yang telah dilakukan akan dimantapkan dan diperkuat, yang didukung perubahan *mind-set*, *culture-set* dan pengembangan budaya kerja secara lebih cepat dan terarah. Dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh, dan akan dipimpin langsung

oleh Gubernur dan Wakil Gubernur. Reformasi birokrasi ini juga akan memperkuat hubungan kelembagaan yang harmonis antara Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota dan kampung, untuk memastikan implementasi Otonomi Khusus Papua dengan baik, termasuk melalui pembiayaan bersama dan transfer anggaran yang mendukung pemerataan dan keadilan.

Misi Keempat: Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah berbasis Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural secara Berkelanjutan

Periode pembangunan 2013-2018 telah berhasil membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua berbasis ekonomi lokal. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari terwujudnya iklim investasi yang kondusif, tercapainya stabilitas makro ekonomi, terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari, dan meningkatnya perekonomian masyarakat khususnya di kampung-kampung. Penguatan dan percepatan perekonomian Provinsi Papua pada periode 2019-2023 akan tetap memperkuat ekonomi daerah berbasis karakteristik dan potensi setiap wilayah, dengan menitikberatkan pada hubungan antar wilayah/kampung yang didorong keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar wilayah/daerah yang kokoh dan berkesinambungan. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam meningkatkan produktivitas sumber daya ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan mutu produk dan menciptakan nilai tambah.

Penguatan dan percepatan perekonomian daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam, harus tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada orang asli Papua untuk memperoleh akses legal melalui skema-skema perhutanan sosial dan hutan adat. Pemberdayaan orang asli Papua diprioritaskan untuk: menjamin akses bagi masyarakat memperoleh sumber daya ekonomi; memperkuat kemampuan dan kelembagaan masyarakat kampung untuk mengelola sistem produksi, konsumsi dan infrastruktur secara mandiri; dan Pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan berkelanjutan. Pengembangan wilayah tetap dilakukan berbasis kultural yaitu wilayah La Pago, Mee Pago, Mamta, Saereri dan Animha, yang akan difokuskan pada pembangunan berbasis kampung dengan prinsip kesetaraan pemenuhan kebutuhan hidup dan pencapaian kualitas hidup di seluruh wilayah Papua, sehingga mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih mampu mendorong percepatan kemandirian masyarakat asli Papua.

Untuk mendukung perekonomian dan pengembangan wilayah secara merata, akan didukung oleh peningkatan dan percepatan konektivitas antar wilayah dan Pemenuhan sarana dan prasarana dasar di wilayah distrik dan kampung diarahkan pembangunan jaringan transportasi antar kampung, pengembangan tenaga listrik terbarukan dan pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi bagi masyarakat asli Papua. Peningkatan dan percepatan konektivitas antar wilayah dan Pemenuhan sarana dan prasarana dasar akan diprioritaskan pada periode 2019-2023.

Misi Kelima: Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu

Pembangunan yang merata dan berkeadilan akan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan periode 2019-2023 karena pelaksanaan pembangunan di masa lalu belum mampu mewujudkan pemerataan dan keadilan yang menjadi harapan seluruh masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena proses pembangunan yang tidak adil sedemikian intensif pada masa lalu sehingga tidak cukup diperbaiki dalam satu periode pelaksanaan pembangunan.

Perwujudan pembangunan yang merata dan berkeadilan akan diwujudkan di berbagai bidang. Di bidang ekonomi, pemerataan dan keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan distribusi pendapatan, perbaikan pemerataan pendapatan antar daerah, perbaikan kesenjangan antara kampung, terjadinya proses afirmasi bagi orang asli Papua. Dalam bidang sosial, pemerataan dan keadilan berupa perbaikan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebebasan berpolitik, serta pemerataan antara laki-laki dan perempuan. Upaya pemerataan dan keadilan dalam periode 2019-2023 dilakukan dengan berbagai kebijakan. Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan, bantuan untuk program pendidikan melalui beasiswa, kesehatan melalui Kartu Papua Sehat dan Gerbangmas pada periode 2013- 2018 adalah bukti nyata dari upaya tersebut.

Pada lima tahun ke depan, penguatan pemerataan dan keadilan akan dilakukan untuk setiap kebijakan dan kegiatan. Langkah ini diharapkan dalam jangka pendek akan memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga tersebut (memperbaiki distribusi pendapatan) dan dalam jangka panjang akan dihasilkan generasi baru yang lebih baik tingkat pendidikan dan kesehatannya. Pemerintah Daerah akan memperkuat pengawasan dan pengendalian dari semua program agar benar-benar menysasar orang Asli Papua khususnya yang berada di kampung-kampung. Selanjutnya pengurangan kemiskinan akan diprioritaskan bantuan langsung (*cash transfer*) kepada seluruh penduduk anak usia 4 tahun ke bawah dan usia 60 tahun keatas melalui Program Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera (BANGGA PAPUA) dan perlindungan sosial melalui bantuan langsung dan program pembedayaan KAT dan bantuan sosial PMKS. Untuk memperkuat perekonomian di level wilayah akan menerapkan trilogi pengembangan ekonomi Papua, yaitu: 1) perubahan pola pikir masyarakat; 2) pengwilayahan komoditas unggulan daerah; serta 3) penerapan prinsip tanam, petik, olah dan jual.

TABEL 1.1. INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan		Target	Target
			2017	2018	2023	RPJPD
1	IPM	indeks	59,09	60,19	65	70
2	Persentase Penduduk Miskin	%	27,76	27,74	20	< 19
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,64	4,96	5 – 6,5	6,21
4	PDRB Perkapita (TT)	juta Rp	37,51	39,82	50	> 40
5	Gini Rasio	%	0,400	0,397	0.3845	-
6	Pengangguran Terbuka	%	3,62	2,91	2,00	1,9
7	Konektivitas Wilayah (akses reguler ke ibukota kab/kota)	%	64,29	64,29	100	-
8	Intensitas Emisi GRK	ton CO2 per juta rupiah	0,392	0,392	0,282	-

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, ditetapkan kriteria dan indikator-indikator makro pembangunan sebagai perwujudan pencapaian visi dan misi Provinsi Papua tahun 2019-2023. Penjabaran indikator makro keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi dapat dilihat pada Tabel 1.1.

1.3 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* dari program yang dilaksanakan perangkat daerah.

Misi ke-1: Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM

Misi ke-1 mempunyai 1 tujuan dan 7 sasaran, yaitu:

T1. Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing, dengan sasaran:

- S1. Meningkatnya aksesibilitas, mutu dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan
- S2. Meningkatkan budaya baca pada masyarakat
- S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- S4. Sukses penyelenggaraan PON dan prestasi olahraga
- S5. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
- S6. Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan
- S7. Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat

Misi ke-2 mempunyai 1 tujuan dan 4 sasaran, yaitu:

T2. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang berbasis kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua, dengan sasaran:

- S8. Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum
- S9. Meningkatnya keharmonisan dan kohesivitas masyarakat
- S10. Meningkatnya penegakanHAM
- S11. Meningkatnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi

Misi ke-3: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Misi ke-3 mempunyai 1 tujuan dan 4 sasaran, yaitu:

T3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran:

- S12. Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua
- S13. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- S14. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah
- S15. Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah

Misi ke-4: Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah berbasis Kultural dan Berkelanjutan

Misi ke-4 mempunyai 2 tujuan dan 14 sasaran, yaitu:

T4. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan, dengan sasaran:

- S16. Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
- S17. Mengoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan
- S18. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim
- S19. Meningkatkan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan
- S20. Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal dan berkelanjutan
- S21. Meningkatkan pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan
- S22. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
- S23. Meningkatkan daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah

T5. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Daerah Guna Menopang Pengembangan Wilayah Serta Akses Pada Layanan Dasar dan Pasar, dengan sasaran:

- S24. Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah
- S25. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten
- S26. Meningkatkan ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah
- S27. Meningkatkan pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman
- S28. Meningkatkan ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan
- S29. Meningkatkan jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah

Misi ke-5 mempunyai 1 tujuan dan 6 sasaran, yaitu:

T6. Meningkatkan pemerataan pembangunan, dengan sasaran:

- S30. Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis kampung
- S31. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP
- S32. Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan
- S33. Meningkatkan pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS
- S34. Meningkatkan kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
- S35. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan upaya perlindungan anak

TABEL 1.2. MATRIKS KESELARASAN MISI, TUJUAN SASARAN SERTA INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Awal Perencanaan			Target Kinerja			Kondisi Akhir Perencanaan	
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023
M1	Misi Pertama, Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM										
T1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	59,09	60,11	61,15	62,20	63,27	64,36	65,47	65,47
		Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai Indeks	48,83	50,54	52,30	54,13	56,02	57,97	60,00	60,00
		Indeks Pembangunan Olah Raga	Tingkatan Status	n/a	n/a	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
		Persentase potensi budaya lokal yang dilestarikan	persen	n/a	n/a	40	45	50	55	60	60
		Indeks Ketahanan Pangan	Nilai Indeks	n/a	37,09	39,53	42,13	44,90	47,85	51,00	51,00
S1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6,3	6,6	6,9	7,2	7,5	7,8	8,2	8,21
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	10,5	10,8	11,0	11,2	11,5	11,7	12,0	12,00
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	73,89	74,9	75,9	76,9	77,9	78,9	80,0	80,00
		Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas 2 dan 3	Persen	40,00	42,8	45,8	49,0	52,4	56,1	60,0	60,00
S2	Meningkatnya budaya baca pada masyarakat	Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	orang per hari	n/a	n/a	150	150	200	250	300	300
S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	65,14	65,86	66,59	67,33	68,07	68,83	69,59	69,59
S4	Sukses pelaksanaan PON dan prestasi olahraga	Perolehan medali emas dalam PON	medali	17	-	-	90	-	-	-	90

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan					Target Kinerja			Kondisi Akhir Perencanaan	
			Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		Deskripsi										
		Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	30	30	40	80	85	95	100	100	100
		Ketepatan pelaksanaan PON					tepat waktu					
S5	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	68,08	69,19	70,3	71,5	72,6	73,8	75,0	75,0	75,00
		Persentase pemuda Asli Papua yang menjadi wirausahawan	persen	15,60	16,6	17,7	18,8	20,1	21,4	22,8	22,8	22,76
S6	Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan	Cakupan daerah rawan pangan	jumlah kabupaten/kota	13	13	11	10	9	7	7	7	7
		Persentase kenaikan cadangan pangan	persen	26,95	27,44	27,93	28,43	28,95	29,47	30,00	30,00	30
		Persentase penduduk tahan pangan	persen	40,04	42,83	45,82	49,01	52,43	56,09	60,00	60,00	60
S7	Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Tanah Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat	Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	jumlah	3	3	1	1	1	1	1	1	5
		Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	0	0	0	0	1	0	1	1	2
		Cakupan kurikulum muatan lokal	persen	n/a	n/a	2	2	2,5	2,5	5	5	5
T2	Tujuan 2 Meningkatkan keamanan, ketentrangan dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua	Angka Kriminalitas	per 100.000 penduduk	236,00	218,00	202,00	187,00	173,00	159,00	147,00	147,00	147,00
		Indeks Demokrasi	Nilai Indeks	61,02	61,36	61,70	62,04	62,39	62,73	63,08	63,08	63,08

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan					Target Kinerja			Kondisi Akhir Perencanaan
			Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
S8	Meningkatnya suasana tertib, aman dan kepastian hukum	Rasio kriminalitas yang ditangani	persen	63,62	64,64	65,68	66,73	67,81	68,89	70,00	70,00
S9	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	indeks	75,97	76,42	76,86	77,31	77,77	78,22	78,68	78,68
S10	Meningkatnya penegakan HAM	Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM)	Jumlah	3	3	3	3	3	3	3	15
		Rata-rata Nilai Skor Peduli HAM	nilai	0	0	50	60	65	70	75	75
S11	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	Nilai skor aspek kebebasan sipil	skor	92,15	92,62	93,09	93,56	94,04	94,52	95,00	95
		Nilai skor aspek hak-hak politik	skor	41,13	42,49	43,90	45,35	46,85	48,40	50,00	50
		Nilai skor aspek lembaga demokrasi	skor	53,45	54,49	55,55	56,63	57,73	58,86	60,00	60,00
Misi Ketiga, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan											
T3	Tujuan 3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Pelayanan Publik	Nilai indeks	C-	C-	C-	C	C	B-	B	B
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai indeks	C	C	C	CC	CC	B	B	B
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks	C	C	C	B	B	B	A	A
S12	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	persen	85	88	90	93	95	98	100	100
		Cakupan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan hasil pengelolaan dana Otsus kota	jumlah kabupaten/kota	0	0	5	5	6	6	7	29

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan					Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan	
			Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
S13	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Presentase OPD dengan nilai predikat SAKIP B	predikat	B	B	B	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB
		Predikat yang diperoleh oleh LPPD Provinsi Papua	Indeks	4,88	5,08	5,29	5,50	5,72	5,96	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
		Cakupan <i>database</i> kependudukan skala provinsi (usia +17 tahun memiliki NIK)	persen	74,37	76,04	77,76	79,51	81,30	83,13	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
		Capaian Implementasi e- government terintegrasi (masuk <i>e-planning</i> dll ke program)	persen	80	80	85	85	90	90	90	95	95	95	95
S14	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	Cakupan inovasi pelayanan publik yang masuk dalam List Outstanding (terpuji)	persen	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	5
		Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	persen	46,39	80,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target	persen	-	75,38	30,00	40,00	50,00	70,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
		Rasio belanja langsung dalam komposisi APBD	persen	48,24	36,70	39,04	41,53	44,18	47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		Cakupan ketersediaan data statistik bagi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	persen	-	50,00	53,48	57,20	61,19	65,44	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan		Kondisi Kinerja Awal Perencanaan					Target Kinerja			Kondisi Akhir Perencanaan
		Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
S15	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Opini BPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Ketepatan waktu Penetapan APBD	Kategori	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu
	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	persen	7,81	8,61	9,49	10,46	11,52	12,70	14,00	14,00	14,00	
T4	Tujuan 4: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi DT	persen	4,64	4,96	5,24	5,56	5,91	6,26	6,62	6,62	
	Laju Pertumbuhan Ekonomi TT	persen	5,18	5,52	5,83	6,20	6,53	6,95	7,39	7,39	7,39	
	Rasio Gini	nilai indeks	0,4000	0,40	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,3840	
	Tingkat Emisi Karbon	Ton CO ²	0,392	0,371	0,351	0,332	0,315	0,298	0,282	0,282	0,282	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai indeks	81,47	82,06	82,64	83,21	83,83	84,44	85,03	85,03	85,03	
	Persentase penerapan <i>green economy</i>	persen			50	55	60	65	70	70	70	
	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3,62	2,91	2,70	2,50	2,32	2,16	2,00	2,00	2,00	
	PDRB Perkapita DT	juta rupiah	58,68	59,13	59,58	59,86	60,13	60,58	60,94	60,94	60,94	
	PDRB Perkapita TT	juta rupiah	37,52	39,82	42,19	44,77	47,50	50,50	53,43	53,43	53,43	
	Tingkat Inflasi	persen	2,41	2,41	2,36	2,36	2,34	2,30	2,26	2,26	2,26	

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan					Target Kinerja			Kondisi Akhir Perencanaan	
			Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
S16	Meningkatkan pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Deskripsi										
		Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87,6	88,00	88,39	88,79	89,19	89,60	90,00	90	
		Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	-	-	45	50	55	60	65	70	
		Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	persen	2,27	2,59	2,95	3,37	3,84	4,38	5,00	5,0	
S17	Meningkatkan peran sektor pertanian dalam mengatasi ketimpangan pendapatan	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	persen	0,80	1,09	1,47	2,00	2,71	3,68	5,00	5,0	
		Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	persen	0,82	1,11	1,50	2,02	2,74	3,70	5,00	5,00	
		Rata-rata pendapatan perkapita di wilayah kabupaten sekitar daerah pertambangan	Rp. juta	13,21	14,69	16,34	18,17	20,21	22,48	25,00	25,00	
S18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	Indeks Kualitas Udara	indeks	90,91	91,58	92,25	92,93	93,62	94,31	95,00	95	
		Indeks Kualitas Air	indeks	77,33	77,77	78,21	78,65	79,10	79,55	80,00	80	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	78,18	79,28	80,39	81,52	82,66	83,82	85,00	85	
		Intensitas penurunan emisi	Ton CO ₂ / rupiah	-	-	31.580,25	39.475,31	47.370,37	55.265,43	63.160,49	63.160,49	
S19	Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	Rasio luas kawasan lindung terhadap total luas kawasan hutan	rasio	23,93	24,85	25,80	26,79	27,82	28,89	30,00	30	
		Pertumbuhan PDRB sub-sektor kehutanan	persen	1,29	1,48	1,71	1,97	2,26	2,61	3,00	3	
		Laju Deforestasi	ribu hektar	48,6	43,50	38,94	34,86	31,20	27,93	25,00	25	

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan					Target Kinerja			Kondisi Akhir Perencanaan
			Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
S20	Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal dan berkelanjutan	Kontribusi sektor perdagangan Terhadap PDRB	persen	8,00	8,30	8,62	8,94	9,28	9,63	10,00	10
		Kontribusi sektor Industri Terhadap PDRB	persen	1,94	2,19	2,47	2,79	3,14	3,55	4,00	4
		Jumlah kawasan industri rakyat yang dikembangkan	Jumlah	0	0	1	1	2	2	4	10
		Persentase koperasi aktif dan berkembang	persen	52	53,66	54,88	56,11	57,38	58,68	60,00	60
		Jumlah UMKM yang berkembang	Jumlah	3428	3517	3609	3703	3799	3898	4000	4000
S21	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	ribu orang	900,57	980,50	1067,52	1162,26	1265,42	1377,72	1500,00	1500
		Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2	2,20	2,41	2,65	2,90	3,19	3,50	3,5
		Kontribusi sub Sektor perikanan Terhadap PDRB	persen	4,53	5,33	6,27	7,37	8,67	10,20	12,00	12
		NTP perikanan tangkap	Skor	103,75	103,96	104,17	104,37	104,58	104,79	105,00	105
		NTP perikanan budidaya	Skor	83,27	85,85	88,51	91,25	94,08	96,99	100,00	100
S22	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	Tingkat konsumsi ikan per kapita	kg/kapita/bulan	0,22	0,33	0,49	0,74	1,10	1,65	2,46	2,46
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	76,94	77,44	77,95	78,46	78,97	79,48	80,00	80,00
		Tingkat Kesempatan Kerja	persen	96,01	97,09	97,34	97,59	97,84	98,09	98,34	98,34

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan					Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
			Deskripsi	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
S23	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan Lama hari pengurusan ijin investasi	Rp. juta	52.510.304	54.401.000	56.360.000	58.389.000	60.491.000	62.669.000	64.926.000	64.926.365		
T5	memwujudkan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang pengembangan wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar	Indeks Kemahalan Konstruksi Kepuasan Pelayanan Informasi & Komunikasi	persen	229,82	224,56	219,42	214,39	209,48	204,69	200,00	200,00		
S24	Peningkatan akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang terhubung sarana transportasi jalan Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap Persentase jembatan provinsi dengan beton dalam kondisi baik	persen	55,17	55,17	58,62	65,52	72,41	79,31	93,10	93,10		
S25	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	persen	30	30	32	40	45	50	55	55		
S26	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	Persentase pemanfaatan sumberdaya air Persentase pengendalian daya rusak air	persen	20	20	25	30	35	40	45	45		
		Persentase pemantauan sumberdaya air	persen	60	60	65	65	70	75	80	80		
		Persentase pengendalian daya rusak air	persen	40	40	45	45	50	55	60	60		

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan					Target Kinerja			Kondisi Akhir Perencanaan
			Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
S27	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman dengan air bersih layak	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	33,06	34,12	35,22	36,36	37,54	38,75	40,00	40
		Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	persen	38,47	39,52	40,61	41,72	42,87	44,04	45,25	45,25
S28	Meningkatnya ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan	Backlog perumahan layak huni	ribu rupa	147,88	138,55	129,80	121,61	113,93	106,74	100,00	100,00
		Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan	unit	40,57	41,28	41,99	42,73	43,47	44,23	45,00	45
S29	Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah	Cakupan layanan telekomunikasi	persen	40	45	50	55	60	60	60	
T6	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	persen	5	7,25	7,5	8	10	10	10	
		Cakupan Kampung Kontekstual Papua yang termasuk dalam status kampung berkembang	persen	5,37	6,94	8,97	11,59	14,97	19,35	25,00	25,00
T6	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Tingkat Kemiskinan Wilayah Mee Pago	persen	32,32	31,78	31,25	30,71	30,23	29,72	29,23	29,23
		Tingkat Kemiskinan Wilayah Saireri	persen	30,12	29,80	29,47	29,15	28,81	28,48	28,16	28,16
T6	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Tingkat Kemiskinan Wilayah La Pago	persen	36,30	35,89	35,48	35,04	34,60	34,20	33,80	33,80
		Indeks Williamson Antarwilayah Adat	indeks	0,8316	0,7774	0,7544	0,6907	0,6255	0,6067	0,5640	0,5640
T6	Meningkatkan pemerataan pembangunan	IPM wilayah perbatasan	indeks	63,25	64,02	64,79	65,58	66,38	67,18	68,00	68,00
		Tingkat Kerentanan Sosial	kategori	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah
T6	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0,517	0,508	0,500	0,491	0,483	0,475	0,467	0,467

No	MISI/TUJUAN/SASARAN	Indikator Tujuan	Kondisi Kinerja Awal Perencanaan					Target Kinerja					Kondisi Akhir Perencanaan
			Satuan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
S30	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	Indeks kampung membangun	indeks	41,89	43,43	45,02	46,67	48,38	50,16	52,00	52		
		Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen	30	34,46	39,59	45,47	52,23	60,00	60			
S31	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen	60,00	62,40	64,90	67,49	70,19	73,00	73,00	73,00		
S32	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	tahun	7,48	8,09	8,75	9,47	10,25	11,09	12,00	12		
		Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	tahun	65,08	65,56	66,04	66,53	67,01	67,50	68,00	68		
S33	Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	9,49	10,12	10,80	11,52	12,30	13,12	14,00	14		
		Cakupan warga KAT yang meningkat kesejahteraannya (diberdayakan)	KAT per tahun	-	-	50	50	50	50	50	250		
S34	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang per tahun	-	-	10	20	30	40	50	150		
		Indeks Resiko Bencana (IRB)	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah		
S35	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	492	423	364	313	269	232	200	200		
		Indeks Pemberdayaan Gender	indeks	79,38	79,48	79,59	79,69	79,79	79,90	80,00	80		

BAB II

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan strategi, arah kebijakan dan prioritas program pembangunan daerah Provinsi Papua sesuai dengan amanat visi dan misi daerah serta dinamika isu strategis yang berkembang



Dalam rangka mewujudkan visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang Berkeadilan maka pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara simultan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan sistematis, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan wilayah, memperhatikan dan menghormati nilai-nilai serta hak-hak adat masyarakat asli Papua. Sumberdaya alam Tanah Papua yang berlimpah harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Sumberdaya yang dapat diperbaharui dikelola dengan memperhatikan kelangsungan fungsi-fungsi ekologis sehingga tetap lestari dan produktif, sedangkan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui akan dimanfaatkan dengan memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang.

Sehubungan dengan itu maka untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka memantapkan kualitas dan daya saing SDM dengan masyarakat yang terjamin rasa aman, tentram dan damai disertai dengan kehidupan yang demokratis melalui tata kelola pemerintahan yang baik serta didukung oleh sarana dan prasarana fisik kewilayahan yang mampu membuka akses ekonomi dan menerobos keterisolasian sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat asli Papua maka akan diterapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

2.1 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Grand Strategi pembangunan daerah Provinsi Papua periode tahun 2019-2023 didasarkan pada suatu rangkaian intervensi kebijakan (strategi) yang mengarah pada pencapaian kondisi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera Berkeadilan dengan didukung oleh 5 misi pembangunan, 3 orientasi pembangunan, 4 pendekatan pembangunan, 5 prinsip dasar pembangunan dan 3 nilai dasar pembangunan.

GAMBAR 2.1. GRAND STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023



2.1.1 PRINSIP DAN NILAI DASAR PEMBANGUNAN

Untuk pelaksanaan RPJMD Papua 2019-2023, terdapat 6 (enam) prinsip dasar pembangunan yang menjadi pegangan bagi pelaksanaan pembangunan, yaitu:

1. **Perlindungan (*protection*):** sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, bahwa kebijakan pembangunan Provinsi Papua diarahkan pada perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua.
2. **Keberpihakan (*affirmative*):** afirmatif bagi Orang Asli Papua adalah kebijakan diskriminasi positif yang diambil dengan tujuan agar Orang Asli Papua memperoleh kesempatan mendapatkan layanan yang lebih dengan alasan perbedaan kondisi awal sehingga dapat memperoleh peluang yang setara untuk bersaing dengan kelompok/ golongan lain dalam bidang yang sama.
3. **Pemberdayaan (*empowerment*):** bahwa arah kebijakan pembangunan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Orang Asli Papua dalam segala bidang pembangunan.
4. **Keberlanjutan (*sustainability*):** Pasal 63 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua mengamanatkan bahwa pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
5. **Keterpaduan (*integrated*):** RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023 harus mampu memperkuat sinergi antar bidang, antar ruang dan waktu. Setiap SKPD pelaksana pembangunan di setiap bidang harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai sinergi tersebut melalui proses komunikasi, konsultasi, koordinasi serta pengendalian, monitoring, dan evaluasi dengan pemangku kepentingan terkait di pusat dan daerah dan mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan.
6. **Tata Pemerintahan yang Baik (*good governance*):** pelaksanaan pembangunan wajib mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun nilai-nilai dasar pembangunan lima tahun kedepan adalah:

1. **Kecukupan (*sustenance*):** pembangunan diarahkan agar masyarakat merasa tercukupi semua kebutuhan dasar (*basic need*) seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.
2. **Jati diri (*self esteem*):** pembangunan membentuk motivasi seluruh masyarakat untuk berkeinginan untuk maju atau need achivement, menghargai diri sendiri dan memiliki rasa percaya diri yg tinggi.
3. **Kebebasan (*freedom*):** pembangunan dilaksanakan dengan mendorong nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap HAM sehingga masyarakat bebas dalam bersikap dan berperilaku, rasa takut, perbudakan, kebodohan, kemiskinan, dan stigmasasi.

2.1.2 ORIENTASI PEMBANGUNAN

Orientasi pembangunan adalah pandangan yang menjiwai seluruh arah kebijakan pembangunan selama lima tahun, yaitu:

1. Orientasi Pembangunan Berpusat pada Manusia

Pelaksanaan pembangunan sebesar-besarnya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya Orang Asli Papua. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, menggunakan pendekatan yang sesuai dengan budaya dan adat masyarakat lokal, serta dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan menghormati hak-hak adat masyarakat setempat. Pembangunan yang berpusat pada manusia menjadi prioritas utama pembangunan dalam lima tahun kedepan dan akan difokuskan pada pendidikan yang bermutu dan terjangkau; pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah; kemandirian perekonomian masyarakat; serta ketahanan pangan bagi seluruh wilayah di Provinsi Papua. Pembangunan manusia merupakan indikator utama mengukur akselerasi perkembangan pembangunan periode 2019-2023.

2. Orientasi Pertumbuhan dan Potensi Unggulan

Pertumbuhan ekonomi secara berkualitas dan merata diperlukan, sehingga dampak pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya Orang Asli Papua. Kebijakan pembangunan ekonomi secara esensial tidak semata-mata mengejar pertumbuhan, melainkan dampak dari pertumbuhan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Prinsip pembangunan ekonomi dilakukan melalui: perubahan pola pikir, pengwilayahan komoditas, serta tanam, petik, olah dan jual. **Perubahan pola pikir** dimaksudkan bahwa masyarakat khususnya Orang Asli Papua akan ditingkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola sumber daya lokal yang ada di sekitarnya sehingga dapat bernilai ekonomi dan memenuhi kebutuhan masyarakat. **Pengwilayahan komoditas** diartikan bahwa prioritas pengembangan perekonomian daerah didasarkan pada komoditas unggulan setiap wilayah atau daerah. **Tanam, petik, olah dan jual** dimaksudkan bahwa menyiapkan sistem pemasaran yang terintegrasi dari saat panen, pasca panen dan pemasaran atau penjualan. Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan tahun 2019-2023 merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur perkembangan pembangunan yang terjadi, dan merupakan suatu indikator antara (bukan hasil akhir yang akan dicapai).

3. Orientasi Pemerataan, Keadilan dan Pembangunan Kewilayahan

Penyediaan Infrastruktur wilayah diarahkan pada menghilangkan ketimpangan antar wilayah dengan menerapkan prinsip keadilan pembangunan antar wilayah. Pengembangan wilayah dan penyediaan infrastruktur ditujukan untuk pelayanan kemandirian kampung, dan berdasarkan pada Rencana Tata Ruang. Selanjutnya pembangunan kewilayahan ini akan difokuskan pada beberapa wilayah prioritas berdasarkan 5 (lima) wilayah yaitu 1) La Pago; 2) Mee Pago; 3) Anim Ha; 4) Saereri; dan 5) Mamta. Dalam bidang ekonomi, pemerataan dan keadilan dapat diwujudkan dalam bentuk perbaikan distribusi pendapatan, perbaikan pemerataan pendapatan antar daerah, perbaikan kesenjangan antara kampung, terjadinya proses afirmasi bagi orang asli Papua. Dalam bidang sosial, pemerataan dan keadilan berupa perbaikan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebebasan berpolitik, serta pemerataan antara laki-laki dan perempuan.

2.1.3 PENDEKATAN PEMBANGUNAN

Pendekatan pembangunan daerah merupakan suatu rangkaian bauran kebijakan yang mengefektifkan potensi-potensi yang dimiliki daerah di berbagai sektor sehingga akan memberi pengaruh terhadap percepatan pencapaian visi pembangunan daerah. 4 (empat) pendekatan pembangunan yang akan diintensifkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Papua tahun 2019-2023 adalah;

1. Inovasi artinya pelaksanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada proses dan hasil pengembangan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan keterampilan (termasuk keterampilan teknologis) dan pengalaman untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sehingga akan menambah nilai bagi penciptaan kepuasan bagi masyarakat Papua secara umum;
2. Kolaborasi artinya pembangunan daerah harus melibatkan partisipasi yang luas dari seluruh potensi yang dimiliki daerah, baik dari perspektif kelompok adat, agama, pemerintah, swasta, universitas dan mitra pembangunan lainnya. Pada akhirnya kolaborasi akan memperkuat *sense of belonging* dari semua pihak dan memberi nilai bagi keberlanjutan pembangunan daerah;
3. Afiriasi artinya pembangunan daerah harus memiliki keberpihakan terhadap potensi-potensi pembangunan daerah yang memerlukan perhatian lebih yang ini juga sejalan dengan prinsip pelaksanaan otonomi khusus Papua;
4. Desentralisasi artinya pembangunan daerah mengelola kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing komponen pemerintahan sehingga mendorong terjadinya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

GAMBAR 2.2 PENDEKATAN PEMBANGUNAN DAERAH



2.1.4 STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholders* pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran- sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan.

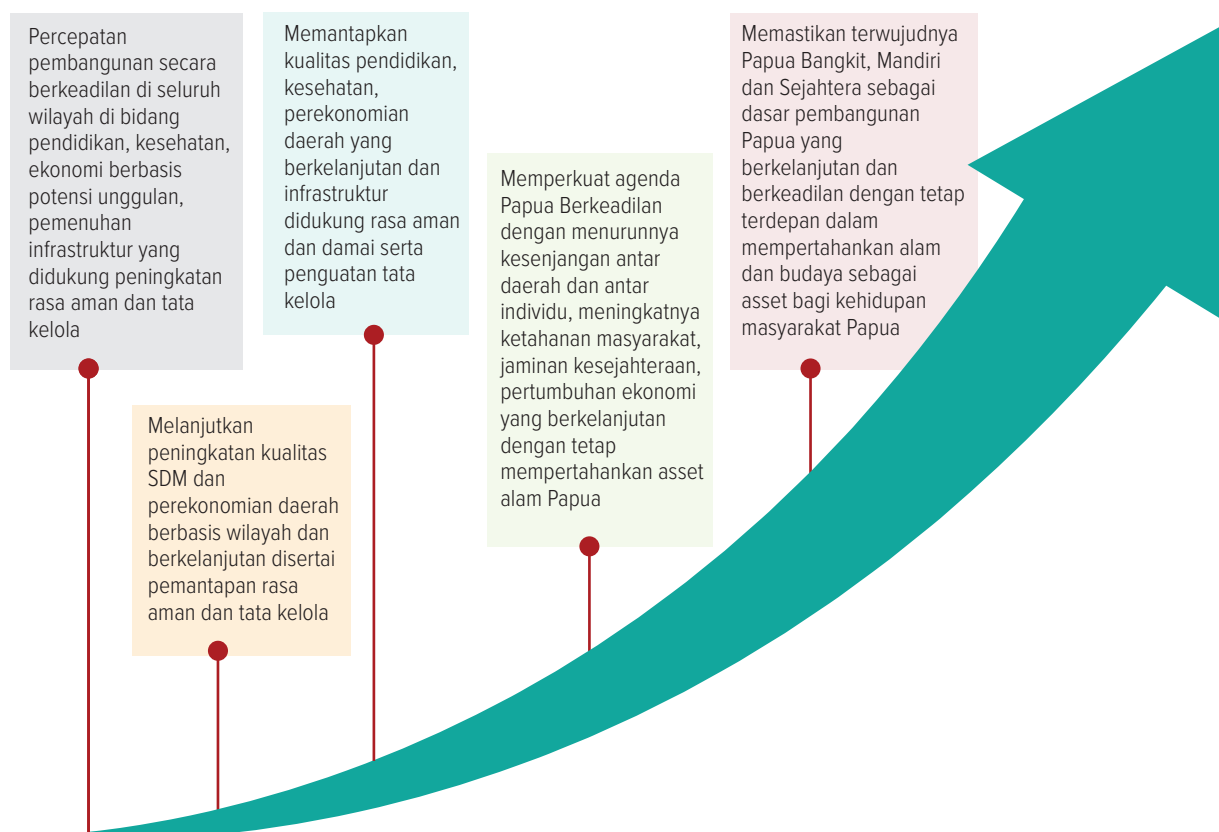
2.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan pembangunan Provinsi Papua tahun 2019-2023 terdiri dari Arah Kebijakan Umum Pembangunan yang mencakup bidang-bidang pembangunan dan Arah Pembangunan Kewilayahan. Tahapan pelaksanaan pembangunan akan menjelaskan arah kebijakan pembangunan daerah berdasarkan fokus prioritas dan waktu pelaksanaan, sedangkan Arah pembangunan kewilayahan akan menjelaskan arah dan strategi pembangunan kewilayahan berbasis 5 (lima) wilayah yaitu La Pago, Mee Pago, Anim Ha, Saereri, dan Mamta.

2.2.1 ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN

Arah kebijakan Provinsi Papua merupakan fokus pembangunan setiap tahun selama lima tahun. Pentahapan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus dalam setiap tahun selama lima tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (lihat Gambar 2.3).

GAMBAR 2.3. FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023



Fokus pembangunan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun, akan menjadi pedoman dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan tema akan disesuaikan dengan kondisi dan isu strategis daerah serta tema pembangunan Nasional.

Berdasarkan fokus pembangunan tiap tahunnya disusunlah arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan tahunan pembangunan Provinsi Papua dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

TABEL 2.1. MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2019	2020	2021	2022	2023	
Misi Pertama, Memantapkan Kualitas dan Daya Saing SDM								
Meningkatkan Kualitas SDM yang berdaya saing	S1 Meningkatkan Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1 Peningkatan kemitraan lembaga pendidikan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya. 2 Pengembangan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal Papua 3 Penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui pengembangan IPTEK di PTN/PTS 4 Akselelasi dan afirmasi pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua 5 Peningkatan pendidikan kecakapan hidup, yang dilakukan melalui pelatihan-pelatihan keterampilan. 6 Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan 7 Perlindungan sosial untuk menjamin generasi emas papua. 8 Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dengan biaya gratis bagi masyarakat Papua 9 Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP serta Rumah Guru sesuai dengan kondisi lokal khas Papua (SD kecil dan pendidikan berpola asrama). 10 Peningkatan akses pendidikan melalui guru kunjung, terutama di daerah terpencil. 11 Peningkatan profesionalisme dan tunjangan guru untuk daerah tertinggal dan terluar. 12 Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, dan tunjangan guru 13 Peningkatan akses dan kualitas pendidikan berbasis e-learning	✓	✓	✓	✓	✓	
S2 Meningkatkan budaya baca pada masyarakat		1 Peningkatan budaya baca masyarakat 2 Perluasan dan peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dan pengarsipan 3 Peningkatan layanan perpustakaan keliling	✓	✓	✓	✓	✓	✓
S3 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		1 Meningkatkan kesehatan ibu, bayi dan balita serta peningkatan dan pemenuhan Gizi masyarakat 2 Peningkatan Pelayanan kesehatan bagi penduduk berdampak bencana dan kejadian luar biasa	✓	✓	✓	✓	✓	✓

3	Memperkuat dan memantapkan pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi lokal Papua melalui pelayanan kesehatan pro aktif/bergerak (Pelayanan kesehatan Kaki Telanjang), puskesmas keliling, flying health care, puskesmas apung termasuk penyiapan mobile medical service, dan telemedicine	✓	✓	✓	✓	✓
4	Menyempurnakan dan memantapkan pelaksanaan program jaminan kesehatan Papua (KPS) baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran.	✓	✓	✓	✓	✓
5	Peningkatan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.	✓	✓	✓	✓	✓
6	Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita serta peningkatan dan pemenuhan Gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan Generasi Emas Papua.	✓	✓	✓	✓	✓
7	Pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC.	✓	✓	✓	✓	✓
8	Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua Puskesmas dan jaringannya, dengan diprioritaskan pada peningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan.	✓	✓	✓	✓	✓
9	Penyempurnaan sistem insentif dan penempatan SDM kesehatan sesuai dengan tingkat kesulitan, peningkatan kompetensi SDM kesehatan serta adanya jaminan keamanan bagi seluruh tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.	✓	✓	✓	✓	✓
10	Pembangunan dan Pengembangan Rumah Sakit rujukan di 5 wilayah adat.	✓	✓	✓	✓	✓
11	Peningkatan dan pembenahan jumlah puskesmas dan jaringannya serta pengembangan puskesmas rawat inap, yang didukung fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan aksesibilitas relatif rendah	✓	✓	✓	✓	✓
12	Mendorong penyelenggaraan pelayanan dan fasilitas kesehatan dengan pola BLUD	✓	✓	✓	✓	✓
13	Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan	✓	✓	✓	✓	✓
14	Ketersediaan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah	✓	✓	✓	✓	✓
S4	Sukses pelaksanaan PON dan prestasi olahraga	✓	✓	✓	✓	✓
1	Pemantapan persiapan pelaksanaan PON Papua XX Papua	✓	✓	✓	✓	✓
2	Penguatan seleksi dan pembinaan bibit muda atlet olahraga berprestasi daerah	✓	✓	✓	✓	✓
3	Meningkatkan prestasi melalui kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan, terutama sukses prestasi PON XX tahun 2020 dan pengembangan industri olah raga Indonesia	✓	✓	✓	✓	✓
4	Menyiapkan infrastruktur dan sarana pendukung utama kegiatan PON	✓	✓	✓	✓	✓
5	Menyiapkan promosi dan pengembangan ekonomi berbasis keunggulan komoditas masing-masing wilayah	✓	✓	✓	✓	✓

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2019	2020	2021	2022	2023	
S5	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	1	Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah terutama dalam bidang kewirausahaan	✓	✓	✓	✓	✓
		2	Menumbuhkan talenta-talenta kewirausahaan di kalangan pemuda	✓	✓	✓	✓	✓
		3	Meningkatkan aktualisasi seni dan budaya pemuda	✓	✓	✓	✓	✓
		4	Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan pemuda	✓	✓	✓	✓	✓
		5	Percepatan peningkatan kapasitas SDM pemuda OAP	✓	✓	✓	✓	✓
		6	Meningkatkan prestasi melalui kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan dan pengembangan industri olah raga Indonesia	✓	✓	✓	✓	✓
S6	Meningkatkan ketersediaan pangan yang berkelanjutan	1	Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur pertanian yang menghubungkan produksi pangan dan tujuan pasar	✓	✓	✓	✓	✓
		2	Perbaikan sistem distribusi dan logistik termasuk per gudangan secara terintegrasi dengan memperhatikan supply chain, agar mampu mengurangi gejolak harga dan pasokan secara musiman pada komoditas pangan utama.	✓	✓	✓	✓	✓
		3	Penguatan petani dan menjaga daya beli serta nilai tukar petani dengan menjaga stabilitas harga-harga komoditas yang dapat memberikan keuntungan pada petani.	✓	✓	✓	✓	✓
		4	Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian dengan diberikan insentif dalam pengembangannya.	✓	✓	✓	✓	✓
		5	Penelitian dan pengembangan bibit unggul, dan penyuluhan untuk penggunaan secara tepat dan akurat dengan resiko yang dapat di jaga.	✓	✓	✓	✓	✓
		6	Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)	✓	✓	✓	✓	✓
S7	Terwujudnya internalisasi nilai adat dan budaya asli Papua dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat	1	Meningkatkan pembinaan mental dan spritual masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
		2	Pembinaan kelembagaan umat beragama	✓	✓	✓	✓	✓
		3	Memfasilitasi peran serta masyarakat dalam aktivitas keagamaan melalui bantuan kepada lembaga agama dan yayasan pengelola pendidikan keagamaan	✓	✓	✓	✓	✓
		4	Peningkatan apresiasi terhadap adat dan budaya dalam berbagai bidang kehidupan	✓	✓	✓	✓	✓
		5	Penguatan pemberdayaan lembaga adat dan budaya	✓	✓	✓	✓	✓

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2019	2020	2021	2022	2023
Misi Kedua, Memantapkan Rasa Aman, Tentram dan Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI							
Meningkatkan keamanan, ketertarikan dan ketertiban yang berbasis pada kohesivitas sosial dan harmonisasi keberagaman potensi kehidupan masyarakat Papua	S8 Meningkatkan suasana tertib, aman dan kepastian hukum	1	Mendorong komunikasi yang intensif antara penegak hukum, masyarakat dan pemerintah daerah	✓	✓	✓	✓
		2	Menumbuhkembangkan ketertarikan dan ketertiban umum	✓	✓	✓	✓
		3	Meningkatkan keamanan dan ketertiban swakarsa	✓	✓	✓	✓
	S9 Meningkatkan Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	1	mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar umat beragama, etnik dan kelompok sosial	✓	✓	✓	✓
		2	Meningkatkan penciptaan lingkungan kondusif bagi kehidupan umat beragama	✓	✓	✓	✓
		3	Memperkuat kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan saling menghargai, rasa percaya dan harmonisasi antar kelompok	✓	✓	✓	✓
		4	Fasilitasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama	✓	✓	✓	✓
		5	Memperkuat peran adat dan lembaga keagamaan dalam kemitraan pemerintahan dan pembangunan	✓	✓	✓	✓
	S10 Meningkatkan penegakan HAM	1	Memperkuat kemitraan dan kolaborasi efektif dengan lembaga-lembaga penegak hukum dalam penerapan dan penegakan hukum dan HAM	✓	✓	✓	✓
		2	Meningkatkan fasilitasi berbagai lembaga pada kasus kasus pelanggaran HAM	✓	✓	✓	✓
		3	Peningkatan kesadaran masyarakat pada HAM	✓	✓	✓	✓
	S11 Meningkatkan Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	1	Meningkatkan lingkungan kondusif bagi kehidupan demokrasi lokal	✓	✓	✓	✓
		2	Memperkuat lembaga-lembaga demokrasi daerah serta peningkatan pendidikan politik masyarakat	✓	✓	✓	✓
		3	Menciptakan dan melembagakan komunikasi politik sehingga kepentingan Orang Asli Papua dapat diartikulasikan dan diintegrasikan dalam pembuatan/pengambilan keputusan publik	✓	✓	✓	✓
		4	Memperkuat peran lembaga adat dan lembaga keagamaan dalam kemitraan pemerintahan dan pembangunan	✓	✓	✓	✓

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan							
			2019	2020	2021	2022	2023			
Misi Ketiga, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan										
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	S12 Meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	1	Mempertahankan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan Otonomi khusus Papua	✓	✓	✓	✓	✓		
		2	Pemantapan sistem pengalokasian dana otonomi khusus yang efisien, efektif dan berkeadilan	✓	✓	✓	✓	✓		
		3	Penguatan implementasi sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi serta transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi khusus Provinsi Papua	✓	✓	✓	✓	✓		
		4	Pengembangan instrumen kebijakan afirmatif bagi OAP dalam penyelenggaraan otonomi khusus	✓	✓	✓	✓	✓		
		5	Penguatan kelembagaan dan rambu-rambu hukum otonomi khusus Provinsi Papua	✓	✓	✓	✓	✓		
		6	Mendata dan menjamin OAP memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil	✓	✓	✓	✓	✓		
		7	Melakukan perbaikan kebijakan pembagian dana Otsus ke Kabupaten/kota untuk mengurangi kesenjangan dan memberi insentif jasa lingkungan.	✓	✓	✓	✓	✓		
		8	Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan	✓	✓	✓	✓	✓		
		Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	S13	1	Meneruskan reformasi birokrasi secara bertahap, terukur dan terus dijaga kualitas hasil kerjanya serta pertanggungjawaban publik	✓	✓	✓	✓	✓
				2	Meningkatkan kordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum	✓	✓	✓	✓	✓
3	Mengoptimalkan Sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta peran Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat di Daerah			✓	✓	✓	✓	✓		
4	Meningkatkan kinerja kelembagaan dengan memperbaiki prosedur kerja (business process)			✓	✓	✓	✓	✓		
5	Meningkatkan sistem monitoring, pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah			✓	✓	✓	✓	✓		
6	Meningkatkan tata hukum dan kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan daerah			✓	✓	✓	✓	✓		
7	Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan pemerintah daerah			✓	✓	✓	✓	✓		
8	Meningkatkan upaya fasilitasi penyelesaian tapal batas antar wilayah kabupaten			✓	✓	✓	✓	✓		
9	Meningkatkan fasilitasi pengembangan potensi ekonomi daerah			✓	✓	✓	✓	✓		
10	Meningkatkan pengembangan sistem pencegahan korupsi			✓	✓	✓	✓	✓		

Tujuan	Sasaran	Strategi					Arah Kebijakan					
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
		11	Meningkatkan komunikasi dan transparansi informasi kebijakan pemerintahan daerah								✓	✓
		12	Meningkatkan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis online dan transparan								✓	✓
		13	Menciptakan fungsi lembaga perwakilan rakyat DPRD dan MRP dalam menjalankan amanah rakyat								✓	✓
		14	Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan								✓	
		15	Mengutamakan inovasi dalam pelayanan publik bersifat lintas sektor								✓	✓
		16	Memperbaiki prosedur kerja dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan								✓	✓
		17	Penguatan kapasitas kelembagaan kampung dalam meningkatkan efektivitas dan Alokasi Dana Kampung								✓	✓
		18	Menata struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan								✓	✓
		19	Memastikan seluruh penduduk Papua, terutama OAP terdata secara terpilah dan memiliki identitas kependudukan								✓	✓
S14	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang terintegratif secara sektoral dan spasial								✓	✓
		2	Memperkuat Perencanaan Pembangunan berbasis Data/Bukti (evidence baseplanning) serta penguatan pengendalian pelaksanaan pembangunan								✓	✓
		3	Membuka ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat untuk berperan dalam pembangunan daerah								✓	✓
		4	Memperkuat integrasi perencanaan pembangunan dengan perencanaan tata guna lahan, kewilayahan serta sektor sehingga prioritas pembangunan dapat terarah, terukur dengan jelas, dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan								✓	✓
		5	Peningkatan pembiayaan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemenuhan infrastruktur								✓	✓
		6	Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan								✓	✓
S15	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	1	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkuatan kapabilitas APUP dan perkuatan SPIP								✓	✓
		2	Meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas penyusunan APBD								✓	✓

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2019	2020	2021	2022	2023	
		13	Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)	✓	✓	✓	✓	✓
		14	Mengembangkan jaringan dan informasi pasar lokal untuk komoditas unggulan pertanian/perkebunan/peternakan di tiap wilayah				✓	✓
		15	Peningkatan agroindustri lokal yang mampu mendorong perkembangan kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah.	✓	✓	✓	✓	✓
		16	Perbaikan iklim Investasi dan usaha dengan pemihakan kepada sektor UMKM agribisnis sebagai tiang penyerap tenaga kerja terutama OAP.	✓	✓	✓	✓	✓
		17	Pengembangan industri pertanian/perkebunan/peternakan padat karya	✓	✓	✓	✓	✓
S17	Mengoptimalkan peranan sektor pertanian dalam mengatasi ketimpangan pendapatan	1	Pengembangan industri pertanian yang berkelanjutan	✓	✓	✓	✓	✓
		2	Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian	✓	✓	✓	✓	✓
		3	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian	✓	✓	✓	✓	✓
		4	Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas	✓	✓	✓	✓	✓
		5	Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan	✓	✓	✓	✓	✓
			6	Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)	✓	✓	✓	✓
S18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	1	Meningkatkan pencegahan pencemaran dan perusahaan lingkungan serta mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan	✓	✓	✓	✓	✓
		2	Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK)	✓	✓	✓	✓	✓
		3	Revitalisasi pembangunan rendah karbon	✓	✓	✓	✓	✓
		4	Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	✓	✓	✓	✓	✓
		5	Konservasi sungai dan danau	✓	✓	✓	✓	✓
		6	Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas	✓	✓	✓	✓	✓
S19	Meningkatnya pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan	1	Meningkatkan pengelolaan sumber daya kehutanan secara berkelanjutan melalui pelibatan masyarakat sekitar hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan	✓	✓	✓	✓	✓
		2	Optimalisasi konservasi sumberdaya alam hayati	✓	✓	✓	✓	✓
		3	Restorasi pembangunan lahan gambut yang berkelanjutan	✓	✓	✓	✓	✓

Tujuan	Sasaran	Strategi					Arah Kebijakan					
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
S22	Meningkatnya daya saing tenaga kerja, kesempatan dan perluasan kesempatan kerja	1	Peningkatan daya saing tenaga kerja disertai dengan perluasan kesempatan kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		2	Peningkatan fasilitas Penyelesaian konflik industrial				✓	✓	✓	✓	✓	
		3	Perbaikan iklim Investasi dan usaha serta pemihakan kepada perbaikan kesempatan berusaha kepada sektor usaha kecil menengah sebagai tiang penyerap tenaga kerja terintegrasi dengan kebijakan bidang urusan lainnya								✓	✓
		4	Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensistunggalan				✓	✓	✓	✓	✓	✓
S23	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	1	Peningkatan daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor unggulan daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2	Pembangunan dan pengembangan sentra ekonomi berbasis wilayah adat				✓	✓	✓	✓	✓	
		3	Penyederhanaan perizinan berbasis Online Single Submission (OSS)				✓	✓	✓	✓	✓	
		4	Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas				✓	✓	✓	✓	✓	
S24	Mewujudkan percepatan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah guna menopang pengembangan wilayah serta akses pada layanan dasar dan pasar	1	Meningkatkan akses transportasi antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh masyarakat di wilayah Papua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		2	Memantapkan hubungan antar wilayah/ daerah/ kampung dengan penyediaan infrastruktur transportasi dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar wilayah / daerah yang kokoh serta berkesinambungan				✓	✓	✓	✓	✓	
		3	Menyapkan Sarana dan Prasarana Ekonomi Berbasis Keunggulan Masing-masing Wilayah				✓	✓	✓	✓	✓	
		4	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pembangunan dengan RTRW Provinsi				✓	✓	✓	✓	✓	
S25	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	1	Pengendalian pemanfaatan ruang				✓	✓	✓	✓	✓	
		2	Sosialisasi rencana tata ruang dan penegakan hukum serta konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan				✓	✓	✓	✓	✓	
		3	Peningkatan pembinaan penataan ruang dan pertanahan				✓	✓	✓	✓	✓	
		4	Peningkatan kapasitas penegakan hukum terhadap rencana tata ruang				✓	✓	✓	✓	✓	
		5	Penataan guna lahan permukiman di perkotaan				✓	✓	✓	✓	✓	
S26	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	1	Meningkatkan kapasitas daya tampung jaringan irigasi dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat				✓	✓	✓	✓		
		2	Penyediaan dan pengelolaan air baku				✓	✓	✓	✓	✓	
		3	Pengendalian banjir dan abrasi pantai				✓	✓	✓	✓	✓	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2019	2020	2021	2022	2023
S27 Meningkatkan Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	1 Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat	1 Meningkatkan ketersediaan energi (listrik / penerangan)	✓	✓	✓	✓	✓
			2 Ketersediaan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah	✓	✓	✓	✓
	S28 Meningkatkan ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan	1 Peningkatan ketersediaan energi (listrik / penerangan)	✓	✓	✓	✓	✓
		2 Peningkatan energi alternatif				✓	✓
	S29 Meningkatkan jangkauan pelayanan sistem komunikasi & Informasi antar wilayah	1 Peningkatan akses informasi dan komunikasi di seluruh wilayah	✓	✓	✓	✓	✓
		2 Mengembangkan sarana dan prasarana telekomunikasi			✓	✓	✓
Misi Kelima, Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Tertentu							
Meningkatkan pemerataan pembangunan	S30 Meningkatkan kualitas pembangunan berbasis kampung	1 Fasilitas penataan kelembagaan kampung, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	✓	✓	✓	✓	✓
		2 Penguatan dan pendampingan tata kelola pemerintahan kampung serta memperkuat peran distrik dalam pembangunan kampung dan pelayanan kepada masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
		3 Melakukan perbaikan kebijakan pembagian dana Otisus ke Kabupaten/kota untuk mengurangi kesenjangan.	✓	✓			
		4 Percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terluar dan tertentu.	✓	✓	✓	✓	✓
		5 Mengurangi kesenjangan jender dengan meningkatkan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan.		✓	✓	✓	✓
		6 Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)		✓	✓	✓	✓
		7 Penguatan kapasitas kelembagaan kampung dalam meningkatkan efektivitas dan Alokasi Dana Kampung	✓	✓	✓	✓	✓
S31 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	1 Meningkatkan akses masyarakat di wilayah pegunungan terhadap infrastruktur pelayanan dasar dan perekonomian	1 Peningkatan akses masyarakat di wilayah pegunungan terhadap infrastruktur pelayanan dasar dan perekonomian	✓	✓	✓	✓	✓
		2 Pemenuhan rumah layak huni untuk OAP		✓	✓	✓	✓
		3 Akselerasi dan afirmasi pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua	✓	✓	✓	✓	✓
		4 Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)		✓	✓	✓	✓
		5 Perlindungan sosial untuk generasi emas, lanjut usia, dan difabel	✓	✓	✓	✓	✓

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan					
			2019	2020	2021	2022	2023	
S32	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	1	Optimalisasi kerjasama perbatasan dengan negara tetangga	✓	✓	✓	✓	✓
		2	Percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terluar dan tertentu.	✓	✓	✓	✓	✓
S33	Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS	1	Revitalisasi dan optimalisasi kelembagaan penanggulangan kemiskinan daerah dan SDM yang menangani kesejahteraan sosial	✓	✓	✓	✓	✓
		2	Perluasan aksesibilitas penanganan kesejahteraan sosial yang terpadu dan komprehensif ke arah pemberdayaan masyarakat berketahanan sosial	✓	✓	✓	✓	✓
		3	Meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan permasalahan kesejahteraan sosial melalui peran koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua	✓	✓	✓	✓	✓
		4	Perlindungan sosial untuk generasi emas, lanjut usia, dan difabel	✓	✓	✓	✓	✓
S34	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	1	Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	✓	✓	✓	✓	✓
		2	Pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal dalam mengantisipasi kebencanaan	✓	✓	✓	✓	✓
		3	Pengembangan data dan peta risiko rawan bencana alam di tingkat provinsi	✓	✓	✓	✓	✓
		4	Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan daerah	✓	✓	✓	✓	✓
		5	Fasilitasi rencana kontijensi pada kabupaten/kota yang berisiko tinggi terhadap bencana	✓	✓	✓	✓	✓
S35	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	1	Meningkatkan terwujudnya sinkronisasi kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui peran koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dari Pemerintah Provinsi Papua	✓	✓	✓	✓	✓
		2	Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah	✓	✓	✓	✓	✓
		3	Mengurangi kesenjangan jender dengan meningkatkan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan jender dalam strategi pembangunan	✓	✓	✓	✓	✓
		4	Meningkatkan perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak	✓	✓	✓	✓	✓

2.2.2 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

2.2.2.1 KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH

Pengembangan wilayah Papua merupakan hal fundamental dalam mengoptimalkan sumber daya daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan sesuai dengan karakteristik wilayah Adat Papua. **Dalam 5 (lima) tahun mendatang, arah kebijakan utama pembangunan wilayah Papua difokuskan pada akselerasi pembangunan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang inklusif.**

GAMBAR 2.4. ILUSTRASI KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI PAPUA



Kerangka pengembangan wilayah Papua untuk mempercepat pembangunan dan pengurangan kesenjangan wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pusat pertumbuhan sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*) dengan menggali potensi dan keunggulan daerah di setiap wilayah adat. Dalam hal ini diperlukan pengembangan industri pengolahan produk pertanian, perkebunan, perikanan, dan/atau peternakan di wilayah penyangga (*hinterland*) yang diiringi pengembangan lokasi pemasaran, dan peningkatan skill OAP agar aktif terlibat dalam pengembangan sektor unggulan tersebut.

2. Percepatan pembangunan ekonomi berkelanjutan berbasis sumber daya lokal melalui peningkatan kemandirian kampung atau perkampungan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pembentukan klaster komoditas lokal yang diiringi pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan organisasi produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan/atau perikanan. Budidaya dan nilai tambah lahan komunal dikembangkan dalam mendorong ketahanan pangan, kegiatan ekonomi, yang didukung efisiensi perdagangan lokal, pengembangan keterampilan, serta peningkatan kemampuan kerjasama pemanfaatan lahan komunal dengan pihak luar secara berkelanjutan.
3. Peningkatan kesejahteraan di kawasan perbatasan melalui penguatan kegiatan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan, serta peningkatan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur di kawasan PKSN, PLBN, dan lokasi prioritas. Dalam hal ini diperlukan pengintegrasian fungsi PLBN, PKSN, dengan lokasi prioritas, yang didukung penguatan distrik sebagai ujung tombak koordinasi pembangunan lokasi prioritas.
4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, pendidikan, dan kesehatan, terutama untuk daerah pinggiran. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan tersebut dilakukan dengan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan dengan insentif dan disinsentif, memastikan keberadaan sekolah kecil di kampung dan sekolah berasrama, serta pengembangan kurikulum lokal berbasis budaya dan kearifan lokal.
5. Pengurangan ketimpangan antar wilayah melalui pemerataan kesempatan ekonomi, pemerataan infrastruktur dasar, dan konsistensi penerapan penataan ruang.
6. Peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
7. Pengelolaan urbanisasi dengan memastikan perencanaan dan penerapan tata guna lahan berkelanjutan, yang disertai pencegahan konflik horizontal, pengendalian kerusakan lingkungan, serta penyediaan rumah layak dan infrastruktur dasar di kawasan perkotaan.

Dalam pengembangan wilayah Provinsi Papua tersebut, terdapat target keberhasilan per wilayah adat yang merupakan hasil berbagai program dan kegiatan 5 (lima) tahun ke depan, sebagaimana yang ditampilkan pada tabel berikut:

TABEL 2.2. TARGET KEWILAYAHAN

Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja awal Perencanaan					Tahun		Target RPJMD	Target Wilayah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
ANIM HA										
IPM	Indeks	58.59	59.33	60.47-65.47	60.95-65.95	62.46-67.46	63.67-68.67	64.21-69.21	65.47	64.21-69.21
Pertumbuhan ekonomi (dengan tambang)	%	6.61	n/a*	7.08-9.98	7.18-9.98	7.28-9.98	7.38-9.98	7.48-9.98	6.62	7.48-9.98
Pertumbuhan ekonomi (tanpa tambang)	%	6.60	n/a*	6.83-8.00	6.93-8.00	7.03-8.00	7.13-8.00	7.23-8.00	7.39	7.23-8.00
Pendapatan per kapita (dengan tambang)	Juta Rp	29.85	n/a*	32.49-35.49	34.15-37.15	35.73-38.73	37.85-40.85	42.57-45.57	60.94	42.57-45.57
Pendapatan per kapita (tanpa tambang)	Juta Rp	29.51	n/a*	32.13-37.13	33.76-38.76	37.33-42.33	42.43-47.43	45.11-50.11	53.43	45.11-50.11
Tingkat pengangguran terbuka	%	3.76	n/a*	2.70-2.50	2.26-2.06	2.06-1.86	1.84-1.64	1.45-1.25	2.00	1.45-1.25
Persentase penduduk miskin	%	20.91	n/a*	20.19-18.19	19.69-17.69	19.42-17.42	18.97-16.97	18.70-16.70	23.98	18.70-16.70
LA PAGO										
IPM	Indeks	44.88	45.79	49.28-54.28	50.85-55.85	51.21-56.21	52.37-57.37	53.28-58.28	65.47	53.28-58.28
Pertumbuhan ekonomi (dengan tambang)	%	5.65	n/a*	6.21-8.51	6.46-8.51	6.71-8.51	6.96-8.51	7.21-8.51	6.62	7.21-8.51
Pertumbuhan ekonomi (tanpa tambang)	%	5.65	n/a*	6.09-7.00	6.34-7.00	6.59-7.00	6.84-7.00	7.09-7.00	7.39	7.09-7.00
Pendapatan per kapita (dengan tambang)	Juta Rp	10.50	n/a*	11.33-14.83	11.87-15.37	12.38-15.88	13.06-16.56	16.94-20.44	60.94	16.94-20.44
Pendapatan per kapita (tanpa tambang)	Juta Rp	10.40	n/a*	13.22-20.22	13.75-20.75	15.26-22.26	17.94-24.94	23.80-30.80	53.43	23.80-30.80
Tingkat pengangguran terbuka	%	1.14	n/a*	1.07-0.87	1.14-0.94	0.99-0.79	0.63-0.43	0.55-0.35	2.00	0.55-0.35
Persentase penduduk miskin	%	36.30	n/a*	35.37-25.37	34.82-24.82	34.34-24.34	33.83-23.83	33.28-23.28	23.98	33.28-23.28
MEE PAGO										
IPM	Indeks	57.21	57.87	61.15-66.15	62.27-67.27	63.33-68.33	64.01-69.01	65.03-70.03	65.47	65.03-70.03
Pertumbuhan ekonomi (dengan tambang)	%	3.32	n/a*	4.42-6.67	6.46-6.67	6.71-6.67	6.96-6.67	5.42-6.67	6.62	5.42-6.67
Pertumbuhan ekonomi (tanpa tambang)	%	5.90	n/a*	6.34-7.00	6.59-7.00	6.84-7.00	7.09-7.00	7.34-7.00	7.39	7.34-7.00
Pendapatan per kapita (dengan tambang)	Juta Rp	69.47	n/a*	75.50-78.00	79.15-81.65	82.60-85.10	87.19-89.69	94.01-96.51	60.94	94.01-96.51

Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja awal Perencanaan					Tahun			Target RPJMD	Target Wilayah
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Pendapatan per kapita (tanpa tambang)	Juta Rp	20.13	n/a*	22.81-27.81	23.98-28.98	26.75-31.75	30.11-35.11	37.03-42.03	53.43	37.03-42.03	
Tingkat pengangguran terbuka	%	2.90	n/a*	2.25-2.05	2.00-1.80	1.83-1.63	1.55-1.35	1.30-1.10	2.00	1.30-1.10	
Persentase penduduk miskin	%	32.32	n/a*	31.28-21.28	30.90-20.90	30.49-20.49	30.10-20.10	29.49-19.49	23.98	29.49-19.49	
SAERERI											
IPM	Indeks	65.74	66.40	67.08-72.08	68.75-73.75	69.11-74.11	70.16-75.16	71.04-76.04	65.47	71.04-76.04	
Pertumbuhan ekonomi (dengan tambang)	%	0.96	n/a*	5.32-7.35	6.46-7.35	6.71-7.35	6.96-7.35	6.32-7.35	6.62	6.32-7.35	
Pertumbuhan ekonomi (tanpa tambang)	%	0.97	n/a*	1.97-5.00	2.22-5.00	2.47-5.00	2.97-5.00	3.47-5.00	7.39	3.47-5.00	
Pendapatan per kapita (dengan tambang)	Juta Rp	33.21	n/a*	35.74-39.24	37.28-40.78	38.74-42.24	40.72-44.22	46.26-49.76	60.94	46.26-49.76	
Pendapatan per kapita (tanpa tambang)	Juta Rp	33.00	n/a*	36.52-41.52	38.05-43.05	41.49-46.49	45.46-50.46	52.97-57.97	53.43	52.97-57.97	
Tingkat pengangguran terbuka	%	5.30	n/a*	4.06-2.56	4.11-2.61	3.94-2.44	3.92-2.42	3.73-2.23	2.00	3.73-2.23	
Persentase penduduk miskin	%	30.12	n/a*	28.89-21.89	28.47-21.47	27.72-20.72	26.99-19.99	26.49-19.49	23.98	26.49-19.49	
MAMTA											
IPM	Indeks	65.55	66.16	67.87-72.87	68.35-73.35	69.49-74.49	70.69-75.69	71.50-76.50	65.47	71.50-76.50	
Pertumbuhan ekonomi (dengan tambang)	%	6.27	n/a*	6.71-9.37	6.81-9.37	6.91-9.37	7.01-9.37	7.11-9.37	6.62	7.11-9.37	
Pertumbuhan ekonomi (tanpa tambang)	%	6.29	n/a*	6.59-8.00	6.69-8.00	6.79-8.00	6.89-8.00	6.99-8.00	7.39	6.99-8.00	
Pendapatan per kapita (dengan tambang)	Juta Rp	46.74	n/a*	51.06-54.06	53.76-56.76	56.33-59.33	59.75-62.75	66.11-69.11	60.94	66.11-69.11	
Pendapatan per kapita (tanpa tambang)	Juta Rp	50.39	n/a*	55.43-59.43	58.61-62.61	61.65-65.65	65.65-69.65	70.79-74.79	53.43	70.79-74.79	
Tingkat pengangguran terbuka	%	8.93	n/a*	6.88-4.88	6.93-4.93	6.45-4.45	6.02-4.02	5.84-3.84	2.00	5.84-3.84	
Persentase penduduk miskin	%	16.96	n/a*	16.12-14.12	15.68-13.68	15.14-13.14	14.70-12.70	14.27-12.27	23.98	14.27-12.27	

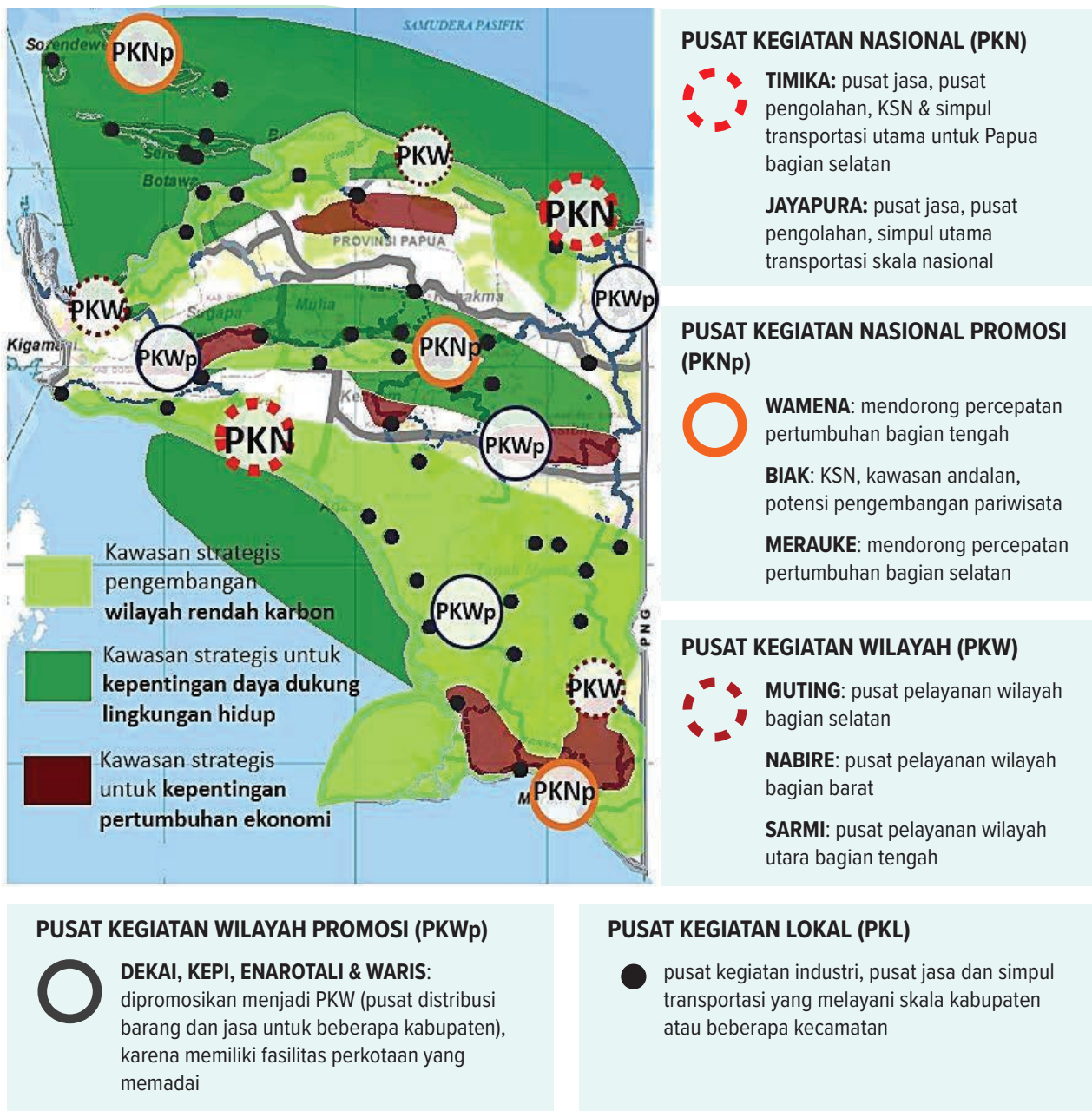
Keterangan:

n/a* = Data belum tersedia (Publikasi resmi BPS "Provinsi Papua Dalam Angka 2019" belum dikeluarkan saat penyusunan RPJMD 2019-2023)

2.2.2.2. KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN WILAYAH

Arah pengembangan kewilayahan Papua terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), khususnya dalam penetapan fungsi ruang dan lokasi pengembangan wilayah. Integrasi ini diperlukan untuk mewujudkan perkembangan wilayah yang seimbang serta sesuai dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Dalam hal ini, kebijakan umum pembangunan berkelanjutan “Green Growth berbasis wilayah adat” diperlukan sebagai bagian dari fokus pembangunan daerah Papua, khususnya dalam penguatan pusat-pusat pertumbuhan, akselerasi pembangunan wilayah tertinggal, serta mewujudkan keterkaitan antar sektor ekonomi secara berkeadilan dan berkelanjutan.

GAMBAR 2.5. ILUSTRASI KEBIJAKAN UMUM PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI PAPUA



TABEL 2.3. PUSAT PERTUMBUHAN DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH PROVINSI PAPUA

PUSAT PERTUMBUHAN	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	KEDUDUKAN: <ul style="list-style-type: none"> pintu gerbang ke kawasan internasional berpotensi mendorong perkembangan wilayah sekitarnya pusat pengembangan kegiatan jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi dengan skala pelayanan nasional atau beberapa provinsi 				
			Timika di Kab. Mimika <ul style="list-style-type: none"> KSN simpul transportasi utama yang melayani Papua bagian selatan 	Kota Jayapura dan Kab. Jayapura <ul style="list-style-type: none"> simpul utama transportasi skala nasional dengan adanya pelabuhan laut dan bandara Sentani 	
Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp)	KEDUDUKAN: dipromosikan menjadi PKN				
	Wamena di Kab. Jayawijaya <ul style="list-style-type: none"> mendorong percepatan pertumbuhan bagian tengah Papua 	Merauke <ul style="list-style-type: none"> mendorong percepatan pertumbuhan di bagian selatan Papua 			Biak <ul style="list-style-type: none"> KSN kawasan andalan, potensi pengembangan pariwisata
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	KEDUDUKAN: <ul style="list-style-type: none"> mendukung PKN pusat jasa, pusat pengolahan, dan simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten 				
		Muting di Kab. Merauke <ul style="list-style-type: none"> pusat pelayanan wilayah bagian selatan 	Nabire <ul style="list-style-type: none"> pusat pelayanan wilayah barat menunjang wilayah sekitarnya dengan adanya jalan, pelabuhan, dan bandara 	Sarmi <ul style="list-style-type: none"> pusat pelayanan wilayah utara bagian tengah 	
Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp)	KEDUDUKAN: dipromosikan menjadi PKW				
	Dekai di Kab. Yahukimo <ul style="list-style-type: none"> pusat simpul masuknya barang dan jasa pusat pengembangan industri di wilayah selatan 	Kepi di Kab. Mappi <ul style="list-style-type: none"> ibukota Kab. Mappi 	Enarotali di Kab. Paniai <ul style="list-style-type: none"> pusat distribusi barang dan jasa untuk beberapa kabupaten seperti Intan Jaya, Deiyai, dan Puncak 	Waris di Kab. Keerom <ul style="list-style-type: none"> memiliki fasilitas perkotaan memadai 	
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	KEDUDUKAN: <ul style="list-style-type: none"> pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. (Semua ibukota kabupaten yang tidak termasuk PKN, PKNp, dan PKW maka ditentukan sebagai PKL)				

2.2.2.3 PENGUATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA(SDM)

a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan SDM di Papua untuk mewujudkan “*green growth* berbasis wilayah adat” dan pengembangan kluster ekonomi dilakukan dengan pembentukan SDM unggul melalui *center of knowledge*, politeknik agroindustri, *technopark*, SMK pertanian, dan balai latihan kerja yang terletak di lokasi-lokasi strategis dalam pembentukan kluster ekonomi setiap wilayah adat.

Secara umum SDM di kluster pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata di Papua harus menguasai kompetensi dasar untuk dapat menjalankan kegiatan budidaya, pengolahan dan pemasaran. Selain itu, keberadaan pusat kluster yang membantu memberikan informasi mengenai peluang pasar untuk hasil produk budidaya olahan pertanian tersebut mengharuskan para pelaku usaha pertanian menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai kompetensi yang harus dimiliki oleh masyarakat tersebut tidak harus dipelajari secara mandiri, namun terdapat lembaga antar kluster yang menjalin kemitraan dengan berbagai aktor yaitu pemerintah, pelaku usaha pertanian eksternal, akademisi, swasta, organisasi sosial, dan lembaga keuangan eksternal untuk membantu SDM pelaku usaha pertanian. Bentuk bantuan yang diberikan tidak hanya dalam bentuk pelatihan atau sosialisasi, namun juga dalam bentuk studi banding, penelitian & pengembangan, investasi, serta memberi bantuan input (benih, pupuk, modal, teknologi, dll). Kemitraan tersebut diharapkan dapat mendorong SDM pelaku usaha pertanian di Papua yang saling bertukar input, output, pengetahuan, informasi dan teknologi serta bekerja sama dengan pelaku usaha pertanian eksternal, sehingga dapat tercipta SDM yang kompeten, kompetitif, dan inovatif dalam implementasi *green growth* berbasis wilayah adat.

TABEL 2.4. PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN

	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
Politeknik Agroindustri terakreditasi B	Wamena di Kab. Jayawijaya* (*opsional)	Kab. Merauke* (*opsional)			
Technopark sebagai <i>center of excellence</i> sektor unggulan kluster ekonomi	v	v	v	v	v
SMK pertanian, pariwisata, dan/atau pertambangan	Wamena di Kab. Jayawijaya	Kab. Merauke	Timika di Kab. Mimika Kab. Nabire	Kab. Jayapura Kab. Sarmi	Kab. Biak Numfor
Balai Latihan Kerja (BLK)	Wamena di Kab. Jayawijaya Kab. Yahukimo	Kab. Merauke Kepi di Kab. Mappi Kab. Boven Digoel	Timika di Kab. Mimika Kab. Nabire	Kab. Jayapura	Kab. Biak Numfor
Lembaga standarisasi mutu					Kab. Biak Numfor

Tentu saja strategi pembangunan pendidikan menengah dan tinggi di atas tidak mengabaikan strategi yang saat ini telah dilakukan untuk mendukung pendidikan dasar, yaitu melalui penguatan sekolah kecil dan sekolah berasrama untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar.

b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Papua dilakukan dengan mempercepat pemenuhan dan peningkatan pelayanan sarana prasarana permukiman sesuai dengan karakteristik wilayah, Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan kearifan lokal masyarakat Papua. Dalam implementasi upaya peningkatan tersebut diperlukan peran aktif masyarakat khususnya dalam peningkatan kapasitas tenaga kesehatan lokal. Secara umum, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Papua dilakukan dengan pemberian tunjangan tenaga kesehatan, penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan, pembangunan, rehabilitasi, dan peningkatan sarana kesehatan, pengembangan upaya kesehatan berbasis masyarakat, pengembangan obat-obat tradisional, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit menular HIV Aids, TB paru, dan malaria.

TABEL 2.5. PEMBANGUNAN, REHABILITASI, DAN/ATAU PENINGKATAN SARANA KESEHATAN DALAM PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN DI PAPUA

	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
RSUD tipe A				Kota Jayapura	
RSUD tipe B	v	v	v		v
Rumah sakit pratama	Kab. Tolikara Kab. Pegunungan Bintang	Mindiptana di Kab. Boven Digoel Muting di Kab. Merauke	Kab. Dogiyai	Kab. Sarmi	Kab. Supiori
Rumah sakit mata				Kota Jayapura	
Rumah sakit jiwa		Kab. Merauke	Kab. Mimika	Kota Jayapura	
Sarana kesehatan terapung		v		v	
Sarana kesehatan keliling				v	v

Sebagaimana bidang pendidikan, penguatan di bidang kesehatan sekunder juga paralel dengan strategi pengembangan kesehatan primer dan kesehatan berbasis masyarakat melalui skema dukungan otonomi khusus.

2.2.2.4 PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN WILAYAH

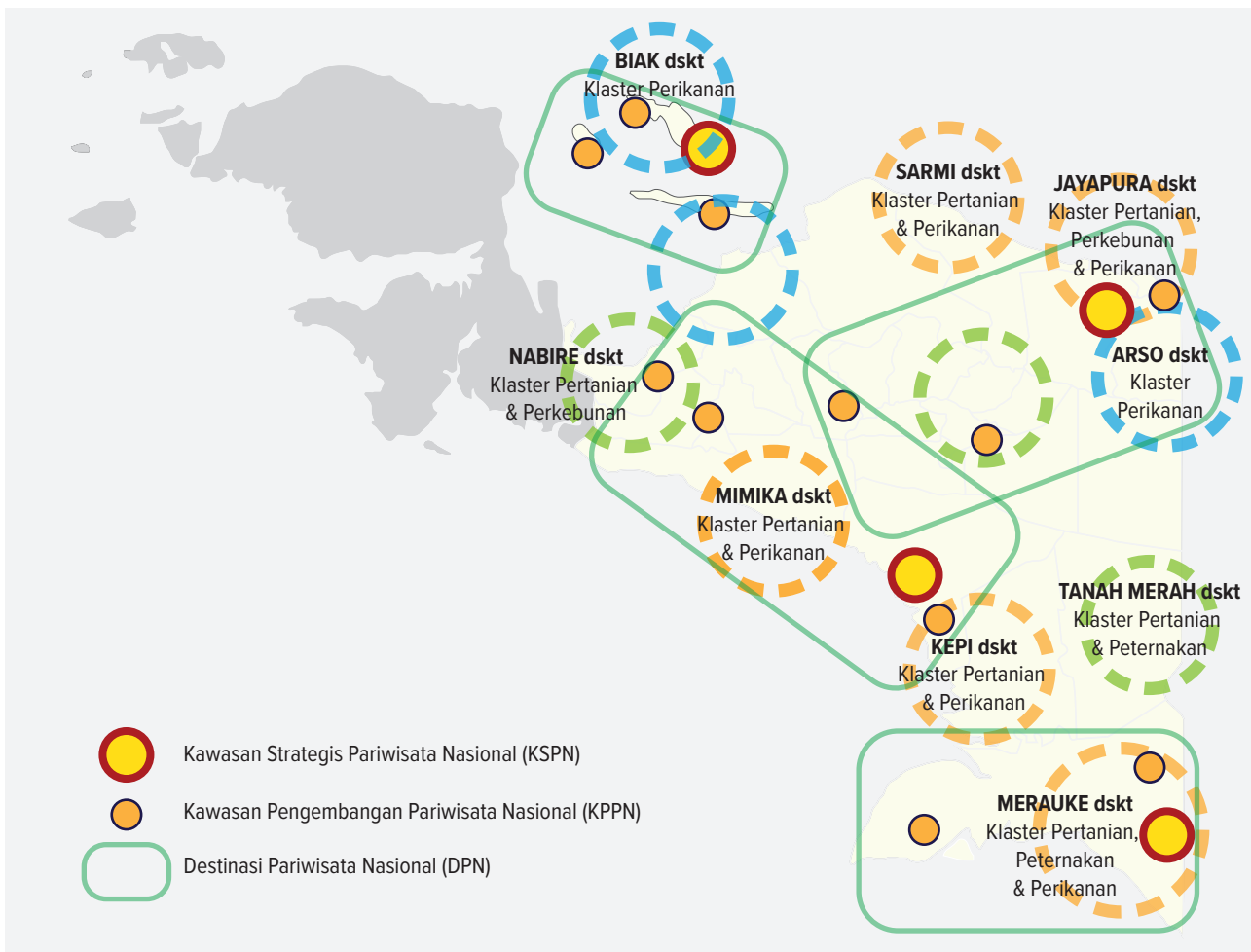
Pengembangan ekonomi wilayah adat secara umum disesuaikan berdasarkan potensi pengembangan komoditas lokal, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta prospek pasar. Sebagai perwujudan pengembangan keterkaitan ekonomi hulu dan hilir di Papua terdapat arah pengembangan klaster (*cluster*) pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata di Papua. Penentuan lokasi klaster telah mempertimbangkan potensi komoditas lokal, kedudukan dan fungsi lokasi dalam sistem perkotaan, kondisi infrastruktur pendukung, arahan KLHS, serta penetapan fungsi lindung dan budidaya dalam RTRWP.

Dalam pengembangan klaster ekonomi di Papua, setiap wilayah dan pelaku usaha saling terhubung dan membentuk jejaring dalam memanfaatkan potensi lokal, sehingga akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi multisektor dan manfaat kolektif. Adapun manfaat kolektif yang diperoleh dari terbentuknya klaster adalah sebagai berikut (Porter, 1998):

- a. **Efisiensi:** kedekatan geografis akan berdampak terhadap pengurangan biaya operasional (transportasi dan komunikasi) dan biaya produksi, serta memungkinkan efisiensi lainnya berupa pembiayaan bersama (*cost sharing*) dan pembagian risiko (*risk sharing*);
- b. **Produktivitas:** sebagai dampak dari kemudahan yang diperoleh (*specialized labor pool, specialized input supplier, and technological supplier*) maka para pelaku usaha dapat fokus kompetensi untuk meningkatkan produktivitas. Pelaku usaha di dalam kluster akan lebih produktif dalam menggunakan input; mengakses informasi, teknologi dan institusi yang dibutuhkan; berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait; dan memiliki motivasi di dalam melakukan perbaikan (*improvement*);
- c. **Inovatif:** merupakan *output* dari interaksi sinergis antar *stakeholder* di dalam kluster, termasuk keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang akan meningkatkan kemampuan kolektif.

Tantangan dalam pengembangan kluster ekonomi di Papua adalah dampak yang tidak dapat dirasakan dalam jangka waktu yang pendek sehingga diperlukan upaya lebih agar kluster ekonomi terbentuk secara berkelanjutan. Kluster yang berhasil adalah kluster yang terspesialisasi, memiliki daya saing dan keunggulan komparatif, dan berorientasi eksternal. Kluster tersebut memiliki jaringan lokal, akses yang baik pada permodalan, institusi penelitian dan pengembangan, tenaga kerja yang berkualitas, melakukan kerjasama yang baik antara perusahaan dan lembaga lainnya, mengikuti perkembangan teknologi, dan adanya tingkat inovasi yang tinggi.

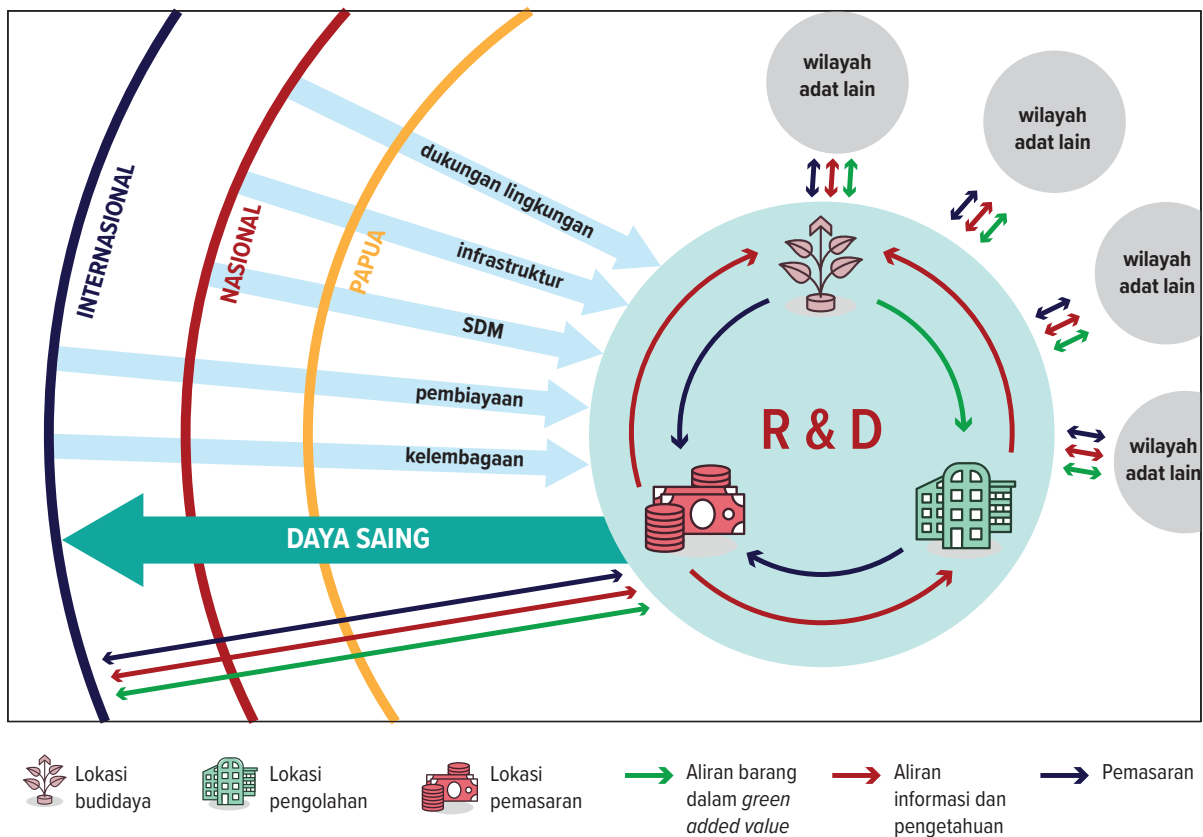
GAMBAR 2.6. ILUSTRASI PENGEMBANGAN KLUSTER EKONOMI DI PAPUA



TABEL 2.6. PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN WILAYAH

WILAYAH ADAT					
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN WILAYAH BERBASIS KOMODITAS LOKAL					
Sektor Primer	kopi, buah merah, ubi jalar, sagu	padi, karet, kopi, tebu, perikanan, peternakan, kelapa sawit	kopi, buah merah, ubi jalar, tambang, perikanan, sagu	kakao, kelapa dalam, kelapa sawit, perikanan	hasil Laut, perikanan
Sektor Sekunder	industri pengolahan sagu, buah merah, ubi jalar, kopi	industri pengolahantebu, kelapa sawit, peternakan, dan pengalenganikan	industri pengolahan hasil pertambangan, pertanian, dan/ atau perkebunan	industri pengolahan ikan dan hasil perkebunan	industri kayu, pengolahan ikan
Sektor Tersier	pariwisata, perdagangan dan jasa	pariwisata, perdagangan dan jasa	pariwisata, perdagangan dan jasa	pariwisata, perdagangan dan jasa	pariwisata, perdagangan dan jasa
PENGEMBANGAN KLASTER EKONOMI DI PAPUA					
Klaster Pertanian	Wamena dan sekitarnya	Tanah Merah dan sekitarnya Kepi dan sekitarnya Merauke dan sekitarnya	Nabire dan sekitarnya Mimika dan sekitarnya	Sarmi dan sekitarnya Jayapura dan sekitarnya	
Klaster Perkebunan	Wamena dan sekitarnya		Nabire dan sekitarnya	Jayapura dan sekitarnya	
Klaster Peternakan	Wamena dan sekitarnya	Tanah Merah dan sekitarnya Merauke dan sekitarnya			
Klaster Perikanan		Kepi dan sekitarnya Merauke dan sekitarnya	Mimika dan sekitarnya	Sarmi dan sekitarnya Arso dan sekitarnya Jayapura dan sekitarnya	Biak dan sekitarnya Waropen dan sekitarnya
Klaster Pariwisata	KPPN Timika- Lorentz dan sekitarnya di Kab. Mimika dan Jayawijaya KPPN Jayawijaya di Kab. Jayawijaya KPPN Wamena di Kab. Jayawijaya	KSPN Wasur- Merauke dan sekitarnya di Kab. Merauke KPPN Kimaam dan sekitarnya di Kab. Merauke KPPN Danau Bian dan sekitarnya di Kab. Merauke	KPPN C.A. Weyland dan sekitarnya di Kab. Nabire KPPN Paniai dan sekitarnya di Kab. Paniai KSPN Agats-Asmat dan sekitarnya di Kab. Asmat KPPN Timika- Lorentz dan sekitarnya di Kab. Mimikadan Jayawijaya	KSPN Sentani dan sekitarnya di Kab. Jayapura KPPN Jayapura dan sekitarnya di Kota Jayapura	KSPN Biak dan sekitarnya di Kab. Biak KPPN Numfor dan sekitarnya di Kab. Biak numfor KPPN Serui dan sekitarnya di Kab. Kep. Yapen KPPN Supiori dan sekitarnya di Kab. Supiori

GAMBAR 2.7. ILUSTRASI PENGEMBANGAN KLASTER EKONOMI DI PAPUA



Dalam pengembangan kluster ekonomi terdapat interaksi di dalam kluster ekonomi, interaksi antar kluster ekonomi, interaksi di dalam wilayah adat, antar wilayah adat, maupun interaksi dengan wilayah luar Papua, berupa: (1) aliran barang dalam penciptaan nilai tambah yang ramah lingkungan (*green added value*); (2) aliran informasi & pengetahuan (*sharing of knowledge*) yang mendorong keterampilan dan inovasi; serta (3) aliran pemasaran. Interaksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing komoditas lokal, serta dapat memberikan *multiplier effect* terhadap sektor ekonomi lainnya, tanpa mengabaikan upaya-upaya pelestarian lingkungan. Dalam pemanfaatan kluster pariwisata, terdapat hubungan integrasi antara kluster pariwisata dengan kluster lainnya, yaitu sebagai lokasi promosi dan pemasaran output produksi kluster ekonomi.

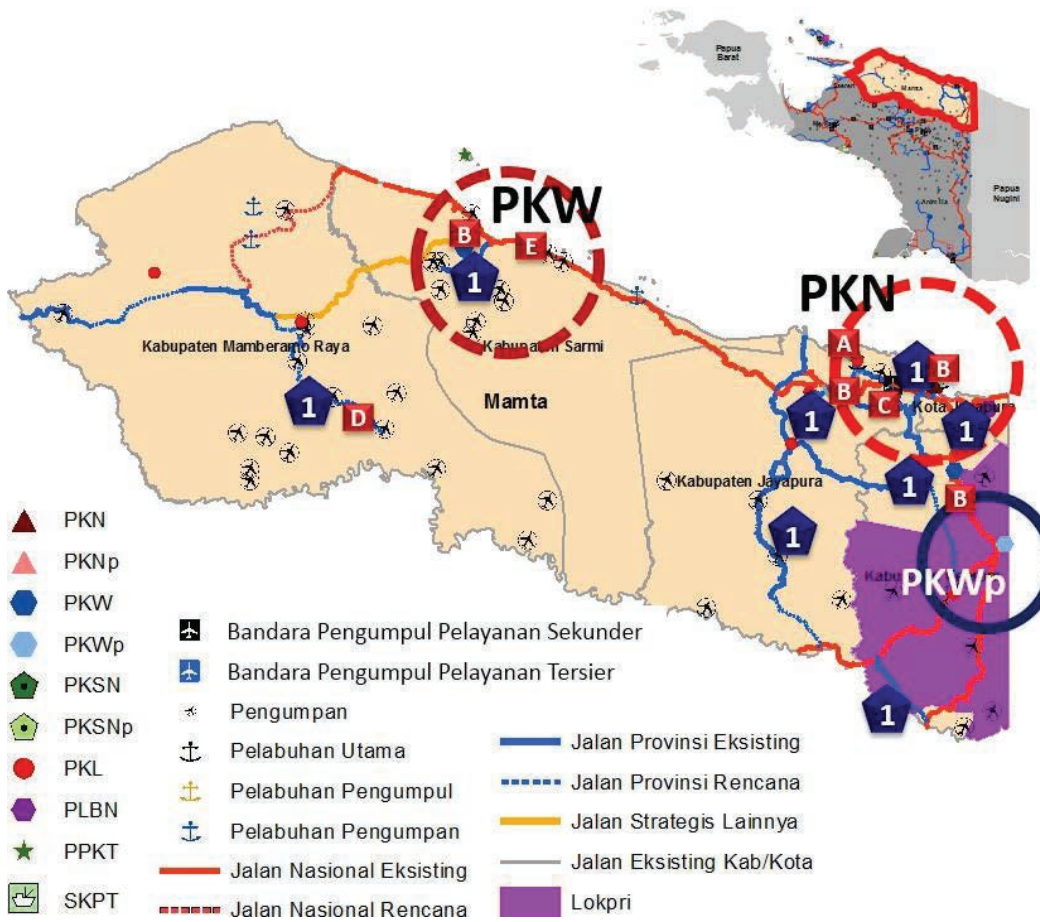
Pada implementasi kebijakan umum pembangunan berkelanjutan “*Green Growth* berbasis wilayah adat”, maka arah pengembangan juga difokuskan pada penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengendalian limbah. Tantangan terbesar dari implementasi ini adalah diperlukan arahan yang tepat dari para pemangku kepentingan agar teknologi ramah dapat digunakan sebaik mungkin oleh setiap pelaku usaha pertanian dari hulu hingga hilir di dalam pengembangan kluster ekonomi.

2.2.2.5 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS

Pengembangan konektivitas Papua diarahkan untuk memadukan sistem pelayanan transportasi antarmoda, dalam menciptakan dan meningkatkan aksesibilitas di dalam maupun antar wilayah adat, khususnya antara pusat pertumbuhan dengan kawasan penyangga. Pada pengembangan kluster, infrastruktur menghubungkan lokasi produksi komoditas berbasis sumber daya lokal dengan pusat pertumbuhan dan wilayah luar Papua, khususnya dalam pengembangan ekonomi OAP. Dengan adanya aksesibilitas yang memadai diharapkan dapat mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah, serta menarik dan mengembangkan minat investasi di berbagai sektor, baik pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, maupun pertambangan.

a. Arah Pengembangan Konektivitas MAMTA

GAMBAR 2.8. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH ADAT MAMTA



Jalan dan jembatan:

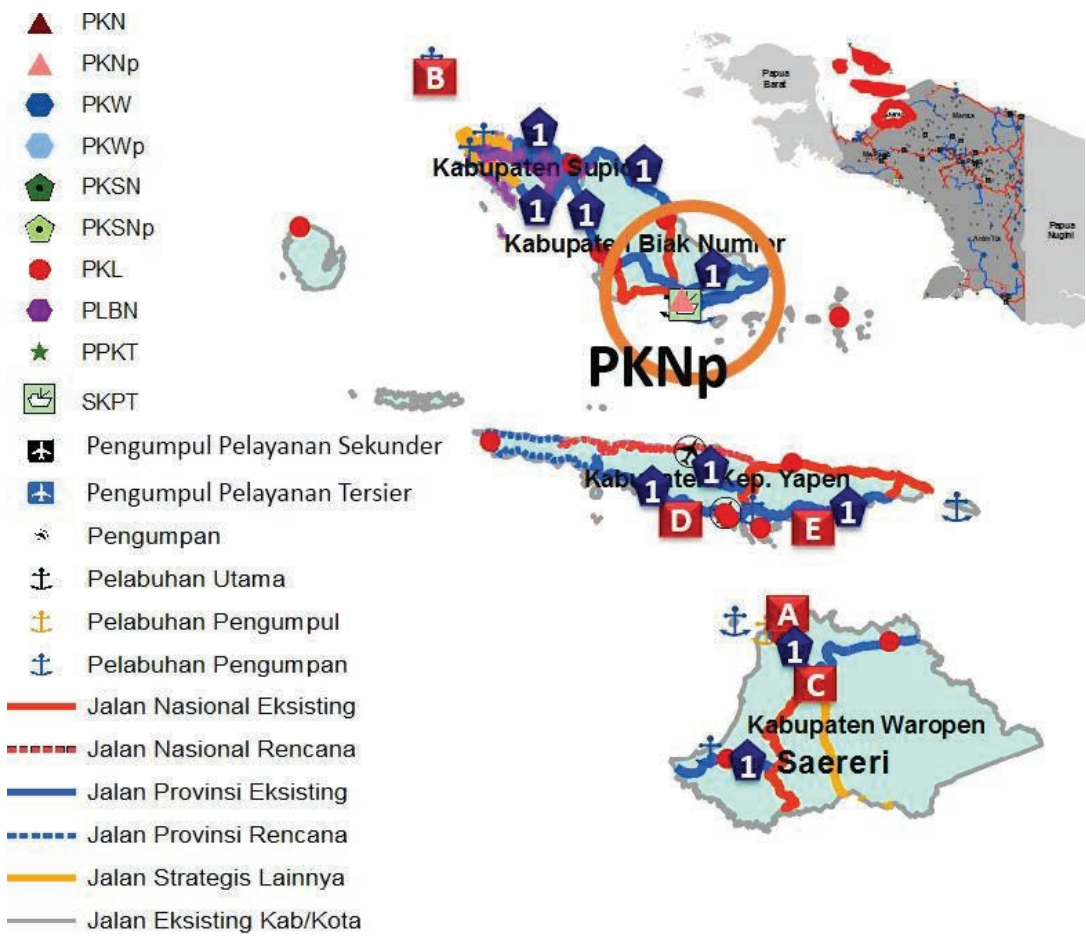
1. Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016
2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar sentra ekonomi masyarakat yang tersebar di seluruh kabupaten

Perhubungan:

- A. Pembangunan pelabuhan peti kemas Depapre di Kab. Jayapura
- B. Pembangunan terminal type B di Kab./kota Jayapura, Sarmi, dan Keerom
- C. Pembangunan dermaga-dermaga di Danau Sentani
- D. Pembangunan Bandara Kustra di Kab.Mamberamo Raya
- E. Pembangunan Pelabuhan Wakde di Kab. Sarmi

b. Arah Pengembangan Konektivitas SAERERI

GAMBAR 2.9. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH ADAT SAERERI



Jalan dan jembatan:

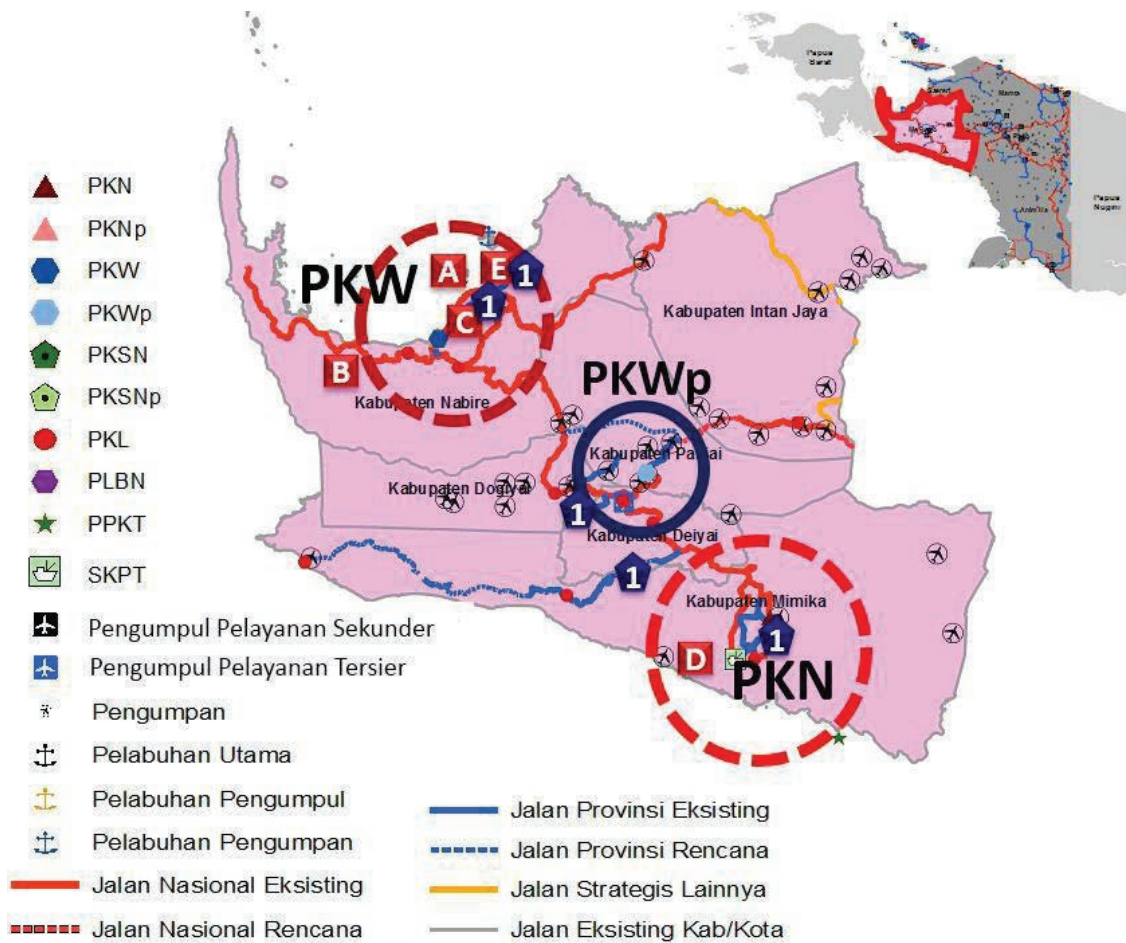
1. Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016
2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar sentra ekonomi masyarakat (tersebar di seluruh kabupaten)

Perhubungan:

- A. Pembangunan Pelabuhan Waren di Kabupaten Waropen
- B. Pembangunan Pelabuhan Miosbepondi di Kab. Supiori
- C. Pembangunan Bandara Botawa di Kabupaten Waropen
- D. Pembangunan dan peningkatan Bandara Kamanap di Kab. Kepulauan Yapen
- E. Pembangunan Pelabuhan Ampimoi di Kab. Kepulauan Yapen

c. Arah Pengembangan Infrastruktur MEE PAGO

GAMBAR 2.10. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH ADAT MEE PAGO



Jalan dan jembatan:

1. Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016
2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar sentra ekonomi masyarakat (tersebar di seluruh kabupaten)

Perhubungan:

- A. Pembangunan Pelabuhan Perintis Pulau Mambor di Kab. Nabire
- B. Pembangunan Bandara Wanggar di Kab. Nabire
- C. Pembangunan Terminal type B di Anibe
- D. Pembangunan Dermaga Sungai Sipu-sipu di Kab. Mimika
- E. Rehabilitasi dan peningkatan Dermaga Samabusa di Kab. Nabire

d. Arah Pengembangan Infrastruktur LA PAGO

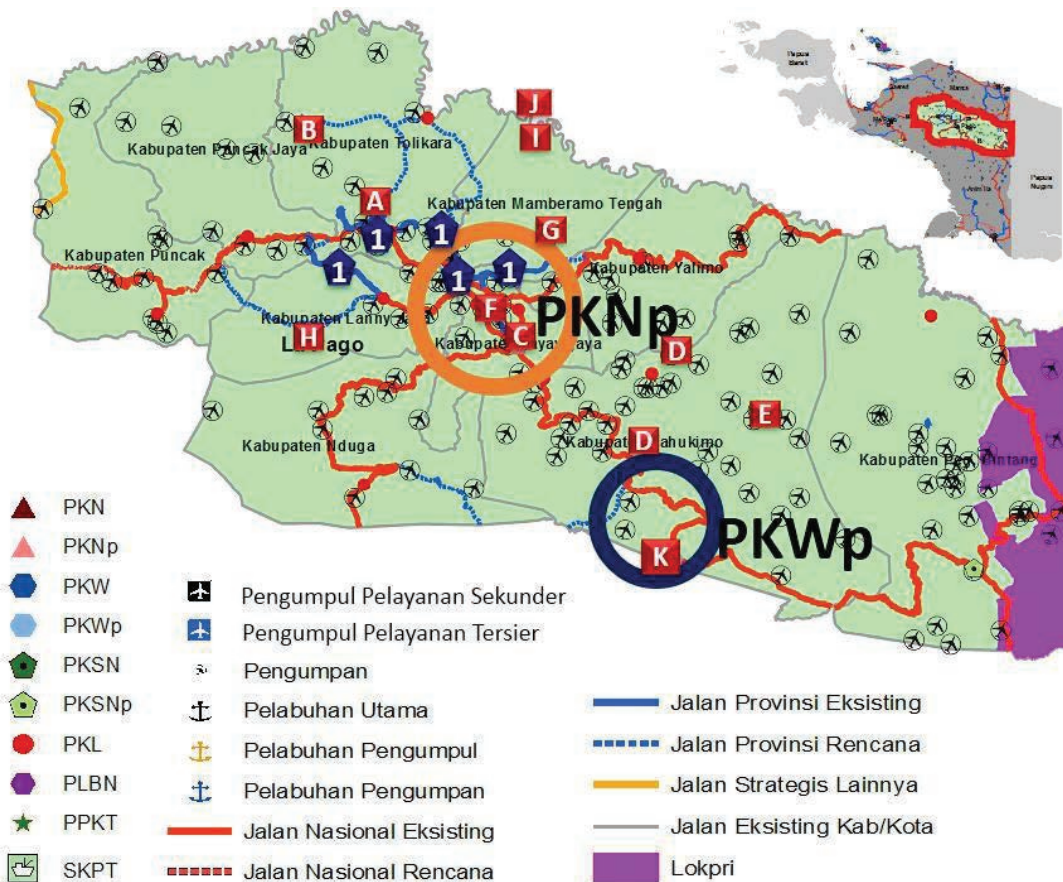
Jalan dan jembatan:

1. Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016
2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar sentra ekonomi masyarakat (tersebar di seluruh kabupaten)

Perhubungan:

- A. Pembangunan Bandara Mamit di Tolikara
- B. Pembangunan Bandara Fawi di Puncak Jaya
- C. Pembangunan Bandara Wamena
- D. Pembangunan Bandara Panggema & Ninia di Yahukimo
- E. Pembangunan Bandara Saminage di Yahukimo
- F. Pembangunan Terminal Tipe B di Jayawijaya
- G. Pembangunan Bandara Kobakma di Mamberamo Tengah
- H. Pembangunan Bandara Kuyawge di Lanny Jaya
- I. Pembangunan Bandara Taria Mamberamo Tengah
- J. Pembangunan Dermaga Sungai Taria di Mamberamo Tengah
- K. Pembangunan Bandara Nop Gollat di Yahukimo

GAMBAR 2.11. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH ADAT LA PAGO



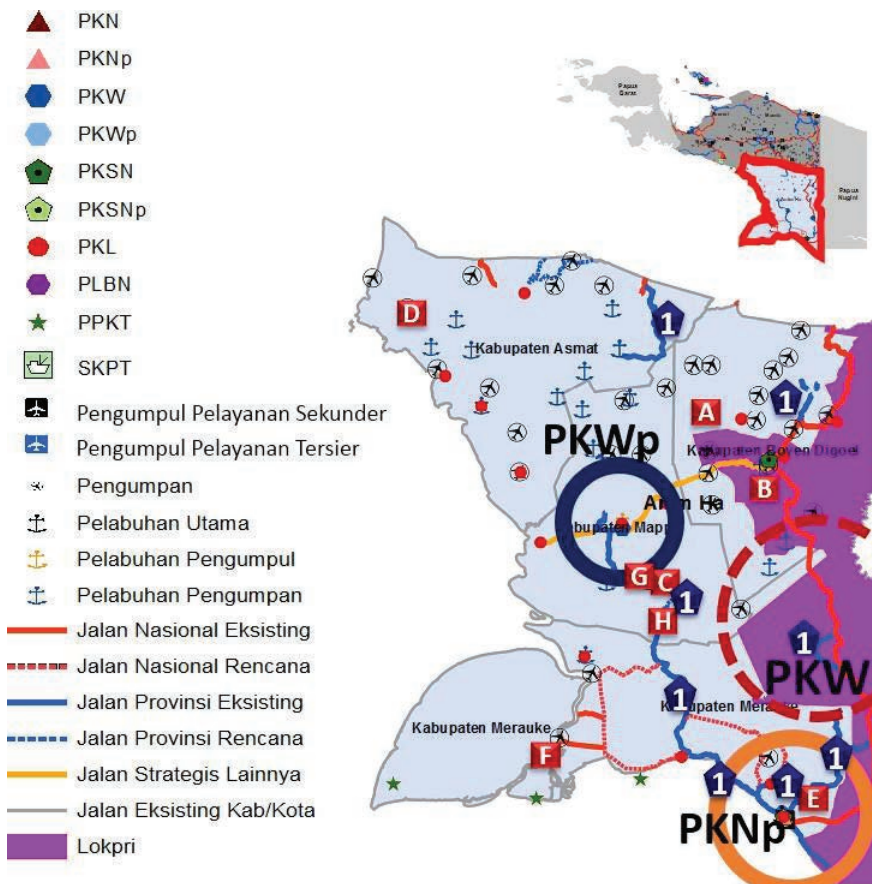
e. Arah Pengembangan Infrastruktur Anim Ha Jalan dan jembatan:

1. Peningkatan, pemeliharaan, dan penuntasan ruas jalan sesuai dengan SK No. 188.4/365/Tahun 2016
2. Pembangunan jalan non status untuk menghubungkan antar sentra ekonomi masyarakat (tersebar di seluruh kabupaten)

Perhubungan:

- A. Pembangunan Pelabuhan Perintis Bomakia di Boeven Digul
- B. Pengembangan Pelabuhan Tanah Merah di Boeven Digul
- C. Pembangunan Bandara Kepi di Mappi
- D. Pembangunan Bandara Ewer di Asmat
- E. Pembangunan Terminal Tipe B di Merauke
- F. Pembangunan Pelabuhan Kimam di Merauke
- G. Pengembangan Pelabuhan Kepi
- H. Pembangunan Pelabuhan Bade di Kabupaten Mappi

GAMBAR 2.12. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH ADAT ANIM HA



2.2.2.6 PENGEMBANGAN WILAYAH PINGGIRAN DAN PERBATASAN

Pengembangan wilayah pinggiran menjadi prioritas daerah dalam pembangunan pelayanan dasar terutama untuk menjamin bahwa pelayanan dasar, kesempatan ekonomi dan infrastruktur dasar sampai ke kampung-kampung yang ada di wilayah pinggiran.

Salah satu kawasan pinggiran yang perlu mendapatkan prioritas pembangunan adalah kawasan perbatasan. Pembangunan kawasan perbatasan bertujuan untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Terdapat 2 (dua) pendekatan pembangunan dalam mengembangkan kawasan perbatasan di Papua, yaitu pendekatan keamanan (*security approach*) dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*). Pendekatan keamanan dilakukan melalui:

- Transformasi kelembagaan lintas batas negara menjadi satu sistem pengelolaan yang terpadu, yaitu *costum, immigration, quarantine, security* (CIQS)
- Peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana prasarana pengamanan perbatasan laut dan darat, yang melibatkan peran aktif masyarakat
- Peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan

Adapun pendekatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*) dilakukan melalui:

- Penguatan kegiatan ekonomi berbasis komoditas lokal di PLBN, PKS, dan lokpri yg mempertimbangkan peluang pasar negara tetangga, serta didukung pembangunan infrastruktur & pelayanan dasar
- Pembangunan SDM yg handal & pemanfaatan IPTEK
- Pembangunan konektivitas antara PKS, lokpri, PKW, & PKN
- Penguatan distrik sebagai ujung tombak koordinasi pembangunan di lokasi prioritas
- Peningkatan kerjasama perdagangan dengan negara tetangga

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, maka peran provinsi Papua akan lebih banyak pada pendekatan kesejahteraan masyarakat. Karena menyangkut Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), maka penyelenggaraan kewenangan ini tentu saja dilaksanakan bekerja sama dengan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi juga akan mendorong daerah kabupaten di perbatasan agar mendayagunakan sumber daya ekonomi lokal dalam mendukung PKSN agar pembangunan PKSN memberikan kontribusi positif bagi penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat kampung-kampung di sekitarnya.

TABEL 2.7. PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN

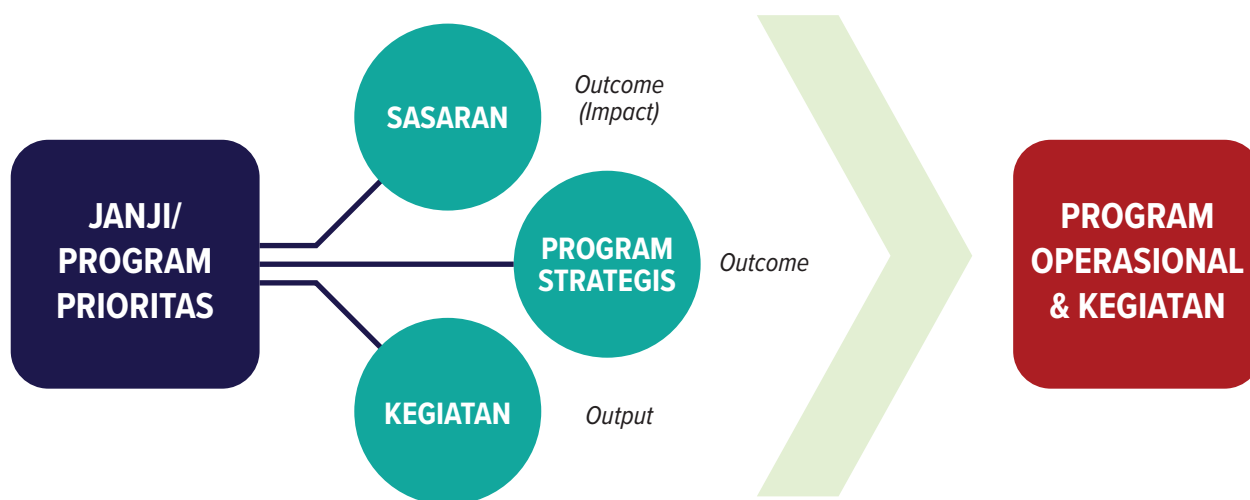
	WILAYAH ADAT				
	LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)	KEDUDUKAN: <ul style="list-style-type: none"> • menunjang sektor strategis nasional • menunjang pengembangan wilayah baru atau penyebaran kegiatan ekonomi • daerah penyangga aglomerasi pertumbuhan pusat kegiatan yang telah ada • berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga • pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga • simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya 				

WILAYAH ADAT				
LA PAGO	ANIM HA	MEE PAGO	MAMTA	SAERERI
Oksibil di Kab. Pegunungan Bintang • pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya	Tanah Merah di Kab. Boven Digoel • pusat pelayanan kepabeanaan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu; • pusat perdagangan skala internasional • pengembangan sekolah bertaraf internasional		Arso di Kab. Keerom • pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya • pengembangan sekolah bertaraf internasional	
PKSN Promosi	KEDUDUKAN: Kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara			
	Merauke di Kab. Merauke • pusat pelayanan kepabeanaan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu; • peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan • pusat perdagangan skala internasional • pengembangan sekolah bertaraf internasional		Jayapura • pusat pelayanan kepabeanaan, imigrasi, karantina, dan keamanan terpadu • peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan • pusat perdagangan skala internasional	
Lokasi Prioritas (lokpri) perbatasan	KEDUDUKAN: Kawasan yang mempercepat pembangunan dan efektivitas peningkatan kualitas pelayanan publik di perbatasan			
	Kab. Pegunungan Bintang (9 distrik) Batom, Iwur, Kiwirok, Pepera, Oksomol, Tarub, Murkim, Kiwirok Timur, Mufinop	Kab. Merauke (5 distrik) Eligobel, Muting, Sota, Uililn, Naukenjeri Kab. Boven Digoel (4 distrik) Mindiptana, Tanah Merah, Jair, Waraopko	Kab. Keerom (5 distrik) Web, Senggi, Waris, Arso Timur, Towe	Kab. Supiori (3 distrik) Supirori Barat, SupiroriUtara, Kepulauan Aruri
Pulau-Pulau Terkecil Terluar (PPKT)	KEDUDUKAN: • Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), yang berperan dalam kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia • Penempatan pos pertahanan, pos keamanan, dan/atau pos lain • Penempatan sarana bantu navigasi pelayaran • Peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk usaha kelautan dan perikanan, ekowisata bahari, pendidikan dan penelitian, pertanian subsisten, dan industri jasa maritim			
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)	KEDUDUKAN: Pusat pembangunan pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan dengan basis sektor kelautan dan perikanan			
	SKPT Merauke	SKPT Timika	SKPT Sarmi	SKPT Biak Numfor
Pos Lintas Batas Negara (PLBN)	PLBN Sota di Kab. Merauke		PLBN Skouw di Kota Jayapura	

2.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Prioritas pembangunan daerah pada intinya merupakan implementasi dari janji- janji serta agenda politik kepala daerah terpilih yang diusung pada waktu kampanye. Sesuai dengan kaidah perencanaan dan pengukuran kinerja, janji dan program prioritas kepala daerah terpilih diimplementasi dalam tataran sasaran, program dan kegiatan yang mempunyai tingkatan indikator sasaran (*outcome/impact*), program (*outcome*) atau kegiatan (*output*) yang dilaksanakan dalam bentuk program operasional dan kegiatan di perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, sebagaimana ilustrasi Gambar 2.13.

GAMBAR 2.13. ILUSTRASI IMPLEMENTASI JANJI/PROGRAM PRIORITAS KEPALA DAERAH



Berdasarkan janji Gubernur Papua terpilih, prioritas pembangunan dan program Provinsi Papua mencakup: 1) sumber daya manusia berdaya saing yang ditandai oleh sumber daya yang cerdas mandiri, sumber daya manusia yang sehat sejahtera, pemuda yang aktif dan berprestasi, dan berketahanan pangan; 2) menyukseskan penyelenggaraan PON XX 2020 di Provinsi Papua dengan prestasi yang baik, 3) pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan, yang juga ditopang oleh 4) kampung Papua berkembang dan mandiri dalam menjalankan kewenangannya; 5) permukiman masyarakat yang layak untuk mendukung kesejahteraan masyarakat; dan 6) percepatan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk menopang dan membangkitkan perkembangan wilayah, pelayanan dasar dan ekonomi. Aspek pembangunan di atas didukung oleh: 1) tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan kuat, 2) pengarusutamaan keadilan gender dan upaya perlindungan anak-anak, 3) afirmasi melalui program perlindungan sosial, terutama bagi orang asli Papua, yang salah satunya telah diinisiasi melalui Program BANGGA PAPUA dan 4) kemitraan dengan berbagai sumber daya pembangunan yang ada di Provinsi Papua terutama dengan lembaga adat, lembaga keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun mitra pembangunan internasional. Prioritas pembangunan dan program provinsi tersebut kemudian dirumuskan dalam *flagship 10 TEKAD PAPUA* yaitu: 1) Generasi Emas (Gemaspapua); 2) Berdaya Ekomas Papua; 3) Infradas Papua; 4) Perlindungan dan Keberpihakan Adat Papua; 5) Kesetaraan Gender dan Kemitraan Papua; 6) Sukses PON XX Papua; 7) Pembangunan Berkelanjutan Papua; 8) Kampung Mandiri Papua; 9) Mandiri Pangan Papua; dan 10) Reformasi Birokrasi Papua (sebagaimana yang ditampilkan dalam Gambar 2.14).

Tabel 2.8. menampilkan rincian prioritas program pembangunan daerah Papua Tahun 2019-2023 yang telah dipetakan berdasarkan sasaran strategis, strategi, urusan, kewenangan, kebijakan belanja (belanja langsung/ belanja tidak langsung), serta tingkat prioritas di setiap wilayah adat. Dalam hal ini, tingkat prioritas terbagi menjadi 3, yaitu prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3.

GAMBAR 2.14. FLAGSHIP 10 TEKAD PAPUA DAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI PAPUA 2019-2023



VISI: MENUJU PAPUA BANGKIT, MANDIRI & SEJAHTERA YANG BERKEADILAN

FLAGSHIP

10 TEKAD PAPUA

MISI

GEMAS PAPUA

BERDAYA EKOMAS PAPUA

INFRADAS PAPUA

PERLINDUNGAN & KEBERPIHAKAN ADAT PAPUA

KESETARAAN GENDER & KEMITRAAN PAPUA

SUKSES PON XX PAPUA

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PAPUA

KAMPUNG MANDIRI PAPUA

MANDIRI PANGAN PAPUA

REFORMASI BIROKRASI PAPUA



1

Memantapkan Kualitas & Daya Saing SDM

PROGRAM PRIORITAS

GEMAS PAPUA

- Program pembangunan & pengembangan SMK, BLK, & politeknik
- Program peningkatan akses & kualitas pendidikan SD, SMP, & SMA
- Program akselerasi & afirmasi pendidikan anak berprestasi & unggul
- Program pemantapan jaminan kesehatan masyarakat terhadap wabah
- Program peningkatan & pembenahan puskesmas, rumah sakit & sistem rujukan kesehatan
- Program pemantapan upaya kesehatan berbasis kondisi lokal Papua melalui pelayanan kesehatan, pro aktif, bergerak pada ibu, bayi, & balita
- Program peningkatan kualitas SDM kesehatan
- Program peningkatan prestasi kepemimpinan

INFRADAS PAPUA

- Program penyediaan dan peningkatan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah

SUKSES PON XX PAPUA

- Program peningkatan prestasi kepemimpinan
- Program penyelenggaraan sarana & prasarana PON
- Program peningkatan ekonomi masyarakat dalam mendukung dan memanfaatkan PON

MANDIRI PANGAN PAPUA

- Program peningkatan kemandirian kampung untuk kemandirian pangan



2

Memantapkan Rasa Aman, Tenang & Damai serta Kehidupan Demokrasi memperkuat Bingkai NKRI

PROGRAM PRIORITAS

KESETARAAN GENDER & KEMITRAAN

- Program peningkatan kemitraan dalam penubuhannya, pengambilan keputusan publik, pembangunan, dan ketertarikan masyarakat

INFRADAS PAPUA

- Pengembangan kebijakan pembagian dana Orsus untuk mengurangi kesenjangan, insentif jasa lingkungan, dan infrastruktur

KAMPUNG MANDIRI PAPUA

- Program penguatan kelembagaan kampung

REFORMASI BIROKRASI PAPUA

- Program penguatan sinergi antara pemerintah prov. & kab./kota
- Program penataan struktur organisasi & teknologi birokrasi untuk pelayanan publik, pengawasan, & penegakan aturan yang lebih efektif & efisien
- Program penguatan sistem akuntabilitas & pengawasan dalam pengelolaan keuangan & kinerja daerah

REFORMASI BIROKRASI PAPUA SUKSES PON XX PAPUA

- Program penguatan sistem perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian tata ruang & pembangunan ekonomi, infrastruktur, insipirasi pelayanan, yang sesuai dengan daya dukung & daya tampung lingkungan



3

Penguatan dan Percepatan Perekonomian Daerah sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural & Berkelanjutan

PROGRAM PRIORITAS

MANDIRI PANGAN PAPUA

- Program penguatan nilai tukar & daya beli petani, peternak, & nelayan
- Program penguatan kemandirian kampung untuk kemandirian pangan
- Program peningkatan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan & menghasilkan nilai tambah komoditas

BERDAYA EKOMAS PAPUA

- Program pembangunan & pengembangan kluster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan
- Program peningkatan & pemenuhan infrastruktur pertanian, perternakan, & perikanan dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah
- Program perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas
- Program peningkatan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan & menghasilkan nilai tambah komoditas
- Program peningkatan industri non pertanian (off farm) yang mendorong kemandirian ekonomi

GEMAS PAPUA

- Program pembangunan dan pengembangan SMK, BLK, dan Politeknik

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PAPUA

- Program penguatan sistem perencanaan, pemanfaatan, serta pengendalian tata ruang & pembangunan ekonomi, infrastruktur, maupun pelayanan, yang sesuai dengan daya dukung & daya tampung lingkungan
- Program pengendalian pencemaran & perusakan lingkungan hidup, serta revitalisasi pembangunan rendah karbon
- Program pengendalian banjir & abrasi pantai

INFRADAS PAPUA

- Program peningkatan ketersediaan perumahan layak huni, dengan lingkungan yang sehat & bersih
- Program peningkatan akses transportasi antar moda
- Program peningkatan pengelolaan air baku yang mendukung produktivitas wilayah
- Program peningkatan ketersediaan energi murah dan energi terbarukan
- Program peningkatan akses informasi dan komunikasi



4

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Tertentu

PROGRAM PRIORITAS

PERLINDUNGAN & KEBERLANJUTAN ADAT PAPUA

- Program percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan & infrastruktur daerah tertinggal, perbatasan, terluar & tertentu

MANDIRI PANGAN PAPUA

- Program penguatan kemandirian kampung untuk kemandirian pangan

KAMPUNG MANDIRI PAPUA

- Program penguatan kelembagaan kampung

GEMAS PAPUA

- Program akselerasi & afirmasi pendidikan anak berprestasi & unggul
- Program perlindungan sosial untuk generasi emas, lanjut usia, & difabel

INFRADAS PAPUA

- Program peningkatan ketersediaan perumahan layak huni, & lingkungan sehat

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

- Program peningkatan kapasitas SDM & sarana prasarana penanggulangan bencana

KESETARAAN GENDER & KEMITRAAN

- Penguatan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan gender dalam strategi pembangunan.

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS DAERAH	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT			
							BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO
		Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui penyebaran tenaga pendididkan dan guru kunjung , terutama di daerah terpencil	Program Manajemen Pelayanan Pendididkan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendididkan	■	■	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./ Kota 30% Bidang Pendididkan	2	2	1	1	1
		Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, pelatihan, profesionalisme dan tunjangan guru	Program Peningkatan Mutu Pendididk dan Tenaga Kependidikan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendididkan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2	2	2	2	2
		Akselerasi dan afirmasi pendidikan dengan melaksanakan Program Pendididkan anak berprestasi dan unggul Papua	Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendididkan dan Pelatihan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua	2	2	1	1	1
		Peningkatan kemitraan lembaga pendidikan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya	Program Manajemen Pelayanan Pendididkan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendididkan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Manajemen Pelayanan Pendididkan	1	1	1	1	1
S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Menyempurnakan dan memantapkan pelaksanaan program jaminan kesehatan Papua (KPS) baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Upaya Kesehatan Perorangan	1	1	1	1	1

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	KEWENANGAN			KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT				
			URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
Peningkatan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab/Kota 15% Bidang Kesehatan					
			■	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab/Kota 15% Bidang Kesehatan	2	2	1	1	1
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab/Kota 15% Bidang Kesehatan					
			■	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Manajemen dan Manajemen Kesehatan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab/Kota 15% Bidang Kesehatan					
Program Pengembangan Data/Informasi	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	Program Pengembangan Data/Informasi	■	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Pengembangan Data/Informasi	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab/Kota 15% Bidang Kesehatan					
			■	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Pengembangan Data/Informasi	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab/Kota 15% Bidang Kesehatan					

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT					
							BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA	
		Peningkatan dan pembenahan jumlah puskesmas dan jaringannya serta pengembangan puskesmas rawat inap, yang didukung fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan aksesibilitas relatif rendah	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota 15% Bidang Kesehatan							
			Program Sumber Daya Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Sumber Daya Kesehatan			2	2	1	1	1
		Memperkuat dan memantapkan pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi lokal Papua melalui pelayanan kesehatan pro aktif/bergerak (Pelayanan kesehatan Kaki Telanjang), puskesmas kelling, flying health care, puskesmas apung termasuk penyediaan mobile medical service.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Upaya Kesehatan Masyarakat			2	2	1	1	1
		Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota 15% Bidang Kesehatan			2	2	1	1	1

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT			
						KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
		Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita serta peningkatan dan pemenuhan gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan Generasi Emas Papua	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	■	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./ Kota 15% Bidang Kesehatan	2	2	1	1	1
		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	■	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./ Kota 15% Bidang Kesehatan	2	2	1	1	1	1
		Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua Puskesmas dan jaringannya, dengan diprioritaskan pada peningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan	Program Sumber Daya Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Sumber Daya Kesehatan	2	2	1	1	1
		Penyempurnaan sistem insentif dan penempatan SDM kesehatan sesuai dengan tingkat kesulitan, peningkatan kompetensi SDM kesehatan serta adanya jaminan keamanan bagi seluruh tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan.	Program Sumber Daya Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Sumber Daya Kesehatan	2	2	1	1	1

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT					
							BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA	
		Pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, malaria dan TBC	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./ Kota 15% Bidang Kesehatan	2	2	1	1	1	
		Pembangunan dan pengembangan rumah sakit rujukan di 5 wilayah adat.	Program Sumber Daya Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Sumber Daya Kesehatan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./ Kota 15% Bidang Kesehatan						
			Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./ Kota 15% Bidang Kesehatan	1	1	1	1	1	
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu/ Rumah Sakit Mata	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./ Kota 15% Bidang Kesehatan						
			Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paruparu/Rumah Sakit Mata	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu/ Rumah Sakit Mata	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./ Kota 15% Bidang Kesehatan						

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT				
							BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
			Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	2	2	2	2	2	2
S4	Sukses pelaksanaan PON dan prestasi olahraga	Meningkatkan prestasi melalui kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan, terutama sukses prestasi PON XX tahun 2020 dan pengembangan industri olah raga Indonesia	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	■	■	Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga.						
			Program Pembinaan dan Pemasyaraktan Olahraga	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	■	■	Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Pembinaan dan Pemasyaraktan Olahraga						
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	■	■	Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga						
			Program Sumber Daya Kesehatan (pos kesehatan, rumah sakit, dan tenaga medis)	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	■	■	Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Sumber Daya Kesehatan (pos kesehatan, rumah sakit, dan tenaga medis)						
			Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	■	■	Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa						

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT			
						KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
			Program Pelayanan Air Bersih	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	■	■	■	Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Pelayanan Air Bersih	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	1	1	1	1
			Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	■	■	■	Belanja APBD provinsi, termasuk dana otsus, untuk Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi		1	1	1	1
		Menyiapkan promosi dan pengembangan ekonomi berbasis keunggulan komoditas masing- masing wilayah	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Urusan Pilihan Pariwisata	■	■	■	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dan dapat berasal dari otsus	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota untuk Pengembangan Ekonomi	1	1	1	1
		Meningkatkan prestasi melalui kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan, terutama sukses prestasi PON XX tahun 2020 dan pengembangan industri olah raga Indonesia	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	■	■	■	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	1	1	1	1
		Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	■	■	■	Belanja APBD provinsi terutama yang bersumber dari otsus, untuk Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	1	1	1	1

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KEWENANGAN			KEBIJAKAN BELANJA			WILAYAH ADAT						
						BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA						
S14 Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	Memperkuat integrasi perencanaan pembangunan dengan perencanaan tata guna lahan, kewilayahan serta sektor sehingga prioritas pembangunan dapat terarah, terukur dengan jelas, dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	■	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2	2	2	2	2
S15 Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan melalui pengawasan kinerja dan pemberantasan korupsi yang tegas	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	■	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	■	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/kota	■	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	■	Program Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2	2	2	2	2
S14 Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	Peningkatan pembiayaan melalui kerjasama dengan berbagai pihak dalam pemenuhan infrastruktur	Program Kerjasama Pembangunan	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■	Program Kerjasama Pembangunan	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■	Program Kerjasama Pembangunan	Program Kerjasama Pembangunan	■	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■	Program Kerjasama Pembangunan	1	1	3	3	3
S15 Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	Bantuan pembiayaan infrastruktur bagi kabupaten/kota yang diprioritaskan pada peningkatan konektivitas dalam rangka pengembangan rantai nilai hulu-hilir komoditi unggulan	Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■	Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■	Program Kerjasama Pembangunan	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten / Kota (Dana Infrastruktur)	■	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten / Kota (Dana Infrastruktur)	2	2	2	2	2

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT						
					PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA		
		Pembangunan dan pengembangan kluster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan	Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Urusan Pilihan Pertanian	■	■	Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota untuk Pengembangan Ekonomi							
			Program Peningkatan Produksi Pertanian/ perkebunan	Urusan Pilihan Pertanian	■	■	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ perkebunan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota untuk Pengembangan Ekonomi			1	1	1	1	1
			Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Urusan Pilihan Pertanian	■	■	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota untuk Pengembangan Ekonomi							
		Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur pertanian, peternakan, dan perikanan	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	■	■	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota			1	1	1	1	1

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT			
						BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA	
S17	Menoptimalkan peranan sektor pertambangan dalam mengatasi ketimpangan pendapatan	Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas	Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan Mineral dan Batubara	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	■	Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan Mineral dan Batubara	1	1	1	1	1	1	
			Program pembinaan dan pemutakhiran sistem data dan informasi energi dan sumber daya mineral	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	■	Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal	1	1	1	1	1		
S18	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	Pembangunan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK) di lima wilayah adat, serta Politeknik berbasis potensi unggulan	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	■	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	1	1	1	1	1	
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	Urusan Wajib	■	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2	2	2	2	2	2	
			Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	■	Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim							

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KEWENANGAN		KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT			
						BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO
		Pengendalian pengelolaan lingkungan hidup	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA & LH	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	■	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	1	1	1	1	1	1	1
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	■	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1	1	1	1	1	1	1
		Konservasi sungai dan danau	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	■	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	2	2	2	2	2	2	2
		Perbaikan tata kelola perizinan berbasis SDA dan lahan skala luas	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	■	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1	1	1	1	1	1	1
S20	Membangun struktur perekonomian yang kokoh berbasis pada penciptaan nilai tambah yang optimal dan berkelanjutan	Peningkatan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah (value added) komoditas	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	■	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1	1	1	1	1	1	1
		Peningkatan industri non pertanian (off farm) yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dan daerah	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Urusan Pilihan Perindustrian	■	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1	1	1	1	1	1	1

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT						
							BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA		
		Menjaga nilai tukar dan daya beli petani, peternak, dan nelayan (BULOG PROVINSI)	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Urusan Pilihan Perdagangan	■	■	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan			1	1	1	1	1	
			Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Urusan Pilihan Perdagangan	■		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri								
		Melaksanakan kebijakan pengembangan industri hilir pertanian, peternakan, dan perikanan dengan diberikan insentif dalam pengembangannya	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Urusan Pilihan Perindustrian	■	■	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kabupaten/Kota Bidang ekonomi			1	1	1	1	1
		Pembangunan dan pengembangan kluster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	■	■	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota Bidang ekonomi			1	1	1	1	1
S21	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumber daya secara berkelanjutan	Pembangunan dan pengembangan kluster ekonomi berbasis wilayah adat dengan komoditi lokal unggulan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	■	■	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota Bidang ekonomi			1	1	1	1	1
			Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	■	■	Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota Bidang ekonomi			1	1	1	1	1
		Peningkatan dan pemenuhan infrastruktur pertanian, peternakan, dan perikanan	Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	■	■	Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota Bidang ekonomi			1	1	1	1	1

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	KEWENANGAN			KEBIJAKAN BELANJA			WILAYAH ADAT								
			PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA				
			Program pengendalian dan pemanfaatan ruang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■	Program pengendalian dan pemanfaatan ruang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■	Program pengendalian dan pemanfaatan ruang		1	3	1	3	3		
			Pengendalian pemanfaatan ruang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■	Program Perencanaan Tata Ruang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■	Program Perencanaan Tata Ruang								
			Program pengendalian dan pemanfaatan ruang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■	Program pengendalian dan pemanfaatan ruang	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	■	Program pengendalian dan pemanfaatan ruang		1	1	1	1	1	1	
S26 Meningkatkan ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	Penyediaan dan pengelolaan air baku	Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum & air limbah	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	■	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	■	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	1	1	1	1	1	1	
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum & air limbah	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	■	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum & air limbah	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	■	Program Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	1	1	1	1	1	1	1
			Program Pengendalian Banjir	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	■	Program Pengendalian Banjir	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	■	Program Pengendalian Banjir	Program Pengendalian Banjir	2	2	2	2	2	2	2

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT					
						KABUPATEN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIMA HA
						URUSAN	BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIMA HA
S27 Meningkatkan pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Program Pengembangan Perumahan	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	■	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	■	1	1	1	1	1	
								1	1	1	1	1	
S28 Meningkatkan ketersediaan energi murah dan energi baru terbarukan	Ketersediaan air bersih, sistem sanitasi, pengelolaan persampahan, dan air limbah	Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Program Pelayanan Air Bersih	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	■	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	■	2	2	2	2	2	
								2	2	2	2	2	
S29 Meningkatkan jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah	Peningkatan akses informasi dan komunikasi di seluruh wilayah	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	■	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	■	2	2	1	1	1	
								2	2	1	1	1	

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT				
							BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIMA HA
		Penguatan kapasitas kelembagaan kampung dalam meningkatkan efektivitas dan alokasi anggaran kampung	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	■	■	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	1	1	1	1	1
S31	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	Akselerasi dan afirmasi pendidikan dengan melaksanakan Program Pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	■	■	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./ Kota	2	2	1	1	1
			Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	■	■	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./ Kota	2	2	1	1	1
			Program Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	■	■	Program Pendidikan Menengah Atas dan Kejuruan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./ Kota					
			Program Pendidikan Non Formal	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	■	■	Program Pendidikan Non Formal	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./ Kota					
		Pemenuhan rumah layak huni untuk OAP	Program Pengembangan Perumahan	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	■	■	Program Pengembangan Perumahan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	1	1	1	1	1
		Penguatan kemandirian kampung untuk pemenuhan kebutuhan pangan (menghindari ketergantungan dari luar)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	■	■	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	1	1	1	1	1
		Perlindungan sosial untuk generasi emas, lanjut usia, dan difabel	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	■	■	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	2	2	1	1	1

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT			
							BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LAPAGO
S32 Meningkatkan percepatan pembangunan wilayah perbatasan	Percepatan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di daerah tertinggal, daerah perbatasan, daerah terluar dan tertentu.	Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	■	■	Program Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan	■	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	1	1	1	1
S33 Meningkatnya pemberdayaan terhadap KAT dan bantuan sosial PMKS	Perlindungan sosial untuk generasi emas, lanjut usia, dan difabel	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	■	■	Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	■	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	2	2	1	1

TUJUAN / PRIORITAS DAERAH	SASARAN STRATEGIS	STRATEGI (57)	PROGRAM PRIORITAS	URUSAN	PROVINSI	KABUPATEN	KEBIJAKAN BELANJA		WILAYAH ADAT				
							BELANJA LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG	MAMTA	SAERERI	MEE PAGO	LA PAGO	ANIM HA
S34	Meningkatnya kapasitas ketanggahan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat	■	■	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	2	2	2	2	2
S35	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	Mengurangi kesenjangan gender dengan meningkatkan kebijakan pemihakan kepada perempuan dan pengarusutamaan gender dalam strategi pembangunan.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	■	■	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	2	2	2	2	2
			Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	■	■	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota	2	2	2	2	2
			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	■	■	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Belanja Dana Otonomi Khusus Bagian Kab./Kota					

Keterangan:

 = Prioritas 1

 = Prioritas 2

 = Prioritas 3

BAB III

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan



3.1. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kerangka pendanaan merupakan pengembangan suatu skenario penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam jangka menengah untuk pembiayaan program-program pembangunan daerah yang akan berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan strategis lainnya.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagaimana diuraikan pada bab III, maka kerangka pendanaan pembangunan daerah yang didasarkan pada perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan didistribusikan pada program-program pembangunan daerah dan program perangkat daerah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.1 KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK MENDANAI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019 - 2023

No	URAIAN	PROYEKSI				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Kapasitas Riil	7.255.261.423.794	7.617.186.263.819	7.998.045.576.910	8.397.947.855.655	8.817.845.498.338
B	Penggunaan Kapasitas Riil					
B.1.	Prioritas I					
	Belanja Langsung Program Prioritas untuk pencapaian visi dan misi Daerah Tahun 2019-2023	6.430.049.506.775	6.782.667.977.702	7.169.619.560.589	7.664.855.849.333	7.997.844.012.015
B.2.	Prioritas II					
02.01	Belanja Langsung 6 Program Rutin pada seluruh Perangkat Daerah	825.211.915.000	834.518.284.098	828.426.014.300	733.092.004.300	820.001.484.300

TABEL 3.2 PENGALOKASIAN PENDANAAN PROGRAM PRIORITAS MENURUT URUSAN KEWENANGAN DALAM RPJMD PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023

No	Bidang Urusan Pemerintahan	2019	2020	2021	2022	2023
I	Program Rutin Seluruh Perangkat Daerah	825.212	834.518	828.426	733.092	820.001
II	Program Prioritas Daerah dan Perangkat Daerah	6.430.050	6.782.668	7.169.620	7.664.856	7.997.844
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	350.389,00	345.550,79	449.364,00	449.364,00	462.864,00
2	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan	731.628	921.432	922.504	929.364	956.604
	• Dinkes	163.113	161.813	170.124	170.624	171.624
	• RSUD Jayapura	336.543	435.521	409.450	421.260	434.900
	• RSUD Abepura	189.465	272.000	284.000	277.000	288.500
	• Rumah Sakit Jiwa	42.506	52.098	58.930	60.480	61.580
3	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.150.582	1.176.518	2.056.329	2.439.848	2.551.929
4	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	23.300	25.500	630.500	635.500	640.500

No	Bidang Urusan Pemerintahan	2019	2020	2021	2022	2023
5	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	15.106	31.468	31.561	33.223	39.132
	• KesbangPol	5.100	12.700	11.775	11.975	16.500
	• Satpol PP	10.006	18.768	19.786	21.248	22.632
6	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	22.850	27.250	27.500	28.250	27.500
7	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	11.000	9.925	11.500	10.775	11.625
8	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.907	6.877	6.580	6.715	6.030
9	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan	24.600	26.500	28.200	29.950	32.750
10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan	1.113	1.550	1.571	1.550	2.200
11	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	28.800	28.800	30.100	33.100	36.100
12	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.050	4.950	4.950	4.950	4.950
13	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	10.980	11.750	12.950	13.950	14.950
14	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
15	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	270.174	398.482	612.504	599.534	648.734
16	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	60.346	53.500	52.000	54.500	57.000
17	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16.292	26.086	24.917	24.802	26.249
18	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	13.100	17.700	22.450	21.200	22.950
19	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	2.173.240	1.641.818	143.756	140.097	151.547
20	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Statistik	800	1.000	1.000	1.000	1.000
21	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
22	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	18.400	20.850	23.950	23.950	44.650
23	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan	2.157	2.298	2.548	2.298	3.548
24	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan	780	800	880	880	880
25	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	34.695	61.320	65.350	69.845	66.510
26	Urusan Pilihan Pariwisata	14.291	18.650	18.700	18.850	19.650
27	Urusan Pilihan Pertanian	120.060	129.934	143.284	127.265	147.330
	• Sub Urusan Pertanian Tanaman Pangan	44.624	62.900	63.000	63.100	63.100
	• Sub Urusan Perkebunan	45.213	28.098	44.434	28.315	49.180
	• Sub Urusan Peternakan	30.223	38.936	35.850	35.850	35.050
28	Urusan Pilihan Kehutanan	92.403	89.732	90.768	97.703	101.045
29	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	135.886	254.250	229.900	232.400	234.100

No	Bidang Urusan Pemerintahan	2019	2020	2021	2022	2023
30	Urusan Pilihan Perdagangan	11.190	26.520	20.820	20.870	20.870
31	Urusan Pilihan Perindustrian	10.192	14.472	14.472	15.530	23.580
32	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	962.628	1.283.346	1.360.466	1.462.555	1.513.678
	• Sub Urusan Sekretariat Daerah	424.587	668.711	707.032	808.187	854.962
	• Sub Urusan Sekretariat DPRD	300.000	351.071	351.071	351.071	351.071
	• Sub Urusan Penghubung Daerah	734	734	734	734	734
	• Sub Urusan Sekretariat MRP	200.000	210.000	246.000	246.000	246.000
	• Sub Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29.307	44.980	45.630	45.564	45.912
	• Sub urusan Penanggulangan Bencana Daerah	8.000	7.850	10.000	11.000	15.000
33	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan	18.797	23.374	24.757	26.121	27.356
34	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan	28.500	25.300	24.970	28.200	20.150
35	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan	38.264	47.448	49.617	53.615	51.682
	• Sub Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	28.079	29.487	29.577	29.670	29.762
	• Sub Urusan Pendapatan Daerah	10.185	17.961	20.040	23.945	21.920
36	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian	18.332	18.332	18.332	18.332	18.332
37	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan	5.120	5.486	6.670	4.870	5.970
III	Total Anggaran Belanja Langsung Program	7.255.261	7.617.186	7.998.046	8.397.948	8.817.845

3.2. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program pembangunan dalam RPJMD terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang pelaksanaan janji dan program prioritas kepala daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta program prioritas pembangunan lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), mendukung program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dan prioritas pembangunan nasional, yang selanjutnya dijabarkan dan diimplementasikan dalam program prioritas yang bersifat operasional pada perangkat daerah serta program- program tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhannya terinci pada tabel berikut ini :

TABEL 3.3 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Peringkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan		
				2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta
				Target	Awal (2018)	Target	2019	Target	2020	Target	2021	Target	2022	Target	2023			
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN																	
	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	90,43	92,27	0	94,14	1.000	1.000	98,01	1.000	1.000	100	1.000	100	4.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	
		Persentase OAP usia dini yang mengikuti PAUD	persen	89	40	1.388	43,51	1.500	47,33	1.500	51,48	1.500	56	15.000	56	20.888		
PR (F1)	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/ sederajat	persen	79,83	80,84	1500	81,86	1500	82,89	1500	83,94	1500	85	1500	85	7.500	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/ sederajat	persen	56,76	57,39		58,03		58,68		59,34		60		60			
		Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI/Paket A/ sederajat	persen	0,49	0,43		0,37		0,33		0,29		0,25		0,25			
		Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs/ sederajat	persen	1,17	1,14		1,1		1,07		1,03		1		1			
		Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik	persen	23,59	24,75		25,97		27,25		28,59		30		30			
		Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik	persen	23,49	24,67		25,91		27,21		28,57		30		30			

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja					
				Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Urusan Kewenangan
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target		
		Angka Putus Sekolah (APTS) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat	persen	0,84	0,76	0,68	0,61	0,55	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5				
		Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMA/SMK/MA dengan kondisi bangunan baik	persen	34,82	35,8	36,81	37,84	38,9	40	40	40	40	40				
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	murid per guru	14,62	16,27	18,12	20,17	22,46	25	25	25	25	25				
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengahatas/kejuruan	murid per sekolah	250,47	239,45	228,91	218,84	209,21	200	200	200	200	200				
		Persentase siswa SMA/SMK OAP yang lulus dengan nilai UAN di atas rata-rata	persen	n/a	35	37.500	45,83	52,44	60	60	60	60	60	225.867	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan		
		Cakupan siswa lulusan OAP yang diterima di PTN siswa OAP	per 1000	n/a	200	200	200	200	200	200	200	200	1000				
		Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	persen	74,95	75,93	76,93	77,94	78,96	80	80	80	80	80	141.313	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan		
		Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	persen	90,24	91,17	92,12	93,07	94,03	95	95	95	95	95				
		Jumlah PKBM aktif	unit	398	411	420	434	443	448	448	448	448	448				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja						Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan		
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta		Target	Rp.juta
				Target	TARGET	Target	TARGET	Target	TARGET	Target	TARGET	Target	TARGET					
		Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	persen	76,28	77,58	78,9	80,24	81,61	83	83			83					
		Persentase guru SMA/ SMK yang bersertifikat pendidik	persen	76,43	77,89	79,37	80,89	82,43	84	84			84					
		Persentase guru SMLB yang bersertifikat pendidik	persen	61,56	63,16	64,81	66,49	68,22	70	70			70					
		Cakupan Guru SMK pemegang sertifikat keahlian khusus	persen	46,67	48,4	50,2	52,06	54	56	56			56					
PR (F1)	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan Kurikulum Muatan Lokal Papua yang dikembangkan dalam proses pembelajaran	persen	2,5	5	100,00	7	94,442	10	94,442	15	94,442	20	94,442	20	477,767	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan	
		Cakupan model Pendidikan Sekolah Kontekstual Papua yang dikembangkan	unit per tahun	10	2	2	4	4	5	17			17					
		Jumlah kemitraan pendidikan yang dikembangkan dengan lembaga sosial dan agama	unit	18,68	23,27	28,98	36,1	44,96	56	56			56					
		Cakupan PBM Sekolah yang disupervisi dan dimonitoring	persen	75,38	71,03	66,93	63,07	59,43	56	56			56					

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan						
				Target	Target	2019		2020		2021		2022		2023					
				Rp.juta	Rp.juta	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target		Target	Target	Target	Rp.juta	Rp.juta	
	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Capaian peserta program afirmasi pendidikan yang difasilitasi	orang per tahun	n/a	250	20.000	250	19.727	250	19.727	250	19.727	250	19.727	250	19.727	1250	98.908	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Capaian Siswa peserta ADEM/ADIK yang difasilitasi	orang	795	903	1025		1164		1322		1500		1500		1500			
		Capaian Sekolah Program Khusus yang terbina	unit per tahun	n/a	10	10		10		10		10		10		50			
		Cakupan siswa lulus Sekolah Luar Biasa	persen	3,59	4,40	5,40		6,64		8,15		10,00		10,00		10,00			
		Rasio kecukupan rombel terhadap siswa SLB	rasio siswa SLB per rombel	11,78	13,09	14,56		16,18		17,99		20,00		20,00		20,00			
		APM pendidikan khusus	persen	n/a	10,00	10,52		11,07		11,64		12,25		12,25		12,25			
PR (F1)	Program Pendidikan Menengah Kejuruan	Persentase Anak Asli Papua penerima Beasiswa Pendidikan Jenjang SMK	persen	32,67	35,57	105,00	38,73	103,69	42,17	103,69	45,92	103,69	50	103,69	50	103,69	50	519,782	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
		Capaian SMK yang dikembangkan sesuai dengan potensi 5 Wilayah Adat	sekolah per tahun	n/a	2	2		2		2		2		2		10			
	Program Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S1 yang lulus tepat waktu	persen	86,59	88,21	89,86	0	91,54	0	93,26	0	95,00	0	95,00	0	95,00	0	0	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan		
				2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			
		Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S2 yang lulus tepat waktu	persen	61,56	63,16	64,81	66,49	68,22	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00			
		Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S3 yang lulus tepat waktu	persen	52,23	54,57	57,01	59,56	62,22	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00			
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	persen	21,14	21,86	22,61	23,38	24,17	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00			
2 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KESEHATAN																		
Sub Urusan Dinkes																		
		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	persen	80	82	11.108	70	11.108	80	11.108	90	11.108	90	11.108	90	11.108	55.539	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Persentase Penyaluran Alat Kesehatan (PAK) yang diawasi	persen	n/a	58	68	78	88	100	100	100	100	100	100	100	100		
PR (F1)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan distrik yang sudah memiliki puskesmas	persen	9,59	12,04	15,13	19,01	23,88	28,75	33,60	38,40	43,20	48,00	52,80	57,60	62,40	14.084	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Cakupan puskesmas terakreditasi	persen	6,45	7,13	7,88	8,7	9,61	10,62	11,73	12,88	14,08	15,33	16,58	17,83	19,08	10,62	
		Cakupan puskesmas pembantu	per 100.000 penduduk	102,05	110,22	119,05	128,58	138,88	149,37	159,86	170,35	180,84	191,33	201,82	212,31	222,80	150	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan		
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta		Target	Rp.juta
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target					
PR (F1)	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan masyarakat yang terakses pelayanan sanitasi baik	persen	34,12	35,22	556	36,36	556	37,54	556	38,75	556	40	556	40	2.779	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)	
		Cakupan keluarga terakses air bersih	persen	39,52	40,61		41,72		42,87		44,04		45,25		45,25			
PR (F1)	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	API Malaria	persen	51,35	44,69	11.159	38,89	9.859	33,85	15.000	29,46	15.000	25,64	15.000	25,64	66.018	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)	
		Tingkat prevalensi Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	56,3	50,48		45,27		40,59		36,4		32,64		32,64			
		Tingkat prevalensi DBD	persen	86,37	80,5		75,03		69,93		65,17		60,74		60,74			
		Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR)	per 100.000 penduduk	39,83	37,78		35,83		33,98		32,23		30,57		30,57			
		Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	per 1.000 penduduk	11,7	11,1		10,53		10		9,48		9		9			
		Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 1.000 penduduk	45,36	42,86		40,5		38,28		36,17		34,18		34,18			
		Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	persen	n/a	10		15		20		25		30		30			
		Persentase pelayanan kesehatan terhadap penduduk yang terdampak KLB	persen	n/a	65		75		85		95		100		100			

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan						
				Target	Target	2019		2020		2021		2022		2023					
				Rp.juta	Rp.juta	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target		Target	Target	Rp.juta	Rp.juta		
	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan lembaga mitra di 5 wilayah adat	kab./kota	6	7	510	510	9	510	510	12	510	14	510	16	510	16	2.550	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Prevalensi penyalahgunaan narkoba	persen	n/a	25		20		15		10		5		5		5		
		Unmeet need pelayanan kesehatan	persen	2,93	3,26		3,63		4,04		4,49		5		5		5		
PR (F1)	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Cakupan Keluarahan/ Kampung Universal Child Immunization (UCI)	persen	62,15	62,71	2.660	63,27	2.660	63,84	2.660	64,42	2.660	65	2.660	65	2.660	65	13.300	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	persen	10,02	8,89		7,88		6,99		6,2		5,5		5,5		5,5		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	persen	31,35	29,96		28,64		27,37		26,16		25		25		25		
		Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	persen	1,38	1,18		1,02		0,88		0,76		0,65		0,65		0,65		
		Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	persen	n/a	20		20		25		25		40		40		40		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				
		Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 klh	7,13	6,35	5,66	5,04	4,49	4	4	4						
		Rasio posyandu yang aktif	persen	64,6	65,64	66,71	67,79	68,88	70	70	70						
		Cakupan kunjungan bayi (KN1)	persen	49,4	49,91	50,42	50,94	51,47	52	52	52						
		Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi	persen	46,95	47,92	48,91	49,92	50,95	52	52	52						
		Cakupan balita OAP yang bergizi baik	persen	n/a	40	1330	46,01	1330	60,86	1330	70	1330	70	1330	70	6.650	Urusan Wajib Pelayanan Dasar kesehatan
		Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia	persen	n/a	35	660	40	660	55	660	55	660	55	660	55	3.300	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
PR (F1)	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 klh	6,38	5,81	450	5,29	450	4,82	450	4,39	450	4	450	4	2.250	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	kasus	259,08	232,25	208,21	186,65	167,32	150	150	150						
		Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen	43,6	46,47	49,54	52,81	56,29	60	60	60						
		Cakupan pelayanan nifas	persen	37,19	38,64	40,14	41,7	43,32	45	45	45						
		Persentase ibu hamil (OAP) yang rutin melakukan pemeriksaan K3	persen	n/a	25	750	28,12	750	31,62	750	35,57	750	40	750	40	3.750	Urusan Wajib Pelayanan Dasar kesehatan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				
		Persentase bayi OAP baru lahir yang memperoleh pelayanan kesehatan	persen	n/a	60	63,44	67,08	70,93	75	75							
PR (F1)	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Cakupan kabupaten/kota yang memiliki data profil kesehatan secara lengkap	persen	27,59	34,92	47,20	44,2	47,20	55,95	47,20	70,83	47,20	89,66	47,20	89,66	23.600	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD kabupaten/kota yang memiliki RENSTRA yang berkualitas	persen	60	60	65	65	70	65	75							
PR (F1)	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat	persen	n/a	70	78.841	75	78.841	80	78.841	90	78.841	100	78.841	100	394.207	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen	36,68	38,21	39,81	41,47	43,2	45	45							
		Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	persen	6,9	13,79	20,69	27,59	34,48	41,38	41,38							
PR (F1)	Program Sumber Daya Kesehatan	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang memiliki Rumah Sakit	jumlah per tahun	21	21	28.541	22	28.541	24	28.541	25	28.541	27	28.541	27	142.705	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)
		Cakupan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit rujukan di 5 wilayah adat	unit	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	8		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				Target
		Rasio puskesmas, poliklinik, pusku per satuan penduduk	per 30.000 penduduk	25	25,77	26,57	27,39	28,23	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1	29,1				
		Rasio rumah sakit per 100.000 penduduk	per 100.000 penduduk	1,41	1,78	2,24	2,83	3,57	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5				
		Rasio dokter per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	25,06	26,02	27,02	28,05	29,13	30,25	30,25	30,25	30,25	30,25	30,25				
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	1,05	1,08	1,11	1,14	1,17	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2				
		Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih untuk PON	orang	n/a	250	250	-	-	-	-	-	-	-	250				
		Cakupan kecukupan laboratorium dalam mendukung pelayanan kesehatan	persen	70	75	80	85	90	90	90	90	90	90	90	60.305	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)		
PR (F1)	Program Pengembangan Data/Informasi	Cakupan ketersediaan data bidang kesehatan di tingkat provinsi yang valid dan reliabel	persen	85	85	90	90	95	95	95	95	95	95	95	16.225	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)		
	Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Cakupan pasien penyakit jiwa yang tertangani	persen	n/a	40	43	50	55	60	60	60	60	60	60	4000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (sub urusan Dinkes)		
		Cakupan Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	kabupaten per tahun	1	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Kewenangan					
				Target	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Target						
				Rp.juta	Rp.juta	Rp.juta	Rp.juta	Rp.juta	Rp.juta	Rp.juta	Rp.juta						
		Cakupan rumah sakit yang sudah terakreditasi	persen	56	57	58	59	59	60	60	60						
RSUD Jayapura																	
PR (F1)	Program Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD Jayapura)	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target	persen	60	60	19.118	65	20.000	70	20.000	75	20.000	80	20.000	80	99.118	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (RSUD Jayapura)	Cakupan advokasi pelayanan kesehatan pada masyarakat	persen	0	45	600	47	1.750	50	1.750	55	1.750	60	1.750	60	7.600	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Jayapura)
PR (F1)	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD Jayapura)	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target	persen	60	60	10.591	65	8.671	70	6.600	80	7.190	100	8.488	100	41.540	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Jayapura)
PR (F1)	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paripuru/Rumah Sakit Mata (RSUD Jayapura)	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana RSUD Jayapura sesuai dengan standar pelayanan minimal	persen	n/a	80	177.782	80	200.000	85	200.000	90	200.000	100	200.000	100	977.782	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Jayapura)

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan		
				2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta
				Target	TARGET	Target	TARGET	Target	TARGET	Target	TARGET	Target	TARGET			
PR (F1)	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit di RSUD Jayapura	Cakupan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit di RSUD Jayapura	persen	60	13.620	65	55.700	70	22.900	75	24.440	80	26.134	80	142.794	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Jayapura)
PR (F1)	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan (RSUD Jayapura)	Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD kabupaten/kota yang memiliki RENSTRA yang berkualitas	persen	60	426	65	0	65	0	70	0	75	0	75	426	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Jayapura)
PR (F1)	Program upaya kesehatan perorangan (RSUD Jayapura)	Cakupan OAP yang sudah memiliki dan memanfaatkan Kartu Papua Sehat	persen	70	114.006	75	149.000	80	157.800	90	167.480	100	178.128	100	766.414	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Jayapura)
		Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen	38,21	35,21	39,81		41,47		43,2		45		45		
PR (F1)	Program Sumber Daya Kesehatan (RSUD Jayapura)	Rasio dokter per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	26,02	25,06	27,02	400	28,05	400	29,13	400	30,25	400	30,25	2000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Jayapura)
		Rasio tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	1,08	1,05	1,11		1,14		1,17		1,2		1,2		
		Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih untuk PON	orang	250	n/a	250		-		-		-		-	250	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				Target
RSUD Abepura																		
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat (RSUD Abepura)	Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target	persen	60	60	65	60.000	70	70.000	80	70.000	75	70.000	80	70.000	80	325.463	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Abepura)
PR (F1)	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan (RSUD Abepura)	Cakupan pelayanan kesehatan RSUD yang telah sesuai standar nasional	persen	60	65	8.000	8.000	75	9.000	85	1.000	90	11.000	90	37.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan		
		Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) rumah sakit yang mencapai target	persen	60	60	65	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80		
PR (F1)	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata (RSUD Abepura)	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana RSUD Abepura sesuai dengan standar pelayanan minimal	persen	n/a	95	122.50	2	95	200.00	95	200.00	0	200.00	95	200.00	95	922.502	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Abepura)

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Peringkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja						Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
				Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			
PR (F1)	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata (RSUD Abepura)	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	unit	n/a	6	3.500	6	4.000	6	5.000	6	6.000	6	7.500	6	26.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSUD Abepura)	
Rumah Sakit Jiwa																		
PR (F1)	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin (RSJ)	Cakupan pelayanan masyarakat miskin pada RSUD dan RSJ	persen	12,6	15,87	50	20	50	25,2	50	31,75	50	40	50	40	250	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSJ)	
PR (F1)	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata (RSJ)	Tingkat kecukupan sarana dan prasarana RSJ sesuai dengan standar pelayanan minimal	persen	n/a	80	22.242	80	26.023	85	30.500	85	30.750	85	29.950	85	139.464	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSJ)	
PR (F1)	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata (RSJ)	Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakitmata	unit	n/a	5	75	5	75	10	80	10	80	10	80	10	390	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan (RSJ)	

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Peringkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				Target
	Program Pembangunan turap/talud/bronjong	Persentase turap/talud/bronjong yang berfungsi baik dalam mencegah longsor di tebing jalan/sungai	persen	n/a	90	23.000	95	25.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	100.000	100	348.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	n/a	34	60.000	38	60.000	40	200.000	45	200.000	50	200.000	55	200.000	55	720.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap	persen	n/a	40		45		50		55		60		60		60		
PR (F2)	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengaliran lainnya	Daerah irigasi provinsi yang berfungsi	hektar	n/a	1000	20.000	2.000	20.000	3.000	100.000	4.000	100.000	5.000	100.000	39.600	100.000	39.600	340.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentas luas lahan yang terlayani irigasi	persen	n/a	75	80	80	85	85	90	90	95	95	95	95	95	95	95	
		Tingkat produktifitas lahan sawah yang terpenuhi irigasi	ton per hektar	46,82	49,2	51,7	51,7	54,33	54,33	57,1	57,1	60	60	60	60	60	60	60	
		Cakupan layanan air bersih	persen	48	50	52	52	54	54	56	56	60	60	60	60	60	60	60	
		Terpeliharanya sumber air	sungai/ lokasi	n/a	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	100	100	100	
		Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik	m	n/a	40	50	50	60	60	70	70	80	80	80	80	80	80	80	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja						Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan		
				2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			
PR (F3)	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Cakupan keterlayanan air baku	persen	n.a	30	1.000	35	2.000	40	5.000	45	7.000	50	9.000	50	24.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
PR (F3)	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan keterlayanan air bersih	persen	40,19	41,98	100.000	43,86	100.000	45,82	100.000	47,86	100.000	50	100.000	50	500.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan air minum	persen	n.a	50	70	70	70	90	90	100	100	100	100	100	100		
		Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	persen	70,86	72,6	74,38	74,38	74,38	76,21	76,21	78,08	78,08	80	80	80	80		
		Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	n.a	25	50	50	50	75	75	100	100	100	100	100	100		
PR (F3)	Program Pengendalian Banjir	Cakupan kawasan rawan abrasi yang tertangani	persen	n/a	30	10.000	35	0	40	150.000	45	200.000	50	200.000	50	560.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Cakupan kawasan rawan banjir yang tertangani	persen	n/a	50	55	55	55	60	60	65	65	70	70	70	70		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Kewenangan
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Cakupan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang dikembangkan	persen	30	30.000	35	0	40	200.000	45	200.000	50	200.000	50	630.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program pembangunan infrastruktur pedesaan	Cakupan pengembangan infrastruktur pedesaan	persen	45	11.422	-	0	-	0	55	100.000	70	100.000	70	211.422	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Panjang jalan dalam kondisi mantap	km	10	350.000	20	463.526	20	533.190	20	425.000	30	425.000	100	2.196.716	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang jembatan dalam kondisi mantap	meq	30	n/a	30	30	30	30	30	30	30	30	150		
	Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	Cakupan perencanaan teknis jalan dan jembatan	persen	60	10.000	65	10.000	70	44.225	75	42.369	80	44.225	80	150.820	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PR (F9)	Program Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun	dokumen	1	2.000	-	0	-	0	-	0	-	0	1	2.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pembinaan dan Pengembangan Konstruksi	Cakupan pembinaan dan pengembangan konstruksi	persen	80	1.000	-	0	-	0	-	0	-	0	80	1.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan		
				2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			
	Program Pemanfaatan Ruang	Cakupan pelaksanaan pemanfaatan ruang	persen	100	900	-	0	-	0	-	0	-	0	100	900	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PR (F9)	Program pengendalian dan pemanfaatan ruang	Cakupan ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang	persen	80	600	85	600	90	600	95	600	100	600	100	3.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN																
PR (F3)	Program Pengembangan Perumahan	Rumah Layak huni yang terbangun	unit	356	0	3.000	0	3.000	400.000	3.000	400.000	3.000	400.000	12.356	1.200.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	persen	n/a	60	65	70	75	80	80	80	80	80	80	80	
		Persentase penduduk relokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni	persen	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Cakupan penduduk OAP yang memiliki rumah layak huni	persen	n/a	30	32,24	0	34,64	200,00	37,22	200,00	40	200,00	40	600.000	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Peringkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan				
				Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				Target	
PR (F3)	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Prosentase penduduk yang terakses lingkungan sehat	persen	n/a	50	6.300	50	7.000	50	7.000	50	7.000	50	7.000	50	7.000	50	34.300	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Persentase lingkungan permukiman yang sehat	persen	30	30	35	40	45	50	50	50	50	50	50	50	50	50		
	Program Pemberdayaan komunitas Perumahan	Komunitas perumahan yang diberdayakan	komunitas per tahun	n/a	5	13.500	5	15.000	5	20.000	5	25.000	5	30.000	25	103.500	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/ sosial	Penyelesaian perbaikan perumahan akibat bencana alam/ sosial	unit per tahun	n/a	50	3.500	50	3.500	50	3.500	50	3.500	50	3.500	250	17.500	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
		Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	persen	n/a	40	60	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan					
				2019		2020		2021		2022			2023				
				Target	TARGET Rp.juta	Target	TARGET Rp.juta	Target	TARGET Rp.juta	Target	TARGET Rp.juta		Target	TARGET Rp.juta			
5	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
Sub Urusan Kesbangpol																	
	Program Pemeliharaan Kantrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (Kesbangpol)	Jumlah konflik horisontal	kasus	10	10	0	6	1.775	2	1.900	2	1.900	2	7.350	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Kesbangpol)		
		Cakupan penegakan Perda	persen	80	80		100	100	100	100	100	100	100	100			
		Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda	persen	n/a	100		100	100	100	100	100	100	100	100			
PR (F5)	Program Pengawasan Kebangsaan	Jumlah Pertemuan FKUB per tahun	kali per tahun	n/a	2	750	2	4.075	2	4.050	2	3.800	2	3.800	10	16.475	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Kesbangpol)
		Cakupan peserta yang mengikuti kegiatan bela negara, pembauran kebangsaan, dan wawasan kebangsaan	orang per tahun	n/a	250		250	250	250	250	250	250	250	250	1.250		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan		
				Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			
		Cakupan fasilitas Forkompimda	kali per tahun	n/a	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25			
		Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HAM	persen	n/a	2	500	2	1.500	2,25	1.500	2,5	1.500	3	1.500	3	6.500	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Kesbangpol)	
		Persentase penanganan kasus pelanggaran HAM	persen	20	20	30	30	40	50	50	50	50	50	50	50			
		Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat Masyarakat (Pekat) (Kesbangpol)	persen	65	70	1.350	75	1.350	80	1.350	85	1.350	85	1.350	85	6.750	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Kesbangpol)	
PR (F5)		Cakupan muatan pendidikan politik dan demokrasi dalam pendididkan menengah	persen	n/a	3	2.000	3	3.075	5	2.150	5	2.475	10	7.000	10	16.700	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
		Persentase lembaga dan partai politik yang dibina	persen	n/a	70	75	80	85	90	90	90	90	90	90	90			

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Keterangan Urusan Kewenangan			
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				Target
	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	persen	40	45	47,51	50	6.216	55	6.378	60	6.740	65	6.976	65	31.061	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Satpol PP)	
		Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	rasio	65,67	67,97	70,35	72,81	75,36	78	78	78	78	78	78	78			
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) (Satpol PP)	Cakupan penertiban dan penanggulangan penyakit masyarakat	persen	65	70	790	75	2.335	80	2.507	85	2.782	85	2.990	85	11.404	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Satpol PP)	
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam (Satpol PP)	Prosentase Pelayanan Pemulihan Terkena Dampak Bencana Korban Bencana Alam (Satpol PP)	persen	n/a	85	783	90	1.716	95	1.800	100	2.031	100	2.251	100	8.581	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Satpol PP)	
		Cakupan Kampung dengan status Tangguh Bencana	persen	n/a	60	65	70	75	80	80	80	80	80	80	80			

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan	
				Target	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Target		
				Rp.juta	Rp.juta	Rp.juta	Rp.juta	Rp.juta	Rp.juta	Rp.juta	Rp.juta		
		Cakupan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	lokasi	2	2	2	2	2	2	2	2		
		Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana	persen	80	85	90	95	100	100	100	100		
		Tingkat fasilitas penanganan pasca bencana	persen	80	80	90	90	100	100	100	100		
		Cakupan pengembangan EWS (<i>early warning systems</i>) kebencanaan	persen	20	25	30	35	40	40	40	40		
		Persentase penanganan krisis kesehatan akibat dan atau potensi bencana	persen	80	85	90	95	100	100	100	100		
	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Persentase peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	persen	n/a	10	2.278	10	4.280	10	4.743	10	19.763	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertarikan dan Keterlibatan Umum serta Perlindungan Masyarakat (sub urusan Satpol PP)
		Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) kabupaten/kota dalam daerah layanan	persen	28	32	36	45	50	50	50	50		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				Target
		Cakupan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan yang terampil	persen	40	45	50	55	60	65	65	65	65	65					
6 URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR SOSIAL																		
PR (F1)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentase KAT yang mandiri	persen	n/a	25	11.150	30	11.650	35	11.650	40	11.650	45	11.650	50	57.750	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	
		Persentase KAT yang memperoleh bantuan sosial	persen	n/a	40	45	50	55	60	60	60	60	60	60	60	60		
		Persentase PMKS yang tertangani	persen	n/a	30	35	40	45	50	50	50	50	50	50	50	50		
		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen	28,51	32,51	37,08	42,29	48,23	55	55	55	55	55	55	55	55		
		Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pelatihan keterampilan usaha	KK	n/a	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1.000		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				Target
		Persentase panti sosial yang menerima pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama	persen	n/a	70	75	75	80	80	85	90	90	90		90			
		Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen	n/a	65	70	75	75	80	85	85	85	85		85			
		Cakupan ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan	persen	n/a	80	85	90	90	95	100	100	100	100		100			
PR (F1)	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Cakupan Pengembangan jaminan sosial bagi lanjut usia dan orang dengan kecacatan	persen	n/a	30	35	40	40	45	50	50	50	50	2.200	50	8.900	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	
		Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	persen	n/a	15	20	25	25	30	35	35	35	35		35			
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah kelembagaan sosial masyarakat yang aktif	Kelompok	n/a	20	25	30	30	35	40	40	45	7.200	45	27.550	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial		
		Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Keluarga miskin	persen	n/a	50	60	70	70	80	80	90	90	90		90			

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Peringkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan		
				Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			
		Cakupan Kabupaten/Kota yang terakses perlindungan dan jaminan sosial	kab/kot a	9	12	15	18	21	24	24								
		Cakupan keluarga OAP yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	per 1000 keluarga	n/a	250	250	3.250	250	1.800	250	1.800	250	1.800	250	1.800	1.250	9.550	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
PR (F1)	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti	Cakupan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	orang	n/a	50	4.850	50	5.350	50	5.550	50	5.550	50	5.550	250	26.850	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	
		Jumlah anak dan remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	orang	n/a	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	1.250			
		Cakupan penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	persen	n/a	30	35	40	45	50	50	50	50	50	50	50	50		
		Cakupan Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	persen	n/a	60	65	70	75	80	80	80	80	80	80	80	80		
	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya kualitas perencanaan kesejahteraan sosial	persen	n/a	70	650	75	1.000	80	1.000	85	1.000	90	1.000	90	4.650	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan	
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				
		Cakupan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas dalam bidang kesejahteraan sosial	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10		
7 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA																	
PR (F1)	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan balai diklat tenaga kerja yang terserap	persen	n/a	80	1.500	85	1.350	90	2.150	95	2.150	100	2.600	100	9.750	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
		Frekuensi promosi bursa tenaga kerja	kali	n/a	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10		
		Persentase peserta pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang terserap dalam lapangan kerja	persen	n/a	80	2.000	80	2.000	85	2.000	85	2.000	90	2.000	10.000	10.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
		Persentase Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten/kota yang terakreditasi	persen	n/a	25	25	25	25	30	40	40	40	50	50	50		
		Persentase kenaikan UMP	persen	n/a	1,5	1,5	1,5	2,3	3,5	4	4	4	4	4	4		
		Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	persen	n/a	30	35	35	40	50	60	60	60	60	60	60		
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	77,44	77,95	5.150	78,46	4.225	78,97	4.650	79,48	4.275	80	4.325	80	22.625	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				Target
		Tingkat pengangguran terbuka	persen	2,91	2,7	2,5	2,32	2,16	2	2	2							
		Cakupan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Ketenagakerjaan industrial	persen	n/a	40	1.350	45	1.350	55	1.350	60	1.350	60	1.350	60	3.750	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	
		Cakupan perusahaan yang menerapkan norma K3	persen	n/a	60	65	70	75	80	80								
		Persentase peningkatan kinerja organisasi ketenagakerjaan	persen	n/a	60	150	70	150	90	150	100	150	100	150	100	750	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	
		Pertumbuhan ekonomi wilayah transmigrasi	persen	n/a	5,50	300	5,60	300	5,70	300	5,80	300	5,90	300	6,00	1.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	
		Jumlah transmigran lokal yang ditempatkan	orang	n/a	500	500	500	500	500	900	500	500	500	900	2500	3.450	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja	
8 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
		Proporsitas pengarusutamaan gender dalam pembangunan	persen	n/a	80	250	85	300	90	300	95	300	100	300	100	1.180	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan				
				2019		2020		2021		2022		2023			
				Target	TARGET Rp.juta	Target	TARGET Rp.juta	Target	TARGET Rp.juta	Target		TARGET Rp.juta	Target	TARGET Rp.juta	
		Persentase Posyandu Aktif	persen	89	90	90	92	93	95	95	95				
		Cakupan penguatan kader Posyandu di kampung	persen	n/a	80	100	90	100	100	100	100				
PR (F5)	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan (urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan KB)	Cakupan wirausaha perempuan binaan yang berkembang	orang	150	3.121	150	2.600	150	2.600	150	2.600	750	13.521	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	
		Persentase PKK aktif	persen	n/a	80	85	90	95	100	100	100				
		Cakupan wirausaha perempuan binaan yang berkembang	orang	n/a	150	150	150	150	150	150	150		750		
9 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PANGAN															
PR (F7)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Prevalensi penduduk OAP dengan kerawanan pangan sedang	persen	n/a	20	10.800	14,14	11.500	10	12.250	7,07	12.975	5	61.850	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
		Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	15	15	10.800	15	11.500	20	12.250	20	12.975	25	61.850	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Peringkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				Target
	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanian	Persentase penyelesaian konflik pertanian	persen	n/a	60	500	65	650	70	725	75	650	80	725	80	3.250	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanian	
11	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR LINGKUNGAN HIDUP																	
	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terangkut ke TPA	persen	9,38	10	300	10	300	20	300	30	300	40	300	40	1.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	
		Penyediaan prasarana dan sarana TPA/TPST/SPA lintas kabupaten/kota	lokasi	n/a	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		Cakupan pengelolaan sampah di kawasan strategis dan perkotaan	persen	n/a	20	30	30	40	40	45	50	50	50	50	50	50		
PR (F9)	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan dan pengendalian kualitas air	titik sungai	n/a	20	17.750	20	17.750	20	19.000	20	22.000	20	25.000	100	101.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup	
		Cakupan lokasi pemantauan dan pengendalian kualitas udara	lokasi per kab/kota	n/a	20/5	40/8	40/8	50/10	50/10	50/10	50/10	50/10	50/10	50/10	50/10			
		Proporsi degradasi lahan yang tercemar	persen	5,57	4,54	3,7	3,7	3,01	2,45	2	2	2	2	2	2			
		Tingkat ketaatan pemegang ijin lingkungan	persen	n/a	60	65	65	70	75	80	80	80	80	80	80			

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Peringkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan						
				2019		2020		2021		2022			2023					
				Target	TARGET Rp.juta	Target	TARGET Rp.juta	Target	TARGET Rp.juta	Target	TARGET Rp.juta		Target	TARGET Rp.juta				
PR (F9)	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	Jumlah SDM bidang LH yang tersertifikasi	orang	12	3.600	12	3.600	12	3.600	12	3.650	16	3.650	20	3.650	20	18.150	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
		Jumlah PPLHD yang dilatih dan bina	orang	2	0	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	5		
PR (F9)	Program Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terfasilitasi kegiatan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	persen	n/a	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	500	100	2.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup
12 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
PR (F6)	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Ketersediaan database ada/tidak kependudukan skala provinsi	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	3.600	Ada	4.500	Ada	4.500	Ada	4.500	Ada	4.500	Ada	21.600	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Cakupan penduduk ber-KTP elektronik	persen	67,42	70,75	74,24	77,90	81,75	85,78	85,78	85,78	85,78	85,78	85,78	85,78	85,78		
		Persentase kepemilikan KK elektronik	persen	31,91	34,28	36,83	39,57	42,51	45,67	45,67	45,67	45,67	45,67	45,67	45,67	45,67		
		Persentase kepemilikan akta kelahiran	persen	45,77	47,54	49,38	51,29	53,28	55,34	55,34	55,34	55,34	55,34	55,34	55,34	55,34		
		Persentase pasangan berakte nikah	persen	40	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan		
				Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			
PR (F8)	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung	Cakupan lembaga yang diperkuat kapasitas kelembagaannya di distrik dan kampung	persen	n/a	35	2.800	45	3.100	65	3.350	85	3.600	100	3.850	100	16.700	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		Cakupan jumlah kampung yang mendapatkan bantuan penguatan Lembaga Masyarakat Adat	kampung	n/a	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50			
		Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang berprestasi	persen	n/a	10	15	20	25	30	30	30	30	30	30	30			
		Cakupan penguatan kader Posyandu di kampung	persen	n/a	70	800	80	1.000	90	1.000	100	1.000	100	1.000	100	4.800	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	
PR (F5)	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan kelompok Keluarga Pra Sejahtera I binaan yang naik menjadi Keluarga Sejahtera I	persen	n/a	40	1.380	60	1.300	80	1.500	100	1.500	100	1.500	100	7.180	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		Persentase PKK aktif	persen	n/a	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100			

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				Target

Prosentase pengarusutamaan gender dalam pembangunan	persen	n/a	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Urusan
---	--------	-----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------

14 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	per 1.000 penduduk uk	11,7	11,1	0	10,53	300	10	300	9,48	300	9	300	9	300	9	1.200	Urusan
---	-----------------------	------	------	---	-------	-----	----	-----	------	-----	---	-----	---	-----	---	-------	--------

Prevalensi penyalahgunaan narkoba	persen	n/a	25	20	15	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	Urusan
-----------------------------------	--------	-----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

Program persiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	persen	n/a	20	0	25	300	30	300	35	300	40	300	40	300	40	1.200	Urusan
--	--------	-----	----	---	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-------	--------

Tenaga penyuluh KB yang terlatih	orang per tahun	n/a	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	150	Urusan
----------------------------------	-----------------	-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	--------

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	kelompok per tahun	n/a	100	1.300	100	1.300	100	1.300	100	1.300	100	1.300	100	1.300	500	6.500	Urusan
---	--------------------	-----	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	--------

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Peringkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				Target
	Program pelayanan kontrasepsi	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmet need</i>)	persen	3,26	3	1.000	3	1.000	3	1.000	2,5	1.000	2,25	1.000	2,25	5.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Persentase pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	persen	60	60	70	65	75	80	80	80	80	80	80	80			
15 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERHUBUNGAN																		
PR (F3)	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Cakupan integrasi antar moda angkutan antar wilayah adat	wilayah adat	1	1	9.894	2	48.421	2	62.950	3	15.800	3	65.000	3	202.066	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	
PR (F3)	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan pelayanan moda angkutan	persen	20	20	375	25	750	30	550	35	550	40	550	40	2.775	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	
		Tingkat kecelakaan kendaraan bermotor	jiwa	200	180	160	160	120	140	100	100	100	100	100	100	100		
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Tersedianya angkutan untuk pelayanan transportasi	unit	n.a	4	5.670	14	8.841	18	2.450	20	2.450	22	2.450	22	21.861	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan					
				Target	Target	2019		2020		2021			2022		2023		
				Rp.juta	Rp.juta	Target	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target		Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	
PR (F3)	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah bandara pengumpul dengan skala pelayanan primer	unit	7	1	250.000	1	334.835	1	545.820	1	580.000	1	580.000	5	2.290.655	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
		Jumlah dermaga penyeberangan Kelas II	unit	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5		
		Jumlah pelabuhan strategis provinsi	unit	6	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	2		
		Jumlah terminal Tipe B yang fungsional	unit	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10		
		Pertumbuhan arus penumpang angkutan udara	persen	5	5	5	6	6	7	7	7	7	7	7	7		
		Pertumbuhan arus penumpang angkutan laut	persen	n.a	2,5	2,5	3	3	3,50	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5		
		Cakupan ketersediaan fasilitas Keselamatan Jalan	persen	n.a	60	4.000	65	5.151	70	200	75	200	80	200	80	9.751	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
		Jumlah balai/alat pengujian kendaraan bermotor yang beroperasi	unit	n.a	1	234	1	234	1	234	1	234	1	234	1	1.172	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
		Jumlah kendaraan bermotor yang dilakukan uji petik	unit	n.a	100	100	120	120	130	140	140	150	150	150	150		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan				
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				Target	
	Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perhubungan	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kegiatan infrastruktur perhubungan	persen	n.a	100	0	100	250	100	300	100	300	100	300	100	300	100	1,150	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan

16 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PR (F3) (F10)	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya Komunikasi dan Informasi melalui Media Massa	media	n/a	2	8.139	2	2.298	2	2.883	2	3.469	2	4.054	2	20.843	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	
		Terlaksananya pengembangan komunikasi dan informasi di Lingkungan Pemda	media	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		Persentase penduduk yang mengakses internet	persen	17,05	17,6	5.000	18,17	5.000	18,76	5.000	19,37	5.000	20	5.000	20	25.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	
		Cakupan pemenuhan kebutuhan akses internet dalam pelaksanaan PON	mbps	n/a	50	100	3.200	5.000	-	0	-	0	0	0	3.200	5.100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	
	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Persentase SDM Aparatur yang memahami IT	persen	n.a	40	500	50	1.000	60	2.000	70	2.000	80	2.000	80	7.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp.juta	2019		2020		2021		2022		Target	Rp.juta
						Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta		
		Jumlah Kelompok Masyarakat yang memahami IT	kelompok	n.a	2	4	5	5	6	7	8				
		Cakupan SDM Kominfo yang kompeten di bidang teknologi informasi	persen	n.a	60	65	70	75	80	80					
		Jumlah kerjasama media dalam mempublikasikan hasil pembangunan Mass Media	kerjasama per tahun	n/a	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
													19.827		
													Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika		
		Cakupan Layanan PPID	persen	20	20	40	50	50	70	70					
		Persentase jaringan teknologi informasi antar OPD yang terintegrasi	persen	n/a	10	10	20	37.051	40	40.287	10	20	38.815	20	
													42.344		
													199.076		
													Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika		
		Cakupan wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi	persen	n/a	20	25	30	35	40	40					
17 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH															
		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	kegiatan per tahun	n/a	1	0	1	900	1	900	1	900	1	900	
													5		
													3.600		
													Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan						
				2019		2020		2021		2022			2023					
				Target	TARGET Rp.juta	Target	TARGET Rp.juta	Target	TARGET Rp.juta	Target	TARGET Rp.juta		Target	TARGET Rp.juta				
PR (F2)	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha Baru	persen	n/a	7	6.512	14	9.495	21	8.450	28	7.205	35	7.550	35	39.212	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	persen	n/a	25	3.452	25	4.825	25	4.150	25	4.525	25	4.850	25	21.802	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat (Koperasi Sehat Yang Melaksanakan RAT)	persen	n/a	30	6.328	35	10.866	40	11.417	45	12.172	50	12.949	50	53.730	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		Jumlah kelompok pra koperasi yang akan di fasilitasi menjadi koperasi	unit	n/a	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50			
18 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PENANAMAN MODAL																		
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya jumlah perusahaan PMA/PMIDN yang menanamkan modalnya di Papua	perusahaan	n/a	50	3.900	104	6.700	158	7.200	212	7.700	272	8.200	272	33.700	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	
		Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan	persen	6,5	7	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	8			

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				Target
		Persentase UMKM lokal yang bermitra dengan PMA/ PMDN	persen	n/a	15	20	25	30	35	35								
		Frekwensi promosi potensi investasi Papua dalam ajang pameran tingkat nasional/ internasional	kali	n/a	5	5	5	5	5	5								
		Persentase investasi yang direalisasikan dari ajang promosi nasional/ internasional	persen	n/a	40	50	60	70	80	80								
		Proporsi biaya transaksi dalam total investasi	persen	n/a	5	1.500	3	1.700	2	4.900	2	2.100	1	2.300	1	12.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	
PR (F2)		Lama waktu penerbitan izin investasi	hari	60	40	3.700	30	4.300	10	4.650	10	5.000	10	5.350	10	23.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	
		Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	skor	65	67	68	70	72	74	77								
		Pertumbuhan nilai investasi	persen	n/a	7	1.000	14	1.100	21	1.200	28	1.300	35	1.400	35	6.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Peringkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				Target
PR (F2)	Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal	Persentase hasil pemantauan perusahaan investasi yang ditindaklanjuti	persen	n/a	65	3.000	70	3.900	75	4.500	80	5.100	85	5.700	85	22.200	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal	
19 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																		
PR (F10)	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Jumlah pemuda yang dilatih dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	orang per tahun	n/a	250	5.111	250	5.391	250	5.746	250	6.092	250	6.547	1.250	28.887	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	
		Jumlah organisasi kepemudaan	organisasi	49	51	53	55	57	59	59	59	59	59	59	59			
		Cakupan pengusaha muda asli Papua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	persen	20	25	25	30	35	50	50	50	50	50	50	50			
		Cakupan pengusaha muda asli Papua yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	persen	20	25	1.200	25	1.750	30	1.875	35	1.950	50	2.025	50	8.800	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	
PR (F10)	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Jumlah organisasi olahraga yang dibina	organisasi	40	40	8.768	40	9.865	50	7.385	50	7.655	50	7.925	50	41.598	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	
		Cakupan monitoring atlet berprestasi	persen	n/a	80	85	90	95	95	95	95	95	95	95	95			

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				Target	Target	2019		2020		2021		2022			2023		
				Rp.juta	Rp.juta	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target		Target	Target	Rp.juta
PR (F10)	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Cakupan atlet yang diseleksi untuk mengikuti berbagai event olahraga nasional maupun internasional	orang	n/a	20	75.000	20	51.850	30	57.250	30	57.900	40	58.550	40	300.550	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kemudahan dan Olah Raga
PR (F10)	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah gedung olahraga standar internasional yang terbangun	unit	n/a	10	500.000	10	432.081	-	0	-	0	-	0	10	932.081	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kemudahan dan Olah Raga
		Jumlah lapangan olahraga standar internasional yang terbangun	unit	n/a	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	
		Cakupan penyelesaian sarana dan prasarana PON Papua	persen	75	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
		Cakupan venue berstandar internasional	persen	60	90	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	
	Pengembangan Prasarana PON	Cakupan penyelesaian Stadion utama untuk mendukung penyelenggaraan PON XX	persen	50	100	150.000	0	25.000	100	100	100	100	100	100	100	175.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kemudahan dan Olah Raga
	Program Penyelenggaraan Kompetisi/Pekan Olahraga/Kejuaraan Olahraga	Frekwensi penyelenggaraan even olahraga persiapan PON XX yang berjalan sukses	kali	n/a	5	75.000	-	50.000	-	30.000	-	30.000	-	30.000	5	215.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kemudahan dan Olah Raga

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				
	Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas untuk Penyelenggaraan PON XX/2020	Persentase hasil koordinasi penyelenggaraan PON XX yang ditindaklanjuti	persen	n/a	100	29.261	100	43.925	100	0	0	0	0	100	73.186	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	
	Program Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional dan Internasional	Jumlah venue PON XX yang berstandar internasional	gedung	n/a	2	300.000	0	0	0	0	0	0	0	2	300.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga	
	Program mendorong partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan	Persentase pengarusutamaan pemuda dalam perencanaan pembangunan	persen	n/a	25	3.900	30	1.200	35	1.500	40	1.500	45	1.500	45	9.600	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Pembinaan Atlet Muda dan Olahraga Prestasi nasional	Persentase atlet muda Pelatda (Pusat Pelatihan Daerah) yang berprestasi nasional	persen	n/a	100	25.000	100	50.000	100	40.000	100	35.000	100	45.000	100	195.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
	Program Persiapan Penyelenggaraan PON XX 2020	Persentase persiapan PON XX	persen	n/a	85	1.000.000	100	970.756	-	0	-	0	-	0	100	1.970.756	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD					
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	Target	Rp.juta		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target						
20	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR STATISTIK																		
	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Jumlah Rekomendasi Kajian/Survei Statistik Sektoral yang memenuhi kriteria "layak"	rekomen-dasi per tahun	2	800	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000	10	4.800	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika	
		Cakupan ketersediaan data SIPD	persen	70	75	80	85	90	95	95	95	95	95	95	95	95	95		
		Cakupan dokumen analisis kinerja pembangunan daerah yang berkualitas	dokumen per tahun	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	25		
21	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERSANDIAN																		
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah	Cakupan pengelolaan pelayanan persandian daerah	persen	n/a	100	1.800	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	1.000	100	5.800	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Persandian
22	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KEBUDAYAAN																		
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Lembaga Pengelola kekayaan budaya	lembaga	n/a	5	2.000	5	2.150	5	2.150	5	2.150	5	2.150	5	2.150	10.600	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan	
		Frekuensi Festival Kebudayaan Malanesia yang berstandar internasional	kali per tahun	n/a	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	7	7		
		Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	jumlah per tahun	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5		

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Peringkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
				Target	TARGET	Target	TARGET	Target	TARGET	Target	TARGET	Target	TARGET			
		Frekwensi pertunjukan, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilm yang berstandar nasional	kali per tahun	5	5	5	7	7	7	7	7	7	7	31		
		Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2			
		Cakupan kelompok seni dan budaya asli Papua yang dibina	persen	40	40	45	45	50	50	50	50	50	50			
		Jumlah kerjasama dengan pihak potensial dalam pengembangan seni dan budaya Papua Kekayaan Budaya	kerjasama ma per tahun	n/a	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	26.800	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kebudayaan
		Jumlah Pengembangan Kurikulum Bahasa Ibu di 5 Wilayah Adat	kurikulum	n/a	1	3	3	4	4	5	5	5	5	5	55.400	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
		Jumlah pengelolaan keragaman budaya	kegiatan	n/a	2	3	3	3	3	3	3	3	3	13	39.000	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
		Cakupan partisipasi Papua dalam festival seni dan budaya tingkat nasional maupun internasional	kali per tahun	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				
23	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR PERPUSTAKAAN																		
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Standar Nasional yang Dibangun	unit	n/a	0	0	1	500	5	2.000	5	2.000	5	2.000	5	2.000	5	6.500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan	persen	n/a	85	250	85	250	90	250	90	250	95	250	95	250	95	1.250	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Layanan Perpustakaan umum daerah provinsi secara konvensional dan elektronik	orang per tahun	108991	30.000	1.907	25.000	2.048	25.000	2.298	25.000	2.048	25.000	3.298	130.000	0	11.600		
24	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR KEARSIPAN																		
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Pemenuhan penyelenggaraan kearsipan di Papua pada 7 aspek kearsipan	dokumen per tahun	n/a	2	330	2	330	2	330	2	330	2	330	2	330	10	1.650	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan	persen	n/a	70	450	75	470	80	550	85	550	90	550	90	550	90	2.570	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan		
				Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			
25	URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	kelompok	n/a	4	5.350	8	6.925	12	7.585	16	8.205	20	3.280	20	31.345	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	
		Persentase meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan	persen	n/a	1,25	1,50	1,75	1,80	2	2	2	2	2	2	2	2		
		Cakupan kabupaten/kota yang memiliki POKMASWAS berfungsi	kab/kota	n/a	8	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13		
	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Cakupan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam laut	persen	n/a	50	1.000	60	1.000	70	1.000	80	1.000	90	1.000	90	5.000	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	
PR (F2)	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Terwujudnya pengembangan budidaya perikanan	kelompok okper tahun	n/a	6	2.853	6	11.225	6	12.225	6	14.425	6	14.725	30	55.453	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	
		Produksi perikanan budidaya	ton	118,46	124,19	130,19	136,49	143,08	150	150	150	150	150	150	150	150		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan					
				2019		2020		2021		2022			2023				
				Target	TARGET	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target		Rp.juta	Target	Rp.juta		
PR (F2)	Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton	7.499,31	7.596,88	1.083	7.695,71	6.325	7.795,83	7.100	7.897,26	8.175	8.000,00	8.875	8.000,00	31.558	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Cakupan penyuluhan fungsional yang mempunyai kompetensi perikanan memadai	persen	60	65	0	70	375	75	430	80	485	85	525	85	1.815	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
		Persentase meningkatnya penyuluhan perikanan lapangan	persen	n/a	15	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Persentase kenaikan pemasaran hasil produksi perikanan	persen	n/a	2,5	385	2,5	750	2,75	850	3	950	3	1.000	3	3.935	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar	Produksi perikanan budidaya	ton	118,46	124,19	4.881	130,19	4.924	136,49	4.895	143,08	4.900	150	4.910	150	24.510	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
	Program Pengembangan Data dan Informasi	Cakupan ketersediaan data perikanan dan kelautan	persen per tahun	n/a	20	1.007	20	650	20	800	20	950	20	1.100	100	4.507	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
	Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran	Nilai ekspor produk perikanan	Rp. juta	39.613,97	41.502,35	1.265	43.480,75	6.546	45.553,46	7.265	47.724,97	7.555	50.000,00	7.895	50.000,00	30.526	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta	
				Target	TARGET	Target	TARGET	Target	TARGET	Target	TARGET	Target	TARGET				
		Nilai investasi sektor perikanan yang direalisasikan	Rp. juta	6976,15	7169,86	7368,95	7573,57	7783,86	8000	8000	8000		8000				
PR (F7)	Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap	Cakupan unit pengembangan pelabuhan perikanan yang berfungsi	unit per tahun	n/a	2	300	2	600	4	1200	4	1200	8	1200	20	4500	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
	Program Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)	Cakupan peningkatan kinerja UPTD Perikanan	persen	n/a	1,20	11715	1,50	12000	2,00	12000	2,25	12000	2,50	12000	2,50	59715	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
PR (F4)	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen	n/a	60	4.856	65	10.000	70	10.000	75	10.000	80	10.000	80	44.856	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
		Cakupan nelayan OAP yang memiliki Kartu Nelayan	Per 1000 nelayan	173	234,99	319,2	433,58	588,95	800	800							
26 URUSAN PILIHAN PARIWISATA																	
PR (F10)	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan PON yang terlayani	ribu orang	n/a	n/a	2.000	150	2.500	-	2.500	-	2.500	-	2.500	150	12.000	Urusan Pilihan Pariwisata

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Peringkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				Target
		Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan	juta hektar	2,86	3,06	3,27	3,5	3,74	4	4								
		Cakupan pengembangan agroindustri terpadu hortikultura	persen	10	15	20	25	30	35	40	45	45	45	45	45	45	45	45
		Tingkat swasembada pangan	persen	n/a	25	30	35	40	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
		Tingkat kemampuan petani lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat pertanian/ perkebunan	persen	n/a	25	30	35	40	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
		Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan tanaman pangan)																
		Frekwensi promosi produk pertanian	kali	n/a	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10
		Cakupan teknologi pertanian rakyat tepat guna yang diterapkan pertanian/ perkebunan	jenis	n/a	10	750	10	2.250	12	2.250	15	2.250	15	2.250	15	2.250	15	9.750
		Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan tanaman pangan)																
PR (F2)		Tingkat produktifitas tanaman pertanian	kg per hektar	489,26	493,34	3.500	497,46	3.500	501,60	3.500	505,78	3.500	510,00	3.500	510	510	510	17.500
		Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan tanaman pangan)																

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Cakupan penyuluh fungsional yang mempunyai kompetensi memadai	persen	60	65	7.211	70	15.000	75	15.000	80	15.000	85	15.000	85	67.211	Urusan Pilihan pertanian (sub urusan tanaman pangan)
	Program Perencanaan Pembangunan (Tanaman Pangan)	Terusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	persen	n/a	1	2.729	1	3.900	1	4.000	1	4.100	1	4.100	5	18.829	Urusan Pilihan pertanian (sub urusan tanaman pangan)
	Program Peningkatan Sumber daya Pertanian	Persentase peningkatan kemampuan penyuluh pertanian melalui diklat	persen	n/a	2	12.183	2	15.500	3	15.500	3	15.500	3	15.500	3	74.183	Urusan Pilihan pertanian (sub urusan tanaman pangan)
	Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Cakupan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura	kawasan	n/a	2	3.500	2	7.500	2	7.500	2	7.500	2	7.500	10	33.500	Urusan Pilihan pertanian (sub urusan tanaman pangan)
Sub Urusan Perkebunan																	
PR (F7)	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani (Perkebunan)	Cakupan bina kelompok tani	persen	n/a	20	1.850	20	2.300	20	3.075	20	3.275	20	3.500	100	14.000	Urusan Pilihan pertanian (sub urusan perkebunan)
		NTP perkebunan	persen	99,91	99,93	99,94	99,94	99,96	99,98	99,98	100	100	100	100	100		
		NTP tanaman pangan	persen	88,45	90,65	92,9	92,9	95,21	97,58	97,58	100	100	100	100	100		
PR (F7)	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Meningkatnya produksi perkebunan	Ha	n/a	0	400	100	2.550	100	2.750	200	3.525	200	4.175	200	13.400	Urusan Pilihan pertanian (sub urusan perkebunan)

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	ton	n/a	100	5.000	200	5.000	200	5.000	200	6.000	250	7.000	300	8.000	300	31.000	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan perkebunan)
		Tingkat kemampuan petani lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen	n/a	25	30	35	40	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	
		Frekwensi promosi produk perkebunan	kali	n/a	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	
		Persentase hasil produk tanaman pangan lokal berkualitas yang terserap	persen	n/a	5	2.875	5	2.875	5	2.875	10	4.025	10	5.075	15	5.825	15	20.650	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan perkebunan)
		Cakupan kelompok binaan tani lokal pemasok kebutuhan makanan sektor perkebunan yang berkembang	kelompok	n/a	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100		
	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Terlaksananya penerapan teknologi perkebunan tepat guna	kegiatan	n/a	1	500	1	575	1	600	1	950	1	1.000	5	3.625	5	3.625	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan perkebunan)

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja					
				Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Pada Akhir Periode RPJMD	
				Target	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target
	Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	Meningkatnya produksi komoditas perkebunan	Ha	n/a	2000	31.554	2.000	26.519	2.200	27.225	2.500	28.230	3.000	28.433	3.000	141.961	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan perkebunan)
		Tingkat produktifitas tanaman perkebunan	kg per hektar	489,26	493,34	497,46	501,60	505,78	510,00	510,00	510						
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Persentase Meningkatnya penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persen	n/a	15	500	25	1.600	25	2.200	30	2.810	30	3.350	30	10.460	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan perkebunan)
	Program Perencanaan Pembangunan (Perkebunan)	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	persen	n/a	1	1.984	1	2.240	1	2.455	1	2.430	1	2.445	5	11.554	Urusan Pilihan Pertanian(sub urusan perkebunan)
	Program Peningkatan Sumber daya Pertanian	Jumlah Sumber Daya Perkebunan yang ditingkatkan kemampuannya	kelompok	n/a	1	325	4	300	4	325	5	325	5	350	5	1.625	Urusan Pilihan Pertanian(sub urusan perkebunan)
	Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Jumlah Jenis Tanaman Spesifik lokal yang dikembangkan	bibit	n/a	10000	225	25.000	475	25.000	525	50.000	705	50.000	790	50.000	2.720	Urusan Pilihan Pertanian(sub urusan perkebunan)
Sub Urusan Peternakan																	
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	NTP peternakan	persen	99,91	99,93	1.500	99,94	500	99,96	500	99,98	500	100	500	100	3.500	Urusan Pilihan Pertanian(sub urusan peternakan)

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Peringkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan		
				Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.	kegiatan	n/a	10	5.250	10	7.500	10	7.550	10	7.600	10	7.850	50	35.750	Urusan Pilihan pertanian (sub urusan peternakan)	
		Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	persen	n/a	50	55	60	65	70	70	70	70	70	70	70			
PR (F2)	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan	persen	n/a	3,5	12.073	3,5	13.536	3,5	13.200	3,5	13.500	3,5	13.700	3,5	66.009	Urusan Pilihan pertanian (sub urusan peternakan)	
		Produksi hasil ternak besar/kecil/unggas	ton	31.277.043	32450255	33667475	34930354	36240603	37600000	37600000	37600000	37600000	37600000	37600000	37600000			
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Tingkat kemampuan peternakan lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen	30	32	2.900	34	9.250	36	6.250	38	6.250	40	6.250	40	30.900	Urusan Pilihan pertanian (sub urusan peternakan)	
		Cakupan teknologi peternakan tepat guna yang diterapkan	jenis	n/a	10	750	-	0	-	0	-	0	-	0	10	750	Urusan Pilihan pertanian (sub urusan peternakan)	
	Program Perencanaan Pembangunan (Peternakan)	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	persen	n/a	1	3.300	1	3.700	1	3.800	1	3.850	1	4.000	5	18.650	Urusan Pilihan pertanian(sub urusan peternakan)	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan		
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta		Target	Rp.juta
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target					
PR (F7)	Program Peningkatan Keamanan Pangan dan Ketahanan Pangan Asal Hewan	Cakupan penerapan standar keamanan pangan asal hewan	persen	10	10	1.550	10	1.550	15	1.550	15	1.550	25	1.550	25	7.750	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan peternakan)	
	Program Peningkatan Kelembagaan Penyuluh (Peternakan)	Prosentase peningkatan kinerja kelembagaan penyuluh	persen	n/a	20	1.500	25	1.500	30	1.950	25	1.500	50	500	50	6.950	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan peternakan)	
		Jumlah kelembagaan penyuluh yang meningkatkan kapasitasnya	unit	n/a	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	50			
	Program Peningkatan Kelembagaan Petani (Peternakan)	Prosentase peningkatan kinerja kelembagaan petani	persen	n/a	20	1.400	20	1.400	30	1.050	25	1.100	40	700	40	5.650	Urusan Pilihan Pertanian (sub urusan Peternakan)	
28 URUSAN PILIHAN KEHUTANAN																		
	Program Pemanfaatan Potensi Sumber DayaHutan	Nilai produksi sumber daya kehutanan	Rp milyar	2.120,4	2.191,4	9.450	2.264,81	9.050	2.340,6	9.400	2.419,0	9.450	2.500,0	10.200	2.500,0	47.550	Urusan Pilihan Kehutanan	
				5	4	4	1	4	1	0	0	0	0	0	0			
		Cakupan pengembangan industri kayu masyarakat adat	unit per tahun	n/a	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	50			

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Peringkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan				
				2019		2020		2021		2022		2023			Target Rp.juta	Target Rp.juta		
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target					
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	persen	26,41	27,09	18.000	27,79	18.000	18.000	28,51	18.000	29,24	18.000	30	18.150	30	90.150	Urusan Pilihan Kehutanan
		Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	4.641,81	4.761,77	4.884,83	5.011,07	5.140,57	5.273,42	3.000,00								
		Rasio pencapaian restorasi lahan gambut	persen	5	10	15	20	25	30	30								
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Luasan tutupan kawasan konservasi	Ha	7.755,2	7.755,2	21.490	7.755,2	20.105	7.755,2	21.490	7.755,2	23.232	7.755,2	105.236	84	84		Urusan Pilihan Kehutanan
	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Persentase luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	persen	n/a	30	5.100	35	5.000	40	4.500	45	5.100	50	5.350	50	25.050	Urusan Pilihan Kehutanan	
	Program Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Hutan	Jumlah Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	unit	17	17	38.363	17	38.763	17	38.763	19	43.663	19	44.113	19	203.665	Urusan Pilihan Kehutanan	
		Luasan hutan yang dikelola melalui Cabang Dinas Kehutanan (CDK) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	Ha	n/a	660	660	660	720	720	720	720	720	720	720	720	471.651		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				Target	TARGET	2019	2020	2021	2022	2023	Target	TARGET					
				Rp.juta	Rp.juta	Rp.juta	Rp.juta	Rp.juta	Rp.juta	Rp.juta	Rp.juta	Rp.juta					
29	URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																
	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Persentase hasil pengendalian dan pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pengusaha pertambangan	persen	n/a	80	1.000	85	1.000	90	1.000	95	1.000	100	1.000	100	5.000	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
		Cakupan kelompok penambang mineral non logam dan batuan yang dibina	persen	n/a	40	45	50	55	60	60	60	60	60	60	60	60	
		Persentase penambangan ilegal yang ditertibkan	persen	n/a	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Persentase pengembangan Sistem informasi sumber daya mineral	persen	n/a	25	50	75	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		Cakupan pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	persen	n/a	30	40	50	60	70	70	70	70	70	70	70	70	
	Program evaluasi dan koordinasi perencanaan program pembangunan	Meningkatnya kerjasama aparaturnya pemerintah	persen	n/a	60	700	70	1.800	80	1.800	90	1.800	100	1.800	100	7.900	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Peringkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta		Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target						
PR (F2)	Program pembinaan dan pemutakhiran sistem data dan informasi energi dan sumber daya mineral	Meningkatnya jumlah investasi di bidang pertambangan dan energi	persen per tahun	n/a	4	400	4	3.000	4	1.450	4	1.450	4	1.450	4	2.150	4	8.450	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
PR (F2)	Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan Mineral dan Batubara	Meningkatkan pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat	persen	n/a	30	1.604	50	4.200	70	4.200	90	4.200	100	4.200	100	4.200	100	18.404	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
		Cakupan Pengawasan dan Penertiban Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI)	persen	n/a	65		80		90		100		100		100		100		
		Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	persen	n/a	50	850	60	3.200	70	3.200	80	3.200	100	3.200	100	3.200	100	13.650	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
		Cakupan penelitian dan survey pelayanan geologi	persen	n/a	40		50		60		70		80		80		80		
PR (F3)	Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Cakupan ketersediaan energi murah dan ramah lingkungan	persen	n/a	0	0	15	9.400	20	2.900	25	2.900	30	2.900	35	2.900	35	18.100	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
		Tingkat elektrifikasi	persen	54,28	55,38		56,5		57,64		58,81		60		60		60		
		Persentase kampung terakses listrik	persen	45,46	48,05		50,79		53,69		56,76		60		60		60		

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan		
				2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta
				Target	TARGET	Target	TARGET	Target	TARGET	Target	TARGET	Target	TARGET			
		Cakupan pemenuhan listrik dalam pelaksanaan PON	persen	n/a	30	0	100	500	-	0	-	0	100	800	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	
		Meningkatnya Jumlah Penelitian dan Pengembangan Balai Latihan dan Laboratorium Pertambangan	persen	n/a	50	300	1.950	70	1.750	80	1.750	100	1.750	7.500	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	
		Meningkatnya ketersediaan bbm untuk nelayan	persen	n/a	100	2.935	10	3.800	10	4.850	10	4.850	10	4.850	21.285	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
		Meningkatnya ketersediaan bbm untuk nelayan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG)	Rp per liter	10.000	10.000	9.800	9.800	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	
PR (F3)		Pengembangan & Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	persen	n/a	0	128.098	5	90.400	10	73.750	15	73.750	20	73.750	439.748	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
		Jumlah RT yang terlayani PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)	rumah tangga	n/a	250	500	750	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	
		Jumlah RT yang terlayani PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)	rumah tangga	n/a	500	1.000	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	

No	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Peringkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				2019		2020		2021		2022			2023		
				Target	TARGET Rp.juta	Target	TARGET Rp.juta	Target	TARGET Rp.juta	Target	TARGET Rp.juta		Target	TARGET Rp.juta	
		Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan	kampung	n/a	100	200	400	500	500	500	500				
		Tersedianya dokumen sebagai sumberData ESDM	dokumen per tahun	n/a	-	10	135.00	10	137.50	10	138.50	40	546.000	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	
PR (F3)	Program Pelayanan Air Bersih	Meningkatnya ketersediaan air bersih	persen	n/a	50	4.427	52	12.750	54	13.350	56	13.750	60	57.727	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral
		Cakupan rumah tangga yang menggunakan air ledeng	per 1000 kk	n/a	125	180	300	380	380	380	380				
		Cakupan pemenuhan air bersih dalam pelaksanaan PON	m3/jam	n/a	n/a	250	432	500	-	0	-	0	100	750	
30 URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN															
		Terlaksananya Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Kegiatan	n/a	1	1.800	5	5.250	5	4.300	5	4.350	25	20.050	Urusan Pilihan Perdagangan
		Cakupan penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	persen	n/a	80	80	85	90	85	85	85	90	90	90	
		Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa	persen	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				2019		2020		2021		2022		2023		
				Target	TARGET Rp.juta	Target	TARGET Rp.juta	Target	TARGET Rp.juta	Target		TARGET Rp.juta	Target	TARGET Rp.juta

		Persentase peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua	n/a	2,5	3	3,25	3,5	4	4	4	
--	--	--	-----	-----	---	------	-----	---	---	---	--

31 URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN

PR (F2)	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan industri kecil dan Menengah yang dibina	n/a	50	8491,81	50	12192	50	12192	50	13300	50	21300	250	67475,81	Urusan Pilihan Perindustrian
		Sentra industri rakyat yang berfungsi	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5		
		Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	n/a	10	20	30	40	50	50	50	50	50	50	50		
		Cakupan industri kecil dan Menengah OAP yang dibina	n/a	50	60	70	80	90	90	90	90	90	90	90		
		Jumlah Jenis Komoditas Industri lokal yang dilabeli HAKI	n/a	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	15		
		Persentase IKM yang memiliki sertifikasi mutu barang	n/a	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25		
		Jumlah sentra industri rakyat	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan					
				Target	Target	2019		2020		2021			2022		2023		
				Rp.juta	Rp.juta	Target	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target		Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	
	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah industri yang menerapkan teknologi tepat guna	IKM	n/a	10	0	20	530	530	40	530	50	530	50	2.120	Urusan Pilihan Perindustrian	
	Program Penataan Struktur Industri	Cakupan penataan struktur industri	persen	n/a	40	1.300	50	1.350	70	1.300	80	1.350	80	1.350	80	6.650	Urusan Pilihan Perindustrian
	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Jumlah kawasan sentra industri rakyat	kawasan	n/a	1	400	1	400	2	400	2	400	2	400	2	2.000	Urusan Pilihan Perindustrian
		Persentase IKM yang memiliki sertifikasi mutu barang	persen	n/a	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25		
		Cakupan Industri kecil dan Menengah yang dibina	IKM per tahun	n/a	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	250		
32	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																
	Sub Urusan Sekretariat Daerah																
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Cakupan pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah	persen	100	100	300.00	100	500.00	100	534.57	100	634.57	100	684.57	100	2.653.728	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan sekretariat daerah)

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah Perdasi tentang pemerintahan yang ditetapkan	dokumen per tahun	n/a	5	4.200	5	4.700	5	5.000	5	5.000	5	5.000	5	4.550	25	23.450	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan tata pemerintahan)
	Program Pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan	Cakupan pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan	persen	n/a	100	2.700	100	3.500	100	3.500	100	3.500	100	3.500	100	3.500	100	16.700	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan tata pemerintahan)
PR (F8)	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung di Provinsi Papua	Jumlah aparatur kampung dan distrik yang mendapatkan pelatihan pemerintahan kampung	orang	n/a	250	1.600	250	1.700	250	1.700	250	1.700	250	1.700	250	1.750	1.250	8.450	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan tata pemerintahan)
		Cakupan kampung mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahannya	persen	40	45	50	55	60	65	65	65	65	65	65	65	65	65		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja						Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan		
				2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			
		Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur dasar di perbatasan	persen	n/a	30	36	42	42	50	50	60	60	60					
		Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana ekonomi di perbatasan	persen	n/a	40	42	45	47	50	50	50	50	50					
		Cakupan koordinasi pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan	persen	n/a	45	50	55	60	65	65	65	65	65	14.175	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			
		Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana Infrastruktur dasar di perbatasan	persen	n/a	30	36	42	42	50	50	60	60	60					
		Cakupan Ketersediaan Sarana Prasarana ekonomi di perbatasan	persen	n/a	40	42	45	47	50	50	50	50	50					
		Cakupan kerjasama antara negara di kawasan perbatasan yang diimplementasikan Negeri	persen	n/a	80	85	90	95	100	100	100	100	100	12.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan			

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan											
				2019		2020		2021		2022		2023										
				Target	TARGET Rp.juta	Target	TARGET Rp.juta	Target	TARGET Rp.juta	Target		TARGET Rp.juta	Target	TARGET Rp.juta								
		Persentase Produk Hukum Kabupaten/Kota se-Papua yang difasilitasi	persen	100	100	100	100	100	100	100	100											
		Terlaksananya dokumentasi dan informasi hukum	persen	100	100	250	100	250	100	250	100	250	100	250	100	250	100	250	100	250	1.250	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan hukum)
		Cakupan produk hukum daerah yang didesimiasi	persen	n/a	70	75	80	85	90	90	90										90	
PR (F6)	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan	Persentase OPD yang memiliki data uraian jabatan	persen	100	100	4.076	100	11.750	100	11.795	100	11.200	100	11.475	100	11.475	100	50.296	100	50.296	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan organisasi)	
		Persentase OPD yang memiliki SOP yang berkaitan dengan kinerja utama	persen	n/a	50	70	90	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		Cakupan OPD Provinsi Papua yang sudah dilakukan analisis dan/atau evaluasi jabatan	persen	n/a	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		Persentase Rekomendasi dari Analisa Beban Kerja yang ditindaklanjuti	persen	n/a	25	40	55	70	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan									
				Target	Target	2019		2020		2021		2022		2023								
				Rp.juta	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target		Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta				
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi	persen	n/a	25	1.455	35	1.455	900	1	900	1	1.455	50	1.455	71	1.455	100	1.455	100	7.275	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan perekonomian dan SDA)
	Program Peningkatan Kinerja BUMD	Tersedianya regulasi BUMD	dokumen per tahun	n/a	1	900	1	900	1	900	1	900	1	900	1	900	1	900	5	4.500	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan perekonomian dan SDA)	
		Terlaksananya pertemuan forum koordinasi mitra BUMD	acara per tahun	n/a	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	45			
		Terlaksananya koordinasi dan evaluasi kinerja BUMD	acara per tahun	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5			
		Tersedianya regulasi pengelolaan SDA	dokumen	n/a	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	15			
		Terlaksananya fasilitasi kemitraan swasta dan pelaku ekonomi	acara per tahun	n/a	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5			

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan		
				2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta		Target	Rp.juta
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target					
	Program peningkatan pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah	Peningkatan pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah	persen	100	100	520	100	520	100	520	100	520	100	520	100	2.600	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan humas dan protokol)	
	Program Pelayanan Informasi	Peningkatan pelayanan informasi publik pemerintah Provinsi Papua	persen	n/a	75	900	80	750	100	750	90	750	100	750	100	3.900	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan humas dan protokol)	
	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	Peningkatan kerjasama media dan publikasi pembangunan daerah	persen	n/a	50	5.160	60	4.810	70	5.160	65	5.160	75	5.160	75	25.450	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan humas dan protokol)	
		Jumlah media cetak nasional yang mempublikasi hasil pembangunan Papua	per tahun	n/a	5	5	5	5	8	8	8	8	10	10	10			

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				
	Program Pembinaan Mental Spiritual	Frekuensi koordinasi lembaga keagamaan dengan pemerintah	kali per tahun	n/a	5	900	5	900	5	900	5	950	5	950	5	4.600	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan		
	Program Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan	Rasio Tempat Ibadah Per satuan Penduduk	per 10.000 penduduk	27,16	27,71	1.210	28,26	1.210	1.210	28,83	1.210	29,41	1.210	30	1.210	30	6.050	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	
	Program Peningkatan dan Pembinaan di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan	Cakupan forum lintas agama tingkat provinsi yang berfungsi dan aktif	jumlah	n/a	2	720	2	870	2	870	2	870	2	870	2	970	2	4.350	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan kesejahteraan rakyat)

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan		
				Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			
	Program Pengembangan Data dan Informasi	Cakupan ketersediaan data ormas dan keagamaan	persen	n/a	80	200	90	200	200	200	100	100	200	100	200	100	1.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan kesejahteraan rakyat)
	Program Pemberdayaan Keagamaan	Cakupan kelompok keagamaan yang berfungsi dan aktif	jumlah	140	140	42.204	140	42.204	160	42.204	180	42.204	180	42.204	180	42.204	211.022	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan kesejahteraan rakyat)
		Rasio rumah ibadah yang mendapatkan bantuan dan pemberdayaan	persen	40	40	45	50	50	50	50	50	50	50	50	50	20		
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (sub urusan pengadaan barang dan jasa)	Persentase ASN peserta diklat teknis fungsional yang lulus dengan Predikat Memuaskan	persen	n/a	20	27.500	20	0	20	0	20	0	20	0	20	27.500	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan pengadaan barang dan jasa)	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)				Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				
	Program peningkatan kapasitas kelembagaan barang dan jasa	Cakupan pengadaan barang dan jasa melalui ULP	persen	n/a	80	0	90	31000	100	31000	100	34.050	100	34.600	100	130.650	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan pengadaan barang dan jasa)
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (sub urusan otonomi khusus)	Persentase ASN peserta diklat teknis fungsional yang lulus dengan Predikat Memuaskan	persen	n/a	20	300	20	300	20	300	20	300	20	300	20	1.500	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan Otonomi Khusus)
	Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Cakupan LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi	jumlah kab/kota	n/a	12	6.500	14	7.500	16	6.500	18	6.500	20	6.500	20	33.500	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan otonomi khusus)
	Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua	Cakupan siswa OAP yang mendapatkan bantuan beasiswa	persen	n/a	70	10.000	70	15.000	80	15.000	80	15.000	85	15.000	85	70.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan otonomi khusus)

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Peringkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				
		Jumlah SDM Papua yang mengikuti pelatihan dan magang	orang per tahun	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100	500					
Sub Urusan Sekretariat DPRP																			
PR (F6)	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Perdasi dan Perdasus yang ditetapkan	produk per tahun	n/a	5	300.00	5	351.07	5	351.07	5	351.07	5	351.07	5	351.07	25	1.704.284	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan sekretariat DPRP)
		Tingkat kehadiran Anggota dewan	persen	n/a	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		
		Persentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna	persen	n/a	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75		
		Persentase penetapan perdasus dan perdasus berdasarkan prolegda	produk per tahun	n/a	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25		
Sub Urusan Penghubung Daerah																			
		Program peningkatan pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	persen	100	100	358	100	358	100	358	100	358	100	358	100	358	100	1.790	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan penghubung daerah)

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan				
				Target	Target	2019		2020		2021		2022		2023			
				Rp.juta	Rp.juta	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target		Target	Target	Target	Rp.juta
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (sub urusan penghubung daerah)	Terlaksananya peningkatan kompetensi teknis/fungsional aparatur melalui pembinaan dan pengembangan	persen	n/a	100	76	100	76	100	76	100	76	100	76	100	380	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan penghubung daerah)
	Program Pengembangan Penataan dan Pentas Anjungan	Persentase peningkatan jumlah pengunjung Pentas Anjungan Papua	persen	n/a	2,5	50	2,75	50	3	50	3,25	50	3,5	50	250	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	
	Program Pembinaan Masyarakat dan Kemahasiswaan	Jumlah konsultasi dan konsolidasi pembinaan OAP dan Masyarakatan di Jakarta	kali per tahun	n/a	5	100	5	100	5	100	5	100	5	100	500	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan	
	Program Pelayanan Informasi	Tingkat pelayanan informasi publik pemerintah Provinsi Papua	persen	n/a	75	150	80	150	90	150	100	150	100	150	750	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan penghubung daerah)	

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				
Sub Urusan Sekretariat MRP																			
	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP	Tingkat kehadiran Anggota MRP	persen	n/a	95	200.00	0	95	210.00	0	95	246.00	0	95	246.00	0	95	1.148.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan sekretariat MRP)
		Persentase Rancangan Perdasus yang ditindaklanjuti	persen	n/a	100			100			100			100			100		
		Jumlah perdasus dan perdasus yang mendapatkan rekomendasi oleh MRP	peraturan	n/a	10			10			10			10			10		
Sub Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia																			
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur (sub urusan pengembangan SDM)	Persentase ASN peserta diklat teknis fungsional yang lulus dengan Predikat Memuaskan	persen	n/a	20	10.957	20	12.400	20	13.050	20	11.984	20	13.332	20	13.332	20	61.723	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan pengembangan SDM)

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				Target
		Terlaksananya peningkatan kompetensi teknis/fungsional aparatur melalui pembinaan dan pengembangan	persen	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
Program Pendidikan Kedisnasan		Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan II yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	n/a	80	8.350	82	22.580	85	22.580	87	22.580	90	22.580	90	98.670	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan pengembangan SDM)	
		Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan III yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	n/a	70	75	75	80	80	85	85	90	90	90	90			
		Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan IV yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen	n/a	65	70	70	75	80	80	85	85	85	85	85			

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				Target
PR (F1)	Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua	Cakupan siswa OAP yang mendapatkan bantuan beasiswa lulus dengan IPK memuaskan	persen	n/a	70	10.000	70	10.000	10.000	80	10.000	80	11.000	85	10.000	85	50.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan (sub urusan Pengembangan SDM)
		Jumlah SDM Papua yang mengikuti pelatihan dan magang	orang per tahun	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
Sub urusan Penanggulangan Bencana Daerah																		
PR (F9)	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam (urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan)	Terwujudnya Pencegahan Dini dan Penganggulangan Korban Bencana Alam	kegiatan	n/a	18	8.000	18	7.850	18	10.000	18	11.000	18	15.000	0	51.850	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan (sub urusan penanggulangan bencana daerah)	
		Cakupan Kampung dengan status Tangguh Bencana	persen	n/a	60	65	70	75	80	80	80	80	80	80	80	80		
		Cakupan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	lokasi	n/a	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10		
		Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana	persen	n/a	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100	100		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan					
				Target	2019	2020		2021		2022			Target	Rp.juta			
				Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target		Rp.juta	Target	Rp.juta		
		Tingkat fasilitas penanganan pasca bencana	persen	n/a	80	80	90	90	90	100	100	100					
		Cakupan pengembangan EWS (<i>early warning systems</i>) kebencanaan	persen	n/a	20	25	30	35	40	40	40	40					
		Persentase penanganan krisis kesehatan akibat dan atau potensi bencana	persen	n/a	80	85	90	95	100	100	100	100					
33 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN																	
		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	orang	28	35	1.897	40	3.207	45	2.590	50	2.650	55	2.910	60	13.254	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
		Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	persen	n/a	75	1.209	80	1.250	85	1.300	90	1.400	95	1.500	95	6.659	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
PR (F6)		Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	persen	55	65	9.714	70	11.644	75	12.967	80	13.267	85	13.467	90	61.058	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				2018		2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				Target
		Persentase Rekomendasi Auditor Eksternal Terhadap Pengelolaan APBD Provinsi yang Berindikasi Kerugian Daerah	persen	n/a	75	80	85	90	95	95								
PR (F6)	Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Cakupan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	persen	40	40	5.978	40	7.273	45	7.900	45	8.804	9.479	50	39.434	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan		
		Persentase OPD dengan nilai SAKIP B	persen	20	25	25	25	30	35	35	35	35	35	35				
		Cakupan Implementasi SPIP pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Papua	persen	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	35				
34 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN																		
		Cakupan ketersediaan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	persen	n/a	80	10.400	85	10.400	90	10.400	95	10.400	100	100	52.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan		
		Cakupan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	persen	n/a	80	85	85	90	95	100	100	100	100	100				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan		
				2018		2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target			
		Tingkat keterwakilan stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (MUSRENBANGDA)	persen	89,66	93,1	96,55	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
		Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tepat waktu	tepat/tidak tepat	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu			
		Penyusunan LKPD tepat Waktu	tepat/tidak tepat	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu			
		Cakupan Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota sePapua	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
		Cakupan Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota sePapua	persen	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100			
		Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	persen	88	90	100	100	500	100	500	100	500	100	500	100	500	2.500	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
		Cakupan hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi	persen	80	85	1.500	85	1.500	1.500	1.400	90	1.400	90	1.500	90	1.500	7.300	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
		Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi	persen	n/a	25	35	50	71	100	100	100	100	100	100	100			

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan		
				Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta
				Target	WTP	Target	WTP	Target	WTP	Target	WTP	Target	WTP	Target	WTP			
		Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi	persen	20	20	20	20	20	40	40	40	50	50	50	50			
		Opini Pemeriksaan BPK	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP				
		Penyampaian LKPD Tepat Waktu	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya				
		Tertib Administrasi BMD	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya				
PR (F3) (F4)	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Persentase penerapan Sistem Informasi Data Pengelolaan Keuangan Otsus	persen	n/a	90	2.400	2.487	100	2.577	100	2.670	100	2.762	100	12.896	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan (sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah)		
		Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan pengelolaan keuangan secara baik	dokumen	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2				
		Cakupan implementasi regulasi pengelolaan dana Otsus	persen	85	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100				

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan				
					2019		2020		2021		2022			2023			
					Target	TARGET Rp.juta	Target	TARGET Rp.juta	Target	TARGET Rp.juta	Target	TARGET Rp.juta		Target	TARGET Rp.juta		
	Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	rupiah	n/a	1.025.0 00.000	7.300	1.025.0 00.000	14.026	16.005	1.025.0 00.000	19.810	1.025.0 00.000	17.635	1.025.0 00.000	74.776	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan (sub fungsi pendapatan daerah)	
		Prosentase Peningkatan Kontribusi UPTB dalam pungutan Pendapatan Asli Daerah	jenis per tahun	n/a	2	2	2	2	2	3	3	3	3	12			
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	persen	16	18	20	20	22	26	28	28	28	28	28			
36 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN																	
PR (F6)	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Cakupan penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu	persen	n/a	60	2.500	65	2.500	70	2.500	75	2.500	80	2.500	80	12.500	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian (sub pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian)
	Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	Perentase kasus pendampingan hukum yang didampingi	persen	n/a	70	897	72	897	75	897	77	897	80	897	80	4.484	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja Awal (2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan				
				Target	Target	2019		2020		2021		2022		2023			
				Rp.juta	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target	Rp.juta	Target		Rp.juta	Target	Rp.juta	Target
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek sesuai tupoksinya	orang	n/a	100	14.020	100	14.020	100	14.020	100	14.020	100	14.020	100	70.099	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
	Program Pengembangan Data dan Informasi daerah	Cakupan ketersediaan data kepegawaian daerah	persen	-	100	660	100	660	100	660	100	660	100	660	100	3.302	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
	Program Pendidikan Kedisasan	Jenis Diklat yang terakreditasi A	jumlah	3	3	255	3	255	5	255	8	255	5	255	8	1.275	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian
30 URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
	Program Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan	Jumlah hasil kelibangan yang terpilih untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah	jenis per tahun	n/a	5	1.950	5	2.050	8	3.350	8	1.550	10	2.650	10	11.550	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
		Cakupan Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan	persen	n/a	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Jumlah Teknologi Tepat Guna dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	jenis per tahun	n/a	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	5	5.000	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kinerja					Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Urusan Kewenangan			
				Awal (2018)		2019		2020		2021		2022		2023			Target	Rp.juta	
				Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Target				
PR (F6)	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tingkat pemanfaatan teknologi Informasi dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	persen	n/a	40	600	45	866	50	750	55	750	60	750	60	750	60	3.716	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
PR (F3) (F6)	Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Kesepakatan Kerjasama	dokumen per tahun	n/a	2	1.570	2	1.570	2	1.570	2	1.570	2	1.570	2	1.570	10	7.850	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator *outcome* atau *impact* dari pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu, dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan dalam kurun waktu 2019-2023.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

IKU yang termuat dalam RPJMD adalah IKU Kepala Daerah yang merupakan gambaran ukuran keberhasilan Kepala Daerah secara umum dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah disamping pemenuhan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye. Sedangkan IKD merupakan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) disajikan dalam Tabel 4.1 dan Tabel 4.2, sebagai berikut:

TABEL 4.1. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023

No.	Sasaran Strategik	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Aksesibilitas, Mutu dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pendidikan	1.1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.2	8.21
		1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	10.5	10.8	11.0	11.2	11.5	11.7	12.0	12.00
		1.3	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	Persen	73.89	74.9	75.9	76.9	77.9	78.9	80.0	80.00
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	65.1	65.9	66.6	67.3	68.1	68.8	69.6	69.59
3	Sukses pelaksanaan dan prestasi olahraga	3.1	Jumlah atlet yang berprestasi pada event olah raga nasional	Atlet	30	30	40	80	85	95	100	100
4	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah	4.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	persen	68.08	69.2	70.3	71.5	72.6	73.8	75.0	75.00
5	Meningkatnya ketersediaan pangan yang berkelanjutan	5.1	Cakupan daerah rawan pangan	jumlah kab./kota	13	13.0	11.0	10.0	9.0	7.0	7.0	7.00
		5.2	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Rp ribu per kapita	6996	7093.2	7191.8	7291.7	7393.1	7495.8	7600.0	7600.00
6	Meningkatnya Keharmonisan dan kohesifitas masyarakat	6.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	indeks	75.97	76.4	76.9	77.3	77.8	78.2	78.7	78.68
		7.1	Nilai skor aspek kebebasan sipil	skor	92.15	92.6	93.1	93.6	94.0	94.5	95.0	95.00
7	Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi	7.2	Nilai skor aspek hak-hak politik	skor	41.13	42.5	43.9	45.3	46.8	48.4	50.0	50.00
		7.3	Nilai skor aspek lembaga demokrasi	skor	53.45	54.5	55.5	56.6	57.7	58.9	60.0	60.00
8	Meningkatnya kinerja Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua	8.1	Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	persen	85	88.0	90.0	93.0	95.0	98.0	100.0	100.00

No.	Sasaran Strategik	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
9	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	9.1	Capaian Nilai SAKIP	predikat	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB
		9.2	Capaian implementasi e-government terintegrasi (masuk e-planning dll ke program)	persen	80	80	85	85	90	90	90	95	95
10	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan daerah	10.1	Tingkat konsistensi RKPD terhadap RPJMD	persen	46.39	80.0	80.0	85.0	90.0	95.0	100.0	100.0	100.00
11	Meningkatnya sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah	11.1.	Opini BPK Atas Laporan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah Provinsi Papua	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		11.2	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	persen	7.81	8.61	9.49	10.46	11.52	12.70	14.00	14.00	14.00
12	Meningkatnya pendayagunaan potensi sumber daya alam untuk penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	12.1	Kontribusi Sektor tanaman pangan Terhadap PDRB	persen	2.27	2.6	3.0	3.4	3.8	4.4	5.0	5.0	5.00
		12.2	Kontribusi Sektor Perkebunan Terhadap PDRB	persen	0.8	1.1	1.5	2.0	2.7	3.7	5.0	5.00	5.00
		12.3	Kontribusi Sektor Peternakan Terhadap PDRB	persen	0.82	1.1	1.5	2.0	2.7	3.7	5.0	5.00	5.00
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan aksi mitigasi perubahan iklim	13.1	Indeks Kualitas Udara	indeks	90.91	91.6	92.3	92.9	93.6	94.3	95.0	95.00	95.00
		13.2	Indeks Kualitas Air	indeks	77.33	77.8	78.2	78.7	79.1	79.5	80.0	80.00	80.00
		13.3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	indeks	78.18	79.3	80.4	81.5	82.7	83.8	85.0	85.00	85.00
		13.4	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/ rupiah	-	-	31580.2	39475.3	47370.4	55265.4	63160.5	63160.49	63160.49

No.	Sasaran Strategik	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
14	Meningkatnya pembangunan ekonomi maritim dan kelautan yang berbasis pada pendayagunaan potensi sumberdaya secara berkelanjutan	14.1	Kontribusi sub Sektor perikanan Terhadap PDRB	persen	4.53	5.33	6.27	7.37	8.67	10.20	12.00	12	
15	Meningkatnya daya saing tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	15.1	Tingkat Kesempatan Kerja	persen	96.01	97.09	97.34	97.59	97.84	98.09	98.34	98.34	
16	Meningkatnya daya saing dan realisasi investasi pada sektor-sektor andalan daerah	16.1	Jumlah nilai investasi PMDN yang direalisasikan	Rp. Triliun	52.51	54.40	56.36	58.39	60.49	62.67	64.93	64.93	
		16.2	Jumlah nilai investasi PMA yang direalisasikan	Rp. Triliun	70.04	73.74	77.65	81.75	86.08	90.63	95.43	95.43	
17	Meningkatnya akses transportasi berbasis antar moda dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah/daerah dan akses bagi seluruh wilayah	17.1	Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	30.00	30.00	32.00	40.00	45.00	50.00	55.00	55.00	
18	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten	18.1	Persentase kesesuaian Pemanfaatan ruang	persen	-	-	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	50.00	
19	Meningkatnya Ketersediaan sistem pengairan yang mendukung produktivitas wilayah	19.1	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	persen	-	-	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	80.00	
20	Meningkatnya Pemenuhan perumahan layak huni dan penataan pemukiman	20.1	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	33.06	34.12	35.22	36.36	37.54	38.75	40.00	40.00	
		20.2	Cakupan rumah tangga dengan air bersih layak	persen	38.47	39.52	40.61	41.72	42.87	44.04	45.25	45.25	

No.	Sasaran Strategik	No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
21	Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kampung	21.1	Indeks Desa Membangun	indeks	41.89	43.43	45.02	46.67	48.38	50.16	52.00	52.00	
22	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi OAP	22.1	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar OAP	persen	-	60.00	62.40	64.90	67.49	70.19	73.00	73.00	
23	Meningkatnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan	23.1	Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	tahun	7.48	8.09	8.75	9.47	10.25	11.09	12.00	12.00	
		23.2	Angka Harapan Hidup wilayah perbatasan	tahun	65.08	65.56	66.04	66.53	67.01	67.50	68.00	68.00	
		23.3	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	9.49	10.12	10.80	11.52	12.30	13.12	14.00	14.00	
24	Meningkatnya bantuan sosial PMKS	24.1	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan sosial	ribu orang per tahun	-	-	10	20	30	40	50	150	
25	Meningkatnya kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	25.1	Indeks Resiko Bencana (IRBI)	Kategori	-	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	
26	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah dan Upaya Perlindungan anak	26.1	Indeks Pembangunan Gender	indeks	79.38	79.48	79.59	79.69	79.79	79.90	80.00	80.00	
		26.2	Indeks Pemberdayaan Gender dan Upaya Perlindungan anak	indeks	61.89	62.40	62.91	63.43	63.95	64.47	65.00	65.00	

TABEL 4.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2019-2023

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi											
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1.1	Rata-rata pendapatan perkapita di wilayah kabupaten sekitar daerah pertambangan	Rp. juta	13.21	14.69	16.34	18.17	20.21	22.48	25.00	25.00	25.00
1.2	Cakupan database kependudukan skala provinsi (usia +17 tahun memiliki NIK)	persen	74.37	76.04	77.76	79.51	81.30	83.13	85.00	85.00	85.00
1.3	Capaian implementasi e-government terintegrasi (masuk e-planning dll ke program)	persen	80	80	85	85	90	90	95	95	95
1.4	Cakupan inovasi pelayanan publik yang masuk dalam List Outstanding (terpuji)	persen	0	0	1	1	1	1	1	1	5
1.5	Persentase indikator kinerja sasaran daerah dalam RPJMD yang mencapai target	persen	-	75.38	30.00	40.00	50.00	70.00	85.00	85.00	85.00
1.6	Rasio belanja langsung dalam komposisi APBD	persen	48.24	36.70	39.04	41.53	44.18	47.00	50.00	50.00	50.00
1.7	Cakupan ketersediaan data statistik bagi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	persen	-	50.00	53.48	57.20	61.19	65.44	70.00	70.00	70.00
1.8	Ketepatan waktu Penetapan APBD	kategori	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu
1.9	Cakupan kabupaten/kota yang menyampaikan laporan hasil pengelolaan dana Otsus	jumlah kabupaten/kota	0	0	5	5	6	6	7	7	29
1.10	Predikat yang diperoleh oleh LPPD Provinsi Papua	Indeks	4.88	5.08	5.29	5.50	5.72	5.96	6.20	6.20	6.20
1.11	Pengeluaran Per Kapita wilayah perbatasan	Rp juta per kapita	9.49	10.12	10.80	11.52	12.30	13.12	14.00	14.00	14.00
1.12	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai indeks	C	C	C	CC	CC	B	B	B	B

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023			
1.13 Indeks Pelayanan Publik	Nilai indeks	C-	C-	C-	C	C	B-	B	B	B	B	
1.14 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai indeks	C	C	C	B	B	B	A	A	A	A	
1.15 Jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah	orang per hari			150	150	200	250	300	300	300	300	
1.16 Rata-rata Nilai Skor Peduli HAM	nilai	0	0	50	60	65	70	75	75	75	75	
1.17 Tingkat Kerentanan Sosial	kategori	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	
Kesejahteraan sosial												
1. Pendidikan												
1.1 Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung untuk kelas 2 dan 3	Persen	40.00	42.80	45.79	48.99	52.41	56.08	60.00	60.00	60.00	60.00	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
1.2 Rata-rata Lama Sekolah wilayah perbatasan	tahun	7.48	8.09	8.75	9.47	10.25	11.09	12.00	12.00	12.00	12	
1.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	88.63	90.43	92.27	94.14	96.06	98.01	100.00	100.00	100.00	100.00	
1.5 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/ sederajat	persen	78.83	79.83	80.84	81.86	82.89	83.94	85.00	85.00	85.00	85.00	
1.6 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B/ sederajat	persen	56.13	56.76	57.39	58.03	58.68	59.34	60.00	60.00	60.00	60.00	
2. Kesehatan												
2.1 Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 klh	7.00	6.38	5.81	5.29	4.82	4.39	4.00	4.00	4.00	4.00	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
2.2 Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita	persen	11.30	10.02	8.89	7.88	6.99	6.20	5.50	5.50	5.50	5.50	
3. Pangan												
3.1 Indeks Ketahanan Pangan	Nilai Indeks		37.09	39.53	42.13	44.90	47.85	51.00	51.00	51.00	51.00	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan
3.2 Persentase kenaikan cadangan pangan	persen	26.95	27.44	27.93	28.43	28.95	29.47	30.00	30.00	30.00	30	
3.3 Persentase penduduk tahan pangan	persen	40.04	42.83	45.82	49.01	52.43	56.09	60.00	60.00	60.00	60	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
4. Ketenagakerjaan											
4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	3.62	2.91	2.70	2.50	2.32	2.16	2.00	2.00	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
4.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	76.94	77.44	77.95	78.46	78.97	79.48	80.00	80.00	
5. Pemberdayaan											
5.1	Cakupan Kampung Kontekstual Papua yang termasuk dalam status kampung berkembang	persen	5.37	6.94	8.97	11.59	14.97	19.35	25.00	25.00	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Masyarakat Desa, dan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perempuan dan Perlindungan Anak
5.2	Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen	30.00	30.00	34.46	39.59	45.47	52.23	60.00	60.00	
5.3	Indeks Ketimpangan Gender	indeks	0.52	0.51	0.50	0.49	0.48	0.47	0.47	0.47	
6. Seni Budaya dan Olahraga											
6.1	Persentase potensi budaya lokal yang dilestarikan	persen	40.00	40.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	60.00	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
6.2	Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	0	0	0	0	1	0	1	2	
6.3	Cakupan kurikulum muatan lokal	persen	2	2	2	2	2.5	2.5	5	5	
6.4	Indeks Pembangunan Olah Raga	Tingkatan Status	-	-	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	
ASPEK DAYA SAING DAERAH											
Kemampuan Ekonomi Daerah											
1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Peringkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1.1	NTP perikanan tangkap	Skor	103.75	103.96	104.17	104.37	104.58	104.79	105.00	105	
1.2	NTP perikanan budidaya	Skor	83.27	85.85	88.51	91.25	94.08	96.99	100.00	100	
1.3	Tingkat konsumsi ikan per kapita	kg/kapita/bulan	0.22	0.33	0.49	0.74	1.10	1.65	2.46	2.46	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
1.4	Pendapatan Per Kapita Petani	Rp juta per kapita	10.21	10.34	10.63	11.00	11.45	12.24	13.12	13.12	13.12		
1.5	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	87.6	88.00	88.39	88.79	89.19	89.60	89.60	90.00	90.00	90	
1.6	Cakupan penanganan daerah rawan pangan	persen	-	-	45	50	55	60	60	65	70	70	
1.7	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2.00	2.20	2.41	2.65	2.90	3.19	3.19	3.50	3.50	3.50	
1.8	Pertumbuhan PDRB sub-sektor kehutanan	persen	1.29	1.48	1.71	1.97	2.26	2.61	2.61	3.00	3.00	3	
1.9	Jumlah kawasan industri rakyat yang dikembangkan	Jumlah	0	0	1	1	2	2	2	4	10	10	
1.10	Persentase koperasi aktif dan berkembang	persen	52	53.66	54.88	56.11	57.38	58.68	58.68	60.00	60.00	60	
1.11	Jumlah UMKM yang berkembang	Jumlah	3428	3517	3609	3703	3799	3898	3898	4000	4000	4000	
Fasilitas Wilayah/Infrastruktur													
1. Perhubungan													
1.1	Persentase aksesibilitas antar wilayah kabupaten/kota yang terhubung sarana transportasi jalan	persen	55.17	55.17	58.62	65.52	72.41	79.31	79.31	93.10	93.10	93.10	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan
2. Listrik Dan Air Bersih													
2.1	Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi baru terbarukan	unit	40.57	41.28	41.99	42.73	43.47	44.23	44.23	45.00	45.00	45.00	Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral, dan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
2.2	Cakupan rumah tangga dengan sanitasi baik	persen	33.06	34.12	35.22	36.36	37.54	38.75	38.75	40.00	40.00	40	
2.3	Backlog perumahan layak huni dan sehat	ribu rupa	147.88	138.55	129.80	121.61	113.93	106.74	106.74	100.00	100.00	100.00	
3. Lingkungan Hidup													
3.1	Laju Deforestasi	ribu hektar	48.6	43.50	38.94	34.86	31.20	27.93	27.93	25.00	25.00	25.00	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup, dan Urusan Pilihan Kehutanan
3.2	Tingkat Emisi Karbon	Ton CO2	0.392	0.371	0.351	0.332	0.315	0.298	0.298	0.282	0.282	0.282	
3.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	nilai indeks	81.47	82.06	82.64	83.21	83.83	84.44	84.44	85.03	85.03	85.03	
3.4	Persentase penerapan <i>green economy</i>	persen			50.00	55.00	60.00	65.00	65.00	70.00	70.00	70.00	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
3.5	Intensitas penurunan emisi	Ton CO2/Rp	-	-	31580.25	39475.31	47370.37	55265.43	63160.49	63160.49	63160.49	Urusan
3.6	Persentase pemanfaatan sumberdaya air	persen		60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	80.00	80.00	80.00	
3.7	Persentase pengendalian daya rusak air	persen		40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	60.00	60.00	60.00	
4. Informasi Dan Komunikasi												
4.1	Kepuasan Pelayanan Informasi & Komunikasi	Kategori		C	C	C	B	B	B	B	B	Urusan Wajib Bukan
4.2	Cakupan layanan telekomunikasi	persen		40	45	50	55	60	60	60	60	Pelayanan Dasar Komunikasi dan
4.3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	persen		5	7.25	7.5	8	10	10	10	10	Informatika
5. Iklim Berinvestasi												
5.1	Angka Kriminalitas	per 100.000 penduduk	236	218	202	187	173	159	147	147	147	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentrangan dan Ketertiban Umum
5.2	Indeks Demokrasi	Nilai Indeks	61.02	61.36	61.70	62.04	62.39	62.73	63.08	63.08	63.08	serta Perlindungan Masyarakat, Urusan
5.3	Cakupan kabupaten/kota yang melaksanakan RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM)	Jumlah	3	3	3	3	3	3	3	3	15	Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal, Urusan Pilihan
5.4	Lama hari pengurusan ijin investasi	hari	90	90	80	60	40	30	20	20	20	Perdagangan
5.5	ICOR	nilai	5.13	4.75	4.39	4.06	3.76	3.48	3.21	3.21	3.21	
5.6	Indeks Kemahalan Konstruksi	persen	229.82	224.56	219.42	214.39	209.48	204.69	200.00	200.00	200.00	
ASPEK PELAYANAN UMUM												
1. Layanan Urusan Wajib Dasar												
1.1. Pendidikan												
1.1.1	Angka Putus Sekolah (APTS) SD/MI/Paket A/ sederajat	persen	0.56	0.49	0.43	0.37	0.33	0.29	0.25	0.25	0.25	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
1.1.2	Angka Putus Sekolah (APTS) SMP/MTs/ sederajat	persen	1.21	1.17	1.14	1.10	1.07	1.03	1.00	1.00	1.00	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.1.3	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SD/MI dengan kondisi bangunan baik	persen	22.48	23.59	24.75	25.97	27.25	28.59	30.00	30.00	
1.1.4	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik	persen	22.37	23.49	24.67	25.91	27.21	28.57	30.00	30.00	
1.1.5	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	murid per guru	24.20	24.33	24.46	24.60	24.73	24.86	25.00	25.00	
1.1.6	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah pertama	murid per guru	16.76	17.91	19.15	20.47	21.88	23.39	25.00	25.00	
1.1.7	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	murid per sekolah	181.00	184.04	187.12	190.26	193.45	196.70	200.00	200.00	
1.1.8	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah pertama	murid per sekolah	196.09	196.73	197.38	198.03	198.69	199.34	200.00	200.00	
1.1.9	Persentase siswa kelas 1, 2 dan 3 yang naik kelas	persen	92.00	94.00	96.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
1.1.10	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat (SPM Provinsi)	persen	33.88	34.83	48.97	60.27	75.33	85.00	100.00	100.00	
1.1.11	Angka Putus Sekolah (APTS SMA/SMK/MA/Paket C/ sederajat)	persen	0.93	0.84	0.76	0.68	0.61	0.55	0.50	0.50	
1.1.12	Cakupan ruang kelas sekolah pendidikan SMA/SMK/MA dengan kondisi bangunan baik	persen	33.87	34.82	35.80	36.81	37.84	38.90	39.99	40.00	
1.1.13	Rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	murid per guru	13.13	14.62	16.27	18.12	20.17	22.46	25.00	25.00	
1.1.14	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan menengah atas/kejuruan	murid per sekolah	262.00	250.47	239.45	228.91	218.84	209.21	200.00	200.00	
1.1.15	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	persen	73.98	74.95	75.93	76.93	77.94	78.96	80.00	80.00	
1.1.16	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun	persen	89.32	90.24	91.17	92.12	93.07	94.03	95.00	95.00	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD				Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		Urusan								
1.1.17	Jumlah PKBM aktif	unit	388.00	398.00	411.00	420.00	434.00	443.00	448.00	448.00
1.1.18	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	persen	70.73	71.42	72.13	72.83	73.55	74.27	75.00	75.00
1.1.19	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik	persen	60.00	62.95	66.04	69.28	72.68	76.25	80.00	80.00
1.1.20	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	persen	80.00	80.81	81.63	82.46	83.30	84.15	85.00	85.00
1.1.21	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	persen	75.00	76.28	77.58	78.90	80.24	81.61	83.00	83.00
1.1.22	Persentase guru SMA/SMK yang bersertifikat pendidik	persen	75.00	76.43	77.89	79.37	80.89	82.43	84.00	84.00
1.1.23	Persentase guru SMLB yang bersertifikat pendidik	persen	60.00	61.56	63.16	64.81	66.49	68.22	70.00	70.00
1.1.24	Cakupan Guru SMK pemegang sertifikat keahlian khusus	persen	45.00	46.67	48.40	50.20	52.06	54.00	56.00	56.00
1.1.25	Cakupan Kurikulum Muatan Lokal Papua yang dikembangkan dalam proses pembelajaran	persen	-	2.50	5.00	7.00	10.00	15.00	20.00	20.00
1.1.26	Cakupan model Pendidikan Sekolah Kontekstual Papua yang dikembangkan	unit per tahun	10.00	10.00	2.00	2.00	4.00	4.00	5.00	17.00
1.1.27	Jumlah kemitraan pendidikan yang dikembangkan dengan lembaga sosial dan agama	unit	15.00	18.68	23.27	28.98	36.10	44.96	56.00	56.00
1.1.28	Cakupan PBM Sekolah yang di Supervisi dan di Monitoring	persen	80.00	75.38	71.03	66.93	63.07	59.43	56.00	56.00
1.1.29	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S1 yang lulus tepat waktu	persen	85.00	86.59	88.21	89.86	91.54	93.26	95.00	95.00
1.1.30	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S2 yang lulus tepat waktu	persen	60.00	61.56	63.16	64.81	66.49	68.22	70.00	70.00
1.1.31	Cakupan Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan S3 yang lulus tepat waktu	persen	50.00	52.23	54.57	57.01	59.56	62.22	65.00	65.00
1.1.32	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	persen	20.44	21.14	21.86	22.61	23.38	24.17	25.00	25.00
1.1.33	Capaian peserta program afirmasi pendidikan yang difasilitasi	orang per tahun	-	-	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1250.00

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.1.34 Capaian Siswa peserta ADEM/ADIK yang difasilitasi	orang	700.00	795.00	903.00	1025.00	1164.00	1322.00	1500.00	1500.00	1500.00	
1.1.35 Capaian Sekolah Program Khusus yang terbina	unit	-	-	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	50.00	
1.1.36 Cakupan siswa lulus Sekolah Luar Biasa	persen	2.92	3.59	4.40	5.40	6.64	8.15	10.00	10.00	10.00	
1.1.37 Rasio kecukupan rombel terhadap siswa SLB	rasio siswa SLB per rombel	10.60	11.78	13.09	14.56	16.18	17.99	20.00	20.00	20.00	
1.1.38 APM pendidikan khusus (SPM Provinsi)	persen			20	50	80	100	100	100	100	
1.2. Kesehatan											
1.2.1 Cakupan distrik yang sudah memiliki puskesmas	persen	7.63	9.59	12.04	15.13	19.01	23.88	30.00	30.00	30.00	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
1.2.2 Cakupan puskesmas terakreditasi	persen	5.84	6.45	7.13	7.88	8.70	9.61	10.62	10.62	10.62	
1.2.3 Cakupan puskesmas pembantu	per 100.000 penduduk	94.48	102.05	110.22	119.05	128.58	138.88	150.00	150.00	150.00	
1.2.4 Cakupan UKBM kabupaten/kota yang terpetakan	persen	-	-	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	70.00	70.00	
1.2.5 Rasio kelompok Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM)	persen	-	-	25.00	25.00	30.00	35.00	40.00	40.00	40.00	
1.2.6 Cakupan kabupaten/kota yang memiliki data profil kesehatan secara lengkap	persen	-	27.59	34.92	44.20	55.95	70.83	89.66	89.66	89.66	
1.2.7 Cakupan Dinas Kesehatan dan RSUD kabupaten/kota yang memiliki RENSTRA yang berkualitas	persen	-	60.00	60.00	65.00	65.00	70.00	75.00	75.00	75.00	
1.2.9 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	persen	35.21	36.68	38.21	39.81	41.47	43.20	45.00	45.00	45.00	
1.2.10 Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan PHBS	persen	3.45	6.90	13.79	20.69	27.59	34.48	41.38	41.38	41.38	
1.2.11 Persentase Puskesmas yang mempunyai ketersediaan obat dan vaksin	persen		80	82	85	87	90	92	92	436	
1.2.12 Persentase PAK yang diawasi	persen		58	68	78	88	100	100	100	392	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
1.2.13	Tanaman obat tradisional yang berkembang di masyarakat		-	10.00	10.00	15.00	20.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	
1.2.14	API Malaria	persen	59.00	51.35	44.69	38.89	33.85	29.46	25.64	25.64	25.64	25.64	
1.2.15	Tingkat prevalensi Tuberkulosis	per 100.000 penduduk	62.78	56.30	50.48	45.27	40.59	36.40	32.64	32.64	32.64	32.64	
1.2.16	Tingkat prevalensi DBD	persen	92.67	86.37	80.50	75.03	69.93	65.17	60.74	60.74	60.74	60.74	
1.2.17	Angka penemuan kasus baru kusta (NCDR)	per 100.000 penduduk	42.00	39.83	37.78	35.83	33.98	32.23	30.57	30.57	30.57	30.57	
1.2.18	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	per 1.000 penduduk	-	11.70	11.10	10.53	10.00	9.48	9.00	9.00	9.00	9.00	
1.2.19	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	per 1.000 penduduk	48.00	45.36	42.86	40.50	38.28	36.17	34.18	34.18	34.18	34.18	
1.2.20	Persentase perempuan umur 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	persen	-	-	10.00	15.00	20.00	25.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
1.2.21	Persentase penanganan kesehatan pada kejadian luar biasa	persen	-	65.00	75.00	85.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
1.2.22	Cakupan pelayanan kesehatan lembaga mitra di 5 wilayah adat	kabupaten /kota	-	6.00	7.00	9.00	12.00	14.00	16.00	16.00	16.00	16.00	
1.2.23	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	persen	-	-	25.00	20.00	15.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
1.2.24	Unmet need pelayanan kesehatan	persen	2.63	2.93	3.26	3.63	4.04	4.49	5.00	5.00	5.00	5.00	
1.2.26	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	kasus	289.00	259.08	232.25	208.21	186.65	167.32	150.00	150.00	150.00	150.00	
1.2.27	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	persen	40.90	43.60	46.47	49.54	52.81	56.29	60.00	60.00	60.00	60.00	
1.2.28	Cakupan pelayanan nifas	persen	35.80	37.19	38.64	40.14	41.70	43.32	45.00	45.00	45.00	45.00	
1.2.29	Cakupan Keluarahan/Kampung Universal Child Immunization (UCI)	persen	61.59	62.15	62.71	63.27	63.84	64.42	65.00	65.00	65.00	65.00	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	RPJMD				
1.2.31	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	persen	32.80	31.35	29.96	28.64	27.37	26.16	25.00	25.00	25.00	25.00	
1.2.32	Prevalensi Malnutrisi (wasting/obesitas) pada anak balita	persen	1.60	1.38	1.18	1.02	0.88	0.76	0.65	0.65	0.65	0.65	
1.2.33	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	persen		20.00	20.00	20.00	25.00	25.00	40.00	40.00	40.00	40.00	
1.2.34	Angka Kematian Balita (AKBa)	per 1.000 khlh	8.00	7.13	6.35	5.66	5.04	4.49	4.00	4.00	4.00	4.00	
1.2.35	Rasio posyandu yang aktif	persen	63.57	64.60	65.64	66.71	67.79	68.88	70.00	70.00	70.00	70.00	
1.2.36	Cakupan kunjungan bayi (KN1)	persen	48.89	49.40	49.91	50.42	50.94	51.47	52.00	52.00	52.00	52.00	
1.2.37	Cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi		46.00	46.95	47.92	48.91	49.92	50.95	52.00	52.00	52.00	52.00	
1.2.38	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	persen	2115.09	2144.84	2175.01	2205.61	2236.63	2268.10	2300.00	2300.00	2300.00	2300.00	
1.2.39	Cakupan masyarakat teridentifikasi kurang gizi	persen	20.00	23.30	27.14	31.62	36.84	42.92	50.00	50.00	50.00	50.00	
1.2.40	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	persen	45.00	48.44	52.14	56.12	60.41	65.03	70.00	70.00	70.00	70.00	
1.2.41	Cakupan jumlah kabupaten/kota yang memiliki Rumah Sakit	jumlah per tahun	-	21.00	21.00	22.00	24.00	25.00	27.00	27.00	27.00	27.00	
1.2.42	Cakupan pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit rujukan di 5 wilayah adat	unit		5.00	5.00	5.00	6.00	6.00	8.00	8.00	8.00	8.00	
1.2.43	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	per 30.000 penduduk	25.00	25.00	25.77	26.57	27.39	28.23	29.10	29.10	29.10	30.00	
1.2.44	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	1.12	1.41	1.78	2.24	2.83	3.57	4.50	4.50	4.50	4.50	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		Urusan										
1.2.45 Rasio Dokter per satuan penduduk	per 100.000 penduduk	24,13	25,06	26,02	27,02	28,05	29,13	30,25	30,25	30,25	30,25	30,25
1.2.46 Rasio Tenaga medis per satuan penduduk	per 1.000 penduduk	1,03	1,05	1,08	1,11	1,14	1,17	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
1.2.47 Cakupan kecukupan laboratorium dalam mendukung pelayanan kesehatan	persen	70,00	75,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.2.48 Cakupan ketersediaan data bidang kesehatan di tingkat provinsi yang valid dan reliabel	persen	85,00	85,00	85,00	90,00	90,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
1.2.49 Cakupan pasien penyakit jiwa yang tertangani	persen	40,00	40,00	40,00	43,00	50,00	55,00	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00
1.2.50 Cakupan Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	kabupaten per tahun	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.2.51 Cakupan jumlah Rumah sakit yang sudah terakreditasi	persen	56,25	56,86	57,47	58,09	58,72	59,36	59,36	60,00	60,00	60,00	60,00
1.2.52 Cakupan pelayanan masyarakat miskin pada RSUD dan RSJ	persen	10,00	12,60	15,87	20,00	25,20	31,75	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.2.53 Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	persen	-	60	60,00	65	70,00	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
1.2.54 Bed Occupancy Ratio (BOR)	rasio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.55 Cakupan rumah sakit kelas C	persen	-	44,83	48,28	48,28	51,72	55,17	58,62	58,62	58,62	58,62	58,62
1.2.56 Cakupan pelayanan kesehatan RSUD yang telah sesuai standar nasional	persen	60,00	65,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00	90,00	90,00
1.2.57 Bed Occupancy Ratio (BOR)	rasio	41,84	42,35	42,87	43,39	43,92	44,46	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
1.2.58 Cakupan rumah sakit kelas C	persen	-	44,83	48,28	48,28	51,72	55,17	58,62	58,62	58,62	58,62	58,62
1.2.59 Persentase indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit yang mencapai target	persen	60,00	60,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.3.1.6	Persentase jaringan irigasi provinsi dengan kualitas baik	m	40	50	60	70	80	80	80		
1.3.1.7	Panjang jalan provinsi yang fungsional	km	20	20	20	20	20	100	100		
1.3.1.8	Panjang jembatan yang fungsional	m'	500	500	500	500	500	2500	2500		
1.3.1.9	Persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap	persen	34	38	40	45	50	55	60		
1.3.1.10	Persentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap	persen	40	45	50	55	60	60	60		
1.3.1.11	Panjang jalan dalam kondisi mantap	km	10	20	20	20	20	30	100		
1.3.1.12	Panjang jembatan dalam kondisi mantap	meq	30	30	30	30	30	150	150		
1.3.1.13	Cakupan perencanaan teknis jalan dan jembatan	persen	60	65	70	75	80	80	80		
1.3.1.14	Cakupan keterlayanan air baku	persen	30	35	40	45	50	50	50		
1.3.1.15	Cakupan keterlayanan air bersih	persen	38.47	40.19	41.98	43.86	45.82	47.86	50.00	50	
1.3.1.16	Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Besar	persen	69.16	70.86	72.60	74.38	76.21	78.08	80.00	80	
1.3.1.17	Cakupan kawasan rawan abrasi yang tertangani	persen	30	35	40	45	50	50	50		
1.3.1.18	Cakupan kawasan rawan banjir yang tertangani	persen	50	55	60	65	70	70	70		
1.3.1.19	Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah (SPM Provinsi)	persen	25	50	75	100	100	100	100		
1.3.2.	Penataan Ruang										
1.3.2.1	Cakupan ijin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang	persen	80	85	90	95	100	100	100		
1.3.2.2	Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	persen	30	50	70	100	100	100	100		

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman											
1.4.1	Cakupan penataan lingkungan permukiman kumuh	persen	60	65	70	75	80	80	80	80	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.4.2	Cakupan rumah layak huni yang terbangun	unit	3000	3000	3000	3000	3000	15000	3000	3000	
1.4.3	Persentase lingkungan permukiman yang sehat	persen	30	35	40	45	50	50	50	50	
1.4.4	Cakupan rumah tangga yang menggunakan air ledeng	per 1000 kk	125	180	230	300	380	380	300	380	
1.4.5	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM Provinsi)	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.4.6	Persentase penduduk realokasi akibat program pemerintah yang memperoleh rumah layak huni (SPM Provinsi)	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat											
1.5.1	Jumlah konflik horisontal	kasus	10.00	10.00	6.00	6.00	2.00	2.00	2.00	2.00	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
1.5.2	Cakupan penegakan Perda	persen	80.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
1.5.3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	rasio	8.70	9.99	11.48	13.19	15.15	17.41	20.00	20.00	
1.5.4	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk	kasus	3.02	2.59	2.22	1.90	1.63	1.40	1.20	1.20	
1.5.5	Jumlah konflik horisontal	kasus	10.00	10.00	6.00	6.00	2.00	2.00	2.00	2.00	
1.5.6	Cakupan penegakan Perda	persen	80.00	80.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
1.5.7	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	rasio	8.70	9.99	11.48	13.19	15.15	17.41	20.00	20.00	
1.5.8	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk	kasus	3.02	2.59	2.22	1.90	1.63	1.40	1.20	1.20	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
		Urusan										
1.5.9	Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	persen	-	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	65.00	65.00	65.00
1.5.10	Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk	rasio	63.45	65.67	67.97	70.35	72.81	75.36	78.00	78.00	78.00	78.00
1.5.11	Cakupan penerbitan dan penanggulangan penyakit masyarakat	persen	-	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
1.5.12	Rata-rata Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) kabupaten/kota dalam daerah layanan	persen	28.00	32.00	36.00	40.00	45.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
1.5.13	Cakupan tenaga pengendali dan kenyamanan lingkungan yang terampil	persen	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	60.00	65.00	65.00	65.00	65.00
1.5.14	Jumlah Pertemuan FKUB per tahun	kali	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00
1.5.15	Cakupan peserta yang mengikuti kegiatan bela negara, pembauran kebangsaan, dan wawasan kebangsaan	orang	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1250.00
1.5.16	Cakupan fasilitas Forkompinda	kali	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
1.5.17	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap HAM	persen	-	-	2.00	2.00	2.25	2.50	3.00	3.00	3.00	3.00
1.5.18	Persentase penanganan kasus pelanggaran HAM	persen	20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00
1.5.19	Cakupan muatan pendidikan politik dan demokrasi dalam pendidikan menengah	persen	2.50	2.50	5.00	5.00	5.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00
1.5.20	Persentase lembaga dan partai politik yang dibina	persen	70.00	75.00	80.00	85.00	85.00	85.00	90.00	90.00	90.00	90.00
1.5.21	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu	persen	-	-	75.00	-	-	-	-	-	-	75.00
1.5.22	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	persen	-	-	80.00	80.00	85.00	85.00	90.00	90.00	90.00	90.00
1.5.23	Cakupan pertemuan dengan lembaga adat untuk harmonisasi regulasi dan mitra strategis pembangunan	kali	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	10.00
1.5.24	Cakupan Kampung dengan status Tangguh Bencana	persen	60	65	70	75	80	80	80	80	80	80

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
1.5.25 Cakupan lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	lokasi			2	2	2	2	2	2	2	2	10	
1.5.26 Persentase kesiapsiagaan penanganan bencana	persen			80	85	90	95	100	100	100	100	100	
1.5.27 Tingkat fasilitasi penanganan pasca bencana	persen			80	80	90	90	100	100	100	100	100	
1.5.28 Cakupan pengembangan EWS (early warning systems) kebencanaan	persen			20	25	30	35	40	40	40	40	40	
1.5.29 Persentase penanganan krisis kesehatan akibat dan atau potensi bencana	persen			80	85	90	95	100	100	100	100	100	
1.5.30 Persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda (SPM Provinsi)	persen			100	100	100	100	100	100	100	100	100	
1.6. Sosial													Urusan Wajib Bukan
1.6.1 Persentase KAT yang memperoleh bantuan sosial	persen			40	45	50	55	60	60	60	60	60	Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
1.6.2 Persentase PMKS yang tertangani	persen			30	35	40	45	50	50	50	50	50	
1.6.3 Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	persen			25.00	28.51	32.51	37.08	42.29	48.23	55.00	55.00	55.00	
1.6.4 Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan pelatihan keterampilan usaha	KK			200	200	200	200	200	200	200	200	1000	
1.6.5 Persentase panti sosial yang menerima pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama	persen			70	75	80	85	90	90	90	90	90	
1.6.6 Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	persen			65	70	75	80	85	85	85	85	85	
1.6.7 Cakupan ketersediaan basis data terpadu PMKS dan kemiskinan	persen			80	85	90	95	100	100	100	100	100	
1.6.8 Cakupan Pengembangan jaminan sosial bagi lanjut usia dan orang dengan kecacatan	persen			30	35	40	45	50	50	50	50	50	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		2023											
1.6.9	Persentase penyandang disabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	persen	15	20	25	30	35	35	35	35	35	35	
1.6.10	Cakupan Kabupaten/Kota yang terakses perlindungan dan jaminan sosial	kab/kota	9	12	15	18	21	24	24	24	24	24	
1.6.11	Cakupan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	orang	50	50	50	50	50	50	50	50	50	250	
1.6.12	Persentase anak dan remaja terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial (SPM Provinsi)	persen	40	60	80	100	100	100	100	100	100	100	
1.6.13	Cakupan penyandang cacat netra yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial (SPM Provinsi)	persen	40	60	80	100	100	100	100	100	100	100	
1.6.14	Cakupan Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial	persen	60	65	70	75	80	80	80	80	80	80	
1.6.15	Cakupan dokumen perencanaan dan anggaran yang berkualitas dalam bidang kesejahteraan sosial	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	
2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar													
2.1. Tenaga Kerja													
2.1.1	Persentase lulusan balai diklat tenaga kerja yang terserap	persen	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
2.1.2	Frekuensi promosi bursa tenaga kerja	kali	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	
2.1.3	Persentase peserta pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi yang terserap dalam lapangan kerja	persen	80	80	85	85	90	90	90	90	90	90	
2.1.4	Persentase Balai Latihan Kerja (BLK) kabupaten/kota yang terakreditasi	persen	25	25	30	40	40	50	50	50	50	50	
2.1.5	Persentase kenaikan UMP	persen	1.5	1.5	2.3	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	
2.1.6	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	persen	30	35	40	50	60	60	60	60	60	60	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
2.4.7 Persentase kontribusi sektor lahan terhadap penurunan emisi	persen		60	65	70	75	80	80						
2.4.8 Persentase kontribusi sektor energi terhadap penurunan emisi	persen		20	25	30	35	40	40						
2.4.9 Persentase kontribusi sektor limbah terhadap penurunan emisi	persen		30	35	40	45	50	50						
2.4.10 Jumlah SDM bidang LH yang tersertifikasi	orang		12	12	12	16	20	20						
2.4.11 Jumlah PPLHD yang dilatih dan bina	orang		2	-	1	2	2	5						
2.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
2.5.1 Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada/tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.5.2 Cakupan penduduk ber-KTP elektronik	persen	64.25	67.42	70.75	74.24	77.90	81.75	85.78						
2.5.3 Persentase kepemilikan KK elektronik	persen	29.70	31.91	34.28	36.83	39.57	42.51	45.67						
2.5.4 Persentase kepemilikan akta kelahiran	persen	44.06	45.77	47.54	49.38	51.29	53.28	55.34						
2.5.5 Persentase pemasangan berakte nikah	persen		40	45	50	55	60	65						
2.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
2.6.1 Cakupan kampung yang diberdayakan dalam bidang TTG	persen		25	30	35	40	45	45						Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.6.2 Jumlah BUMKAM yang kelola Komoditas Unggulan	unit		10	10	10	10	10	10						
2.6.3 Persentase kampung tertinggal	persen		87.12	84.55	82.05	79.63	77.28	75.00						
2.6.4 Cakupan kampung mandiri	kampung		10	2	2	4	4	5						
2.6.5 Cakupan jumlah kampung yang mendapatkan bantuan penguatan Lembaga Masyarakat Adat	kampung		10	10	10	10	10	10						
2.6.6 Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat yang berprestasi	persen		10	15	20	25	30	30						

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana														
2.7.1	Cakupan sasaran Kelompok Masyarakat Peduli KB yang dibina	kelompok per tahun	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	500	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
2.7.2	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmet need</i>)	persen	3.26	3	3	3	2.8	2.5	2.25	2.25	2.25	2,25	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.7.3	Persentase pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi	persen	60	60	65	70	75	80	80	80	80	80		
2.7.4	Cakupan kampung KB	persen	20	25	30	35	40	40	40	40	40	40		
2.7.5	Cakupan tenaga penyuluh KB yang terlatih	orang per tahun	30	30	30	30	30	30	30	30	30	150		
2.8. Perhubungan														
2.8.1	Cakupan terintegrasinya antar moda angkutan antar wilayah adat	wilayah adat	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	
2.8.2	Cakupan pelayanan moda angkutan	persen	20	20	25	30	35	40	40	40	40	40	Perhubungan	
2.8.3	Tingkat kecelakaan kendaraan bermotor	jiwa	200	180	160	140	120	100	100	100	100	100		
2.8.4	Jumlah bandara pengumpul dengan skala pelayanan primer	unit	7	1	1	1	1	1	1	1	1	5		
2.8.5	Jumlah dermaga penyeberangan Kelas II	unit	5	1	1	1	1	1	1	1	1	5		
2.8.6	Jumlah pelabuhan strategis provinsi	unit	6	-	-	1	1	-	1	1	1	2		
2.8.7	Jumlah terminal Tipe B yang fungsional	unit	3	2	2	2	2	2	2	2	2	10		
2.8.8	Pertumbuhan arus penumpang angkutan udara	persen	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0		
2.8.9	Pertumbuhan arus penumpang angkutan laut	persen	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5		
2.8.10	Cakupan ketersediaan fasilitas Keselamatan Jalan	persen	60	65	70	75	80	80	80	80	80	80		

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
2.9. Komunikasi dan Informatika														
2.9.1	Cakupan pemenuhan kebutuhan akses internet dalam pelaksanaan PON	mbps	-	-	-	3200.00								Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
2.9.2	Jumlah kerjasama media dalam mempublikasikan hasil hasil pembangunan	kerjasama	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	
2.9.3	Persentase jaringan teknologi informasi antar OPD yang terintegrasi	persen	10	10	20	20	20	20	20	20	20	40	40	
2.9.4	Cakupan wilayah yang terlayani jaringan telekomunikasi	persen	20	25	30	35	40	40	40	40	40	40	40	
2.9.5	Persentase penduduk yang mengakses internet	persen	16.51	17.05	17.60	18.17	18.76	19.37	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
2.9.6	Cakupan SDM Kominfo yang kompeten di bidang teknologi informasi	persen	60	65	70	75	80	80	80	80	80	80	80	
2.10. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah														
2.10.1	Cakupan UMKM lokal yang bermitra dalam pelaksanaan PON	unit	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2.10.2	Persentase peningkatan pengembangan UMKM keolahragaan	persen	-	-	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	
2.10.3	Cakupan usaha mikro dan kecil yang mandiri dikelola pengusaha muda	unit	7386.0	7769.0	8171.00	8594.00	9039.00	9507.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	
2.10.4	Jumlah UMKM yang mandiri dalam kompetisi usaha	unit	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	150	
2.10.5	Tingkat Partisipasi dalam pameran gelar produk KUMKM dalam negeri	kali	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	36	
2.10.6	Cakupan fasilitas pemasaran produk UMKM unggulan daerah	kelompok	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	50	
2.10.7	Penyaluran kredit UMKM dari sektor perbankan	Rp milyar	10,156	10,838	11,566	12,343	13,171	14,056	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
2.10.8	Persentase koperasi aktif dan berkembang	persen	60	60	60	65	65	65	65	65	65	65	75	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
2.11. Penanaman Modal														Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
2.11.1	Persentase realisasi investasi			80	85	90	95	100	100	100				
2.11.2	Tingkat pertumbuhan nilai investasi sektor unggulan		6.5	6.5	7.0	7.0	7.5	7.5	7.5	7.5				
2.11.3	Persentase UMKM lokal yang bermitra dengan PMA/PMDN			15	20	25	30	35	35	35				
2.11.4	Frekwensi promosi potensi investasi Papua dalam ajang pameran tingkat nasional/internasional			5	5	5	5	5	5	25				
2.11.5	Persentase investasi yang direalisasikan dari ajang promosi nasional/internasional			40	50	60	70	80	80	80				
2.11.6	Lama waktu penerbitan izin investasi			60	30	20	10	10	10	10				
2.11.7	Skor indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan			65	68.40	70.17	71.98	73.84	77.25	77.25				
2.11.8	Persentase hasil pemantauan perusahaan investasi yang ditindaklanjuti			65	70	75	80	85	85	85				
2.12. Kepemudaan dan Olah Raga														Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
2.12.1	Jumlah organisasi olahraga yang dibina		40.00	40.00	40.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00				
2.12.2	Cakupan monitoring atlet berprestasi			80.00	85.00	90.00	95.00	95.00	95.00	95.00				
2.12.3	Cakupan atlet yang diseleksi untuk mengikuti berbagai event olahraga nasional maupun internasional			20.00	20.00	30.00	30.00	40.00	40.00	40.00				
2.12.4	Jumlah gedung olahraga standar internasional yang terbangun			10.00	10.00	-	-	-	-	10.00				
2.12.5	Jumlah lapangan olahraga standar internasional yang terbangun			-	6.00	-	-	-	-	6.00				
2.12.6	Cakupan penyelesaian sarana dan prasarana PON Papua			100.00	-	-	-	-	-	100.00				

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
2.12.7	Cakupan venue berstandar internasional	persen	30.00	60.00	90.00	100.00	-	-	-	-	-	-		
2.12.8	Cakupan penyelesaian Stadion utama untuk mendukung penyelenggaraan PON XX	persen	50.00	50.00	100.00	100								
2.12.9	Jumlah pemuda yang dilatih dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	orang	-	-	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1250.00		
2.12.10	Jumlah organisasi kepemudaan	organisasi	47.00	49.00	51.00	53.00	55.00	57.00	59.00	60.00	60.00			
2.13. Statistik														
2.13.1	Cakupan ketersediaan data SIPD	persen	70	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00	95.00	95.00			Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Statistik
2.13.2	Jumlah dokumen analisis kinerja pembangunan daerah yang berkualitas	dokumen	5	5	5	5	5	5	5	5	25			
2.14. Persandian														
2.14.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	persen	85	85	85	85	90	95	100	100	100			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
2.15. Kebudayaan														
2.15.1	Jumlah Pengembangan Kurikulum Bahasa Ibu di 5 Wilayah Adat	kurikulum	-	-	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan
2.15.2	Frekwensi Festival Kebudayaan Malanesia yang berstandar internasional	kali	-	-	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	7.00			
2.15.3	Cakupan budaya tak benda yang ditetapkan	jumlah	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00		
2.15.4	Frekwensi pameran, festival, lomba karya seni budaya, pameran dan perfilman yang berstandar nasional	kali	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	31.00			
2.15.5	Cakupan Cagar budaya yang ditetapkan	jumlah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
2.15.6	Cakupan kelompok seni dan budaya asli Papua yang dibina	persen	40.00	40.00	45.00	45.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00			

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
2.15.7 Jumlah kerjasama dengan pihak potensial dalam pengembangan seni dan budaya Papua	jumlah	-	-	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00	
2.16. Perpustakaan											Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
2.16.1 Cakupan pelayanan perpustakaan keliling	persen	-	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	60.00	60.00	
2.16.2 Persentase pemustaka yang puas terhadap layanan perpustakaan	persen	-	-	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	90.00	90.00	
2.17. Kearsipan											Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan
2.17.1 Persentase peningkatan arsip daerah yang telah dilakukan penyelamatan	persen	-	85.00	85.00	85.00	90.00	90.00	95.00	95.00	95.00	
2.17.2 Persentase peningkatan SDM pengelola kearsipan dan kepustakaan	persen	-	-	1.20	2.00	2.25	3.00	4.00	4.00	4.00	
3. Layanan Urusan Pilihan											
3.1. Pariwisata											Urusan Pilihan Pariwisata
3.1.1 Jumlah kunjungan wisatawan PON yang terlayani	ribu orang	-	-	-	150	-	-	-	-	150	
3.1.2 Destinasi wisata unggulan yang berkembang	destinasi	10	10	10	12	12	15	15	15	15	
3.1.3 Kawasan wisata yang berstandar internasional	kawasan	2	1	1	1	1	1	1	1	5	
3.1.4 Cakupan mitra pelaku usaha wisata dan ekonomi kreatif	perusahaan		10	10	10	10	10	10	10	50	
3.1.5 Tingkat partisipasi Papua dalam promosi pariwisata di tingkat regional dan internasional	orang		50	50	50	50	50	50	50	250	
3.1.6 Cakupan pelaku usaha wisata yang dibina	pengusaha		10	10	10	10	10	10	10	50	
3.2. Pertanian											Urusan Pilihan Pertanian
3.2.1 Cakupan bina kelompok tani	persen	-	-	20	20	20	20	20	20	100	
3.2.2 NTP peternakan	persen	99.89	99.91	99.93	99.94	99.96	99.98	100.00	100.00	100	
3.2.3 NTP tanaman pangan	persen	86.31	88.45	90.65	92.90	95.21	97.58	100.00	100.00	100	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
3.2.4	Cakupan bina kelompok tani	-	-	20	20	20	20	20	20	20	20	100	
3.2.5	NTP perkebunan	99.89	99.91	99.93	99.94	99.96	99.98	99.98	100.00	100.00	100.00	100	
3.2.6	NTP tanaman pangan	86.31	88.45	90.65	92.90	95.21	97.58	100.00	100.00	100.00	100.00	100	
3.2.7	Produktivitas komoditas tanaman pangan dan hortikultura utama	7.37	8	8.16	8.58	9.03	9.50	10.00	10.00	10.00	10.00	10	
3.2.8	Cakupan komoditi pangan lokal berkualitas	-	-	-	60	-	-	-	-	-	-	-	
3.2.9	Luas kawasan pertanian pangan berkelanjutan	2.67	2.86	3.06	3.27	3.50	3.74	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	
3.2.10	Tingkat swasembada pangan	-	-	25	30	35	40	45	45	45	45	45	
3.2.11	Cakupan penyuluh fungsional yang mempunyai kompetensi memadai	-	60	65	70	75	80	85	85	85	85	85	
3.2.12	Persentase lahan yang dikembangkan sebagai kawasan agribisnis	-	30	35	40	45	50	50	50	50	50	50	
3.2.13	Persentase peningkatan kemampuan penyuluh pertanian melalui Diklat	-	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
3.2.14	Cakupan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2	10	
3.2.15	Cakupan teknologi pertanian/perkebunan rakyat tepat guna yang diterapkan	-	-	10	10	12	12	15	15	15	15	15	
3.2.16	Tingkat produktivitas tanaman perkebunan	485.22	489.26	493.34	497.46	501.60	505.78	510.00	510.00	510.00	510.00	510	
3.2.17	Tingkat kemampuan petani lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	-	25	30	35	40	45	45	45	45	45	45	
3.2.18	Frekwensi promosi produk perkebunan	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2	10	
3.2.19	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	-	50	55	60	65	70	70	70	70	70	70	
3.2.20	Produksi hasil ternak besar/kecil/unggas	30,146,247	31,277,043	32,450,255	33,667,475	34,930,354	36,240,603	37,600,000	37,600,000	37,600,000	37,600,000	37,600,000	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	RPJMD		
3.2.21 Tingkat kemampuan peternakan lokal dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat	persen	30	32	34	36	38	40	40	40		
3.2.22 Cakupan penerapan standar keamanan pangan asal hewan	persen	10	10	10	15	15	25	25	25		
3.3. Kehutanan										Urusan Pilihan Kehutanan	
3.3.1 Nilai produksi sumber daya kehutanan	Rp triliun	2,05	2,12	2,26	2,34	2,42	2,50	2,50	2,50		
3.3.2 Rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan	persen	26.41	27.09	27.79	28.51	29.24	30.00	30	30		
3.3.3 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ribu Ha	4,64	4,76	4,88	5,01	5,14	5,27	5,27	5,27		
3.3.4 Rasio pencapaian restorasi lahan gambut	persen	5	10	15	20	25	30	30	30		
3.3.5 Luasan tutupan kawasan konservasi	Ha	7,755,284	7,755,284	7,755,284	7,755,284	7,755,284	7,755,284	7,755,284	7,755,284		
3.3.6 Persentase luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem	persen	30	30	35	40	45	50	50	50		
3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral										Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral	
3.4.1 Cakupan pemenuhan air bersih dalam pelaksanaan PON	m3/jam	-	-	432.00							
3.4.2 Cakupan pemenuhan listrik dalam pelaksanaan PON	persen	100.00									
3.4.3 Persentase hasil pengendalian dan pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pengusaha pertambangan	persen	80	80	85	90	95	100	100	100		
3.4.4 Cakupan kelompok penambang mineral non logam dan batuan yang dibina	persen	40	40	45	50	55	60	60	60		
3.4.5 Persentase penambangan ilegal yang ditertibkan	persen	80	80	85	90	95	100	100	100		
3.4.6 Persentase pengembangan Sistem informasi sumber daya mineral	persen	25	25	50	75	100	100	100	100		

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023					
		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD											
3.4.7	Cakupan pemetaan kawasan potensi bencana berbasis geologi	persen	30	40	50	60	70	70	70	70	70	70	Urusan
3.4.8	Cakupan Pengawasan dan Pernerbitan Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI)	persen	65	80	90	100	100	100	100	100	100	100	Urusan
3.4.9	Cakupan penelitian dan survey pelayanan geologi	persen	40	50	60	70	80	80	80	80	80	80	Urusan
3.4.10	Harga BBM premium dan pertalite yang terkendali	rp per liter	10,000	9,800	9,800	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	9,500	Urusan
3.4.11	Tingkat elektrifikasi	persen	53.20	54.28	55.38	56.50	57.64	58.81	60.00	60.00	60.00	60	Urusan
3.4.12	Persentase kampung terakses listrik	persen	43	45.46	48.05	50.79	53.69	56.76	60.00	60.00	60.00	60	Urusan
3.4.13	Jumlah RT yang terlayani PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya)	rumah tangga		250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1250.00	Urusan
3.4.14	Jumlah RT yang terlayani PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro)	rumah tangga	500	500	500	500	500	500	500	500	500	2500	Urusan
3.4.15	Jumlah kampung yang memanfaatkan sumber daya energi terbarukan	kampung	100	100	100	100	100	100	100	100	100	500	Urusan
3.5. Perdagangan													
3.5.1	Rata-rata margin harga bahan-bahan makanan kabupaten/kota terhadap ibu kota provinsi	persen rata-rata kab/kota	280.00	258.90	239.40	221.36	204.68	189.26	175.00	175.00	175.00	175.00	Urusan
3.5.2	Cakupan penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	persen	80	80	85	85	85	85	85	85	85	90	Urusan
3.5.3	Cakupan pengawasan peredaran barang dan jasa	persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Urusan
3.5.4	Nilai ekspor Non Migas Papua	Rp milyar	2,008.10	2,147.05	2,295.61	2,454.44	2,624.27	2,805.86	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	Urusan
3.5.5	Cakupan pasar rakyat yang fungsional	unit	20	20	20	20	20	20	20	20	20	100	Urusan
3.5.6	Persentase peningkatan pemasaran komoditas unggulan Provinsi Papua	persen	2.50	3.00	3.25	3.50	3.50	3.50	4.00	4.00	4.00	4.00	Urusan

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Urusan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023		
3.5.7 Rata-rata margin perdagangan barang-barang kebutuhan pokok	persen		250	225	200	175	150	150	150	150	150	Urusan
3.5.8 Persentase kenaikan pengeluaran per kapita perbulan rumah tangga	persen	12.52	12.94	13.37	13.82	14.28	14.76	15.25	15.25	15.25	15.25	Urusan
3.6. Perindustrian												Urusan Pilihan Perindustrian
3.6.1 Cakupan pengembangan industri kayu masyarakat adat	unit per tahun		10	10	10	10	10	10	10	10	10	50
3.6.2 Cakupan Industri kecil dan Menengah yang dibina	unit usaha		50	50	50	50	50	50	50	50	50	250
3.6.3 Kawasan sentra industri rakyat yang berfungsi	kawasan		1	1	1	1	1	1	1	1	1	5
3.7. Kelautan dan Perikanan												Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
3.7.1 Persentase meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	persen		1.25	1.50	1.75	1.80	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
3.7.2 Cakupan kabupaten/kota yang memiliki POKMASWAS berfungsi	kab/kota		8	10	13	13	13	13	13	13	13	13
3.7.3 Produksi perikanan budidaya	ton	113	118.46	124.19	130.19	136.49	143.08	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
3.7.4 Produksi perikanan tangkap	ton	7,403.00	7,499.31	7,596.88	7,695.71	7,795.83	7,897.26	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
3.7.5 Nilai ekspor produk perikanan	Rp. juta	37,811.51	39,613.9	41,502.35	43,480.75	45,553.46	47,724.97	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
3.7.6 Nilai investasi sektor perikanan yang direalisasikan	Rp. juta	6,787.68	6,976.15	7,169.86	7,368.95	7,573.57	7,783.86	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
3.7.7 Cakupan unit pengembangan pelabuhan perikanan yang berfungsi	persen		2	2	2	4	4	4	4	4	4	20
3.7.8 Cakupan peningkatan kinerja UPTD Perikanan	persen		1.20	1.50	2.00	2.25	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50
3.7.9 Cakupan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	persen		60	65	70	75	80	80	80	80	80	80

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023						
4. Layanan Penunjang Urusan														
4.1. Perencanaan Pembangunan														Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
4.1.1 Tingkat capaian realisasi program-program Otsus yang direncanakan	persen	85	88	90									100	
4.1.2 Cakupan LPPD kabupaten/kota yang berpredikat Sangat Tinggi	jumlah kab/kota	7		12	14	16	18	20	20				20	
4.1.3 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKP	persen	46.39	80.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	100.00				100.00	
4.1.4 Penjabaran konsistensi Program RKP ke dalam APBD	persen	70	75	85	90	90	95	100.00	100.00				100.00	
4.1.5 Cakupan fasilitasi asistensi Musrenbang Kabupaten	persen	100	100	100	100	100	100	100	100				100	
4.1.6 Tingkat keterwakilan stakeholder dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (MUSRENBANGDA)	persen	86.21	89.66	93.10	96.55	100.00	100.00	100.00	100.00				100	
4.1.7 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tepat waktu	tepat/tidak tepat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya				Ya	
4.1.8 Penyusunan LKPJ tepat Waktu	tepat/tidak tepat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya				Ya	
4.1.9 Cakupan Evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se Papua	persen	100	100	100	100	100	100	100	100				100	
4.1.10 Cakupan Evaluasi RKP Kabupaten/Kota se Papua	persen	85	85	90	95	100	100	100	100				100	
4.1.11 Cakupan ketersediaan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	persen			80	85	90	95	95	100				100	
4.1.12 Cakupan hasil kajian yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan kebijakan ekonomi	persen	80	80	85	85	90	90	90	90				90	
4.1.13 Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang ekonomi	persen	-	-	25.00	35.36	50.00	70.71	100.00	100.00				100.0	
4.1.14 Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang sosbud	persen	-	-	25.00	35.36	50.00	70.71	100.00	100.00				100.0	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	RPJMD		
4.1.15 Persentase ketercapaian sasaran pembangunan bidang fispra	persen	-	-	25.00	35.36	50.00	70.71	100.00	100.00	100.00	
4.1.16 Jumlah kemitraan yang dilaksanakan untuk peningkatan perencanaan pembangunan daerah	jumlah		4	4	4	4	4	4	4	20	
4.1.17 Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang mandatoris yang telah ditetapkan	persen		60	70	70	80	90	100	100	100	
4.1.18 Persentase implementasi perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	persen		30	50	50	70	100	100	100	100	
4.2. Keuangan											Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
4.2.1 Persentase penerapan Sistem Informasi Data Pengelolaan Keuangan Otsus	persen		90	100	100	100	100	100	100	100	
4.2.2 Jumlah Kabupaten/kota yang melakukan pengelolaan keuangan secara baik	dokumen	1	2	-	-	-	-	-	-	2	
4.2.3 Cakupan implementasi regulasi pengelolaan dana Otsus	persen		85	85	90	95	100	100	100	100	
4.2.4 Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
4.2.5 Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah	persen	-	-	100	100	100	100	100	100	100	
4.2.6 Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi	persen	-	20	20	20	40	40	40	50	50	
4.2.7 Penyampaian LKPD Tepat Waktu	tepat/tidak tepat	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
4.2.8 Tertib Administrasi BMD	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	
4.2.9 Cakupan jumlah kabupaten/kota yang menyusun APBD secara tepat waktu dan berkualitas	persen		80	85	85	95	100	100	100	100	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	RPJMD					
4.2.10	Cakupan evaluasi laporan pertanggungjawaban APBD kabupaten/kota Kabupaten/Kota Se Papua	persen		100	100	100	100	100	100	100	100	100		
4.2.11	Tersusunnya APBD dan Perubahan APBD secara tepat waktu dan berkualitas	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya		Ya
4.2.12	Cakupan Implementasi Analisis Standar Belanja Daerah	persen	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100
4.2.13	Persentase aset daerah yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan retribusi	persen	-	20	20	20	40	40	40	50	50	50		50
4.2.14	Opini Pemeriksaan BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP
4.2.15	Penyampaian LKPD Tepat Waktu	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya		Ya
4.2.16	Tertib Administrasi BMD	ya/tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya		Ya
4.2.17	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	persen	1.26	1.56	1.94	2.41	2.99	3.71	4.60	4.60	4.60	4.60		4.60
4.2.18	Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah	persen	7.81	8.61	9.49	10.46	11.52	12.70	14.00	14	14	14		14
4.2.19	Efektifitas pendapatan asli daerah	persen	1.96	2.10	2.26	2.42	2.60	2.79	3.00	3.00	3.00	3.00		3.00
4.2.20	Prosentase Peningkatan Kontribusi UPTB dalam pungutan Pendapatan Asli Daerah	jenis	-	-	2	2	2	3	3	3	3	3		12
4.2.21	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	Persen	14	16	18	20	22	26	28	28	28	28		28
4.3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan														
4.3.1	Jumlah SDM Papua yang mengikuti pelatihan dan magang	orang	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		500.00
4.3.2	Jenis Diklat yang terakreditasi A	jumlah	-	3	3	3	5	5	8	8	8	8		8
4.3.3	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan II yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen		80	80	82	85	87	90	90	90	90		90
4.3.4	Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan III yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen		70	75	80	85	85	90	90	90	90		90

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	RPJMD		
4.3.5 Persentase ASN peserta Diklat Kepemimpinan IV yang Lulus dengan Kualifikasi Sangat Memuaskan	persen			65	70	75	80	85	85		
4.3.6 Jumlah ASN yang mengikuti bimtek sesuai tupoksinya	orang			100	100	100	100	100	500		
4.4. Penelitian dan pengembangan											Urusan Pemerintahan
4.4.1 Jumlah hasil kelibangan yang terpilih untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah	jenis per tahun			5	5	8	8	10	10		Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
4.4.2 Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	persen			40	45	50	55	60	60		
4.5 Penerapan SIDA											
4.5.1 Jumlah Teknologi Tepat Guna dalam Mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah	jenis			1	1	1	1	1	5		
4.6. Pengawasan											Urusan Pemerintahan
4.6.1 Persentase kasus pelanggaran administrasi yang tertangani	persen			-	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	95.00	Fungsi Penunjang Pengawasan
4.6.2 Cakupan pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditindaklanjuti	persen			15	20	25	30	35	35		
4.6.3 Cakupan tenaga pemeriksa yang telah memiliki sertifikat kompetensi	orang per tahun			-	1	1	2	2	4	10	
4.6.4 Cakupan jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	persen			-	80	85	95	100	100	100	
4.6.5 Cakupan tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	persen			40	40	45	45	50	50		
4.6.6 Persentase OPD dengan nilai SAKIP B	persen			20	25	30	35	35	35	35	
4.6.7 Cakupan Implementasi SPIP pada perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Papua	persen			30	30	40	40	50	60	60	

Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD					Target Tahun Ke			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Urusan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
4.7. Sekretariat Dewan											
4.7.1	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada/tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
4.7.2	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada/tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
ASPEK OTONOMI KHUSUS											
1. Layanan Urusan Wajib Dasar											
1.1. Pendidikan											
1.1.1	Persentase OAP usia dini yang mengikuti PAUD	persen	40	43.51	47.33	51.48	56.00	56			Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
1.1.2	Rasio OAP yang mengikuti kelas kecil	persen	85	88.52	92.20	96.02	100.00	100			
1.1.3	Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SD	persen	2.15	1.70	1.35	1.07	0.85	0.85			
1.1.4	Angka Putus Sekolah siswa OAP pada jenjang SMP	persen	1.22	0.82	0.55	0.37	0.25	0.25			
1.1.5	Persentase siswa SMA/SMK OAP yang lulus dengan nilai UAN di atas rata-rata	persen	35	40.05	45.83	52.44	60.00	60			
1.1.6	Cakupan siswa lulusan OAP yang diterima di PTN	per 1000 siswa OAP	200	200	200	200	200	1000			
1.1.7	Angka Melek Huruf penduduk OAP	persen	45	48.36	51.96	55.84	60.00	60			
1.1.8	Cakupan siswa OAP yang mendapatkan bantuan beasiswa lulus dengan IPK memuaskan	persen	-	70.00	80.00	80.00	85.00	85.00			
1.1.9	Persentase Anak Asli Papua penerima Beasiswa Pendidikan Jenjang SMK	persen	30.00	32.67	35.57	38.73	42.17	45.92	50.00	50.00	

BAB V

PENUTUP

Bab Penutup ini menguraikan kaidah implementasi dan Pedoman Transisi RPJMD Papua Tahun 2019-2023



RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi dan RPJMN. Pelaksanaan Perda tentang RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023 perlu memperhatikan beberapa kaidah, sehingga menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya dan dilaksanakan secara konsisten. Selain itu, perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur bagaimana perencanaan tahunan pada saat RPJMD akan berakhir periodenya.

5.1. Kaidah Implementasi

Dokumen RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 merupakan pedoman bagi pemerintah provinsi dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, serta merupakan dokumen yang harus diperhatikan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota se-Papua dalam menyusun dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Provinsi Papua berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2019-2023 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha.
2. Gubernur, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua 2019-2023 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah.
3. Gubernur Papua berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023 kepada masyarakat.
4. Bappeda melaksanakan Pengendalian dan evaluasi berkala terhadap RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023.
5. Penyusunan RKPD Provinsi Papua pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Provinsi Papua Tahun 2019-2023, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua Tahun 2019 sampai dengan 2023.
6. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Papua berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 berpedoman pada RPJMD Tahun 2019-2023 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
7. Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota pada wilayah Provinsi Papua berpedoman pada RPJMD Provinsi Papua tahun 2019-2023 sehingga terwujud sinergi dan kolaborasi pembangunan di seluruh Papua.

5.2. PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang disusun pada Tahun 2023, sebagai tahun terakhir periode RPJMD Papua. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2024 (pada saat belum ada RPJMD periode berikutnya) berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Papua 2005-2025, RKP Tahun 2024, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan dasar penyusunan RAPBD Provinsi Papua Tahun 2024. Pemerintah Provinsi Papua akan menyusun RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani/terselesaikan sampai dengan Tahun 2023, selain untuk menjawab isu-isu strategis tahun berikutnya, prioritas pembangunan nasional dan provinsi, dan lain-lain.

